

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA
DALAM RANGKA
PEMBICARAAN TINGKAT II
PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN ACARA POKOK
PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

- 1. PEMBICARAAN TINGKAT I :
JUMAT, 13 JUNI 2025 PUKUL 08.30 WIB
PENJELASAN BUPATI;**
- 2. PEMBICARAAN TINGKAT I :
JUMAT, 13 JUNI 2025 PUKUL 13.30 WIB
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI;**
- 3. PEMBICARAAN TINGKAT I :
JUMAT, 13 JUNI 2025 PUKUL 19.30 WIB
JAWABAN BUPATI;**
- 4. PEMBICARAAN TINGKAT II :
RABU, 09 JULI 2025 PUKUL 13.30 WIB
KEPUTUSAN;**

**RABU, 09 JULI 2025
PUKUL : 13.30 WIB**

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA
JL. IR.H. DJUANDA NO.11 PURWAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembicaraan tingkat II Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2024 dengan acara pokok Pengembalian Keputusan, yang dilaksanakan sebagai berikut :

I. Pembicaraan Tingkat I :

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Jenis Rapat | : Paripurna |
| 2. Hari / Tanggal | : Jumat, 13 Juni 2025 |
| 3. Tempat | : Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Purwakarta |
| 4. Acara Rapat | : 1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati;
4. Doa/Penutup; |
| 5. Waktu Rapat | : Dibuka Pukul 08.30 Wib
Ditutup Pukul 11.00 Wib |
| 6. Pimpinan Rapat | : SRI PUJI UTAMI |
| 7. Sekretaris Rapat | : H.SUHANDI, M.Si |
| 8. Jumlah Anggota DPRD | : 50 Orang |
| 9. Jumlah Anggota yang hadir | : 35 Orang |
| 10. Undangan yang hadir | : 159 Orang |

II. Pembicaraan Tingkat I :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Jenis Rapat | : Paripurna |
| 2. Hari / Tanggal | : Jumat, 13 Juni 2025 |
| 3. Tempat | : Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Purwakarta |
| 4. Acara Rapat | : 1. Pembukaan;
2. Pemandangan Umum Fraksi
3. Doa/Penutup; |
| 5. Waktu Rapat | : Dibuka Pukul 13.00 Wib
Ditutup Pukul 16.00 Wib |
| 6. Pimpinan Rapat | : SRI PUJI UTAMI |
| 7. Sekretaris Rapat | : H.SUHANDI, M.Si |
| 8. Jumlah Anggota DPRD | : 50 Orang |
| 9. Jumlah Anggota yang hadir | : 34 Orang |
| 10. Undangan yang hadir | : 136 Orang |

III. Pembicaraan Tingkat I :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Jenis Rapat | : Paripurna |
| 2. Hari / Tanggal | : Jumat, 13 Juni 2025 |
| 3. Tempat | : Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Purwakarta |
| 4. Acara Rapat | : 1. Pembukaan;
2. Jawaban Bupati;
3. Doa/Penutup; |
| 5. Waktu Rapat | : Dibuka Pukul 19.30 Wib
Ditutup Pukul 21.00 Wib |
| 6. Pimpinan Rapat | : SRI PUJI UTAMI |
| 7. Sekretaris Rapat | : H.SUHANDI, M.Si |
| 8. Jumlah Anggota DPRD | : 50 Orang |
| 9. Jumlah Anggota yang hadir | : 35 Orang |
| 10. Undangan yang hadir | : 159 Orang |

IV. Pembicaraan Tingkat II

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Jenis Rapat | : Paripurna |
| 2. Hari / Tanggal | : Rabu, 09 Juli 2025 |
| 3. Tempat | : Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Purwakarta |
| 4. Acara Rapat | : 1. Pembukaan;
2. Laporan Banggar;
3. Pendapat Fraksi-fraksi ;
4. Keputusan;
5. Pendapat Akhir Bupati, dan;
6. Doa/Penutup; |
| 5. Waktu Rapat | : Dibuka Pukul 13.30 Wib
Ditutup Pukul 26.00 Wib |
| 6. Pimpinan Rapat | : SRI PUJI UTAMI |
| 7. Sekretaris Rapat | : RUDI HARTONO, S.AP.MM |
| 8. Jumlah Anggota DPRD | : 50 Orang |
| 9. Jumlah Anggota yang hadir | : 38 Orang |
| 10. Undangan yang hadir | : 158 Orang |

Setiap Rapat Paripurna dibuka dan diawali dengan Ucapan "Bismillahirrohmanirrohim" Ketuk palu 1 kali dan di tutup dengan Ucapan "Alhamdulillahirobbil 'alamin" ketuk palu 3 kali

Wassalamu alaikum Wr. Wb.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152
Telepon: (0264) 207908 Faksimile: (0264) 211229

Laman : <https://dprd.purwakartakab.go.id/> pos-el: sekretariatdprd.purwakartakab@gmail.com

Purwakarta, 12 Juni 2025

Nomor : 900.1/ 498 /DPRD
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Paripurna DPRD

Yth. Para Anggota DPRD
Kabupaten Purwakarta
di-
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka penyampaian raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tk. I, yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tk. I Pembahasan raperda tentang P2APBD Kabupaten Purwakarta TA. 2024

a) Rapat Paripurna dengan Agenda Pokok Penjelasan Bupati;

Hari / Tanggal : Jum'at/ 13 Juni 2025;
Pukul : 08.30 WIB;
Pakaian : PSH;
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Purwakarta;
Acara : 1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati;
3. Do'a/Penutup.

b) Rapat Paripurna dengan Agenda Pokok Pandangan Umum Fraksi:

Hari / Tanggal : Jum'at/ 13 Juni 2025;
Pukul : 13.30 WIB;
Pakaian : PSH;
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Purwakarta;
Acara : 1. Pembukaan;
2. Pandangan Umum Fraksi;
3. Do'a/Penutup.

c) Rapat Paripurna dengan Agenda Pokok Jawaban Bupati;

Hari/ Tanggal: Jum'at/ 13 Juni 2025;

Pukul : 19.30 WIB;

Pakaian : PSH;

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Purwakarta;

Acara : 1. Pembukaan;
2. Jawaban Bupati;
3. Do'a/Penutup.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purwakarta
Ketua



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

SRI PUJI UTAMI

Catatan :

Dimohon hadir 15 menit sebelum acara dimulai.

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

**Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0264) 207908
Purwakarta**

RISALAH : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA DALAM RANGKA PEMBICARAAN TK I PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN AGENDA POKOK PENJELASAN BUPATI.

HARI : JUMAT ;

TANGGAL : 13 JUNI 2025;

PUKUL : 08.30 WIB;

TEMPAT : AULA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

SAMPURASUN....

Yth. SDR BUPATI PURWAKARTA;

Yth. SDR WAKIL BUPATI PURWAKARTA;

YTH. PARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA;

Yth. UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN

DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;

Yth. KEPALA KEPOLISIAN RESORT ✓

PURWAKARTA ATAU YANG MEWAKILI;

Yth. KOMANDAN DISTRIK MILITER 0619 ✓

PURWAKARTA ATAU YANG MEWAKILI;

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA ✓

ATAU YANG MEWAKILI;

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA ✓

ATAU YANG MEWAKILI;

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA ATAU YANG MEWAKILI; ✓

Yth. KOMANDAN RESIMEN ARMED 1/SY/I KOSTRAD; ✓

Yth. KOMANDAN YON ARMED 09 PASOPATI;

Yth. KOMANDAN SUB DEN POM PURWAKARTA;

Yth. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
PURWAKARTA;

Yth. KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA;

Yth. SEKRETARIS DAERAH, PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH, PARA
CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA SE KABUPATEN PURWAKARTA;

Yth. PENGURUS PARPOL/ORMAS/LSM, PERS DAN TOKOH
MASYARAKAT SERTA PARA ALIM ULAMA SE-KABUPATEN
PURWAKARTA SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ILLAHI ROBBI, ATAS LIMPAHAN RAKHMAT DAN KARUNIA-NYA, SEHINGGA SAAT INI KITA MASIH DIBERI KEKUATAN LAHIR DAN BATIN, UNTUK MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN AGENDA POKOK PENJELASAN BUPATI.

SELANJUTNYA SESUAI LAPORAN DARI PIHAK SEKRETARIAT DEWAN, BAHWA PARA ANGGOTA DEWAN TELAH HADIR SEBANYAK 33 (TIGAPULUH TIGA) ORANG, DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN TATA TERTIB DEWAN, RAPAT TELAH DAPAT DILAKSANAKAN.

DIAWALI UCAPAN

"BISMILLAHIRROHMANIRROHIM"

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI JUMAT, TANGGAL 13 JUNI 2025, KAMI NYATAKAN :

===== DI BUKA =====

===== KETUK PALU 1 KALI =====

PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA SUSUNAN ACARA RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN;
2. PENJELASAN BUPATI ;
3. DO`A / PENUTUP.

1. PEMBUKAAN

SESUAI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PASAL 194 AYAT I YANG MENYATAKAN BAHWA KEPALA DAERAH MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KEPADA DPRD DENGAN DILAMPIRI LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIPERIKSA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SERTA IKHTISAR LAPORAN KINERJA DAN LAPORAN KEUANGAN BUMD PALING LAMBAT 6 (ENAM) BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR. DAN PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TA 2024 TELAH DISAMPAIKAN OLEH BUPATI MELALUI SURAT BUPATI PURWAKARTA NOMOR 100.3.2/1020-BKAD/2025, TANGGAL 12 JUNI 2025 KEPADA PIMPINAN DPRD. MAKA BERDASARKAN HAL TERSEBUT DAPAT DILAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA TK I PADA HARI INI.

2. PENJELASAN BUPATI

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

SELANJUTNYA UNTUK MELIHAT SEJAUH MANA RAPERDA TERSEBUT TELAH MEMENUHI ALASAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH KAMI UTARAKAN TADI, MAKA BERDASARKAN PASAL 9 AYAT (3) HURUF A NOMOR 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 12 TAHUN 2018, MARILAH KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KEDUA YAITU PENJELASAN BUPATI.

KEPADA SAUDARA BUPATI UNTUK MENYAMPAIKAN
PENJELASANNYA, DIPERSILAHKAN_____

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA BUPATI ATAS PENJELASANNYA
YANG DISAMPAIKAN OLEH WAKIL BUPATI, SEMOGA KITA SEKALIAN
KHUSUSNYA PARA ANGGOTA DEWAN BENAR-BENAR TELAH DAPAT
MENYIMAK DAN MEMAHAMINYA , SEHINGGA DAPAT DIJADIKAN
BAHAN PERTIMBANGAN PADA PEMBAHASAN LEBIH LANJUT DALAM
RAPAT RAPAT DEWAN BERIKUTNYA.

3. DO'A / PENUTUP

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI
SAMPAILAH PADA ACARA YANG TERAKHIR YAITU DO'A / PENUTUP.
DENGAN INI KAMI MOHON KESEDIAAN SAUDARA
ASEP JAELANI, S.H. UNTUK MEMIMPIN PEMBACAAN DO'A ,
DIPERSILAHKAN.

TERIMAKASIH, SEMOGA DO'A KITA SEKALIAN DIKABULKAN OLEH
ALLAH SWT. AAMIIN.

AKHIRNYA KAMI ATAS NAMA PIMPINAN DEWAN MENGUCAPKAN
TERIMAKASIH, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA .
DIAKHIRI UCAPAN,

"ALHAMDULILLAHIRROBIL'ALAMIN"

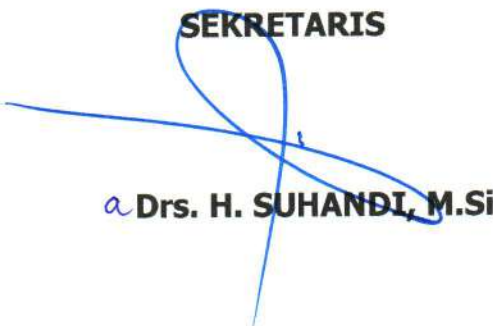
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI
INI, JUMAT TANGGAL 13 JUNI 2025 PUKUL, KAMI NYATAKAN :

===== DI TUTUP =====
===== KETUK PALU 3 KALI =====

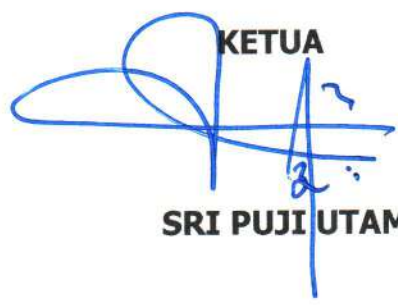
WABILAHTAUFIK WALHIDAYAH
WASSALAMUALLAIKUM WR WB.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

SEKRETARIS


a Drs. H. SUHANDI, M.Si

KETUA


SRI PUJI UTAMI



**NOTA PENGANTAR
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2024**

**Disampaikan :
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Purwakarta
Juni 2025**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM.

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SAMPURASUN

YANG TERHORMAT BAPAK/IBU PIMPINAN
BESERTA SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA;

YANG TERHORMAT, UNSUR FORUM KOMUNIKASI
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,
DANMEN ARMED 2 STHIRA YUDHA, KETUA

*Nota Pengantar Raperda PertanggungJawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta
Tahun Anggaran 2024*

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA, DANYON ARMED-9 PASOPATI, SERTA DANSUB DENPOM PURWAKARTA;

PARA PIMPINAN ORGANISASI SOSIAL POLITIK, KETUA KPU DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, SESEPUH DAN PINISEPUH PURWAKARTA, ORMAS, LSM, INSAN PERS SERTA MASYARAKAT PURWAKARTA YANG SAYA CINTAI;

HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

SEGALA PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KE HADIRAT ALLAH SWT, ATAS RAHMAT, NIKMAT, HIDAYAH DAN KARUNIA-NYA YANG TAK PERNAH PUTUS KEPADA KITA SEKALIAN, HINGGA PADA SAAT INI KITA MASIH DIBERI KESEMPATAN UNTUK BERSILATURAHMI DAN BERKUMPUL MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

PADA KESEMPATAN INI PERLU DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH HADIRIN, BAHWA RANGKAIAN PROSES PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN JAWA BARAT BERJALAN DENGAN LANCAR. POLA PEMERIKSAAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DILAKSANAKAN MELALUI METODE DESK AUDIT YAITU MELALUI PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI DARI PEMERINTAH DAERAH DAN AUDIT LAPANGAN.

ALHAMDULILLAH HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 MENDAPAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP). HAL INI PATUT KITA SYUKURI DAN PADA KESEMPATAN INI KAMI

MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH KEPADA SELURUH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG TERUS MENDORONG DAN MEMBERIKAN MASUKAN-MASUKAN KEPADA KAMI UNTUK TERUS MELAKUKAN PERBAIKAN-PERBAIKAN DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEHINGGA PADA TAHUN INI PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BISA MEMPERTAHAKAN PREDIKAT WTP DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN JAWA BARAT.

HADIRIN UNDANGAN YANG TERHORMAT.

BAHWA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA, PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH BAHWA UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BUPATI

BERKEWAJIBAN
UNTUK
MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH, DALAM HAL INI
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024, YANG
DISAJIKAN DALAM FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN SURAT
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
900.1.15.1/1439/KEUDA TANGGAL 10 APRIL TAHUN
2025 TENTANG PENYUSUNAN DAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN
KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2024.

**RAPAT PARIPURNA DPRD SERTA HADIRIN YANG
SAYA HORMATI,**

PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2024, MERUPAKAN RANGKUMAN DATA
DARI SELURUH KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
YANG DILAKSANAKAN OLEH SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH. DENGAN DEMIKIAN PERAN
PENGELOLA KEUANGAN PADA SKPD SANGAT
MENENTUKAN HASIL AKHIR PENYAJIAN DOKUMEN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN SECARA KUMULATIF
AKAN TERSUSUN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD SEBAGAIMANA PERATURAN
PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU.

BERKAT UPAYA-UPAYA TERSEBUT, PADA HARI
INI SAYA DAPAT MENYAMPAIKAN RAPERDA TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 YANG DISUSUN BERDASARKAN AKRUAL BASIS, DIDALAMNYA MEMUAT LAPORAN REALISASI APBD TAHUN 2024, LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH, LAPORAN OPERASIONAL, LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS, NERACA PER 31 DESEMBER 2024, LAPORAN ARUS KAS, DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN JAWA BARAT.

RAPAT PARIPURNA DPRD SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

UNTUK LEBIH JELASNYA SAYA AKAN MENYAMPAIKAN URAIAN PENJELASAN DARI LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024, SECARA LEBIH SEKSAMA, DIMULAI DARI:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024.

REALISASI APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024, BERDASARKAN TATA URUTANNYA, KAMI AWALI DARI SISI PENDAPATAN, REALISASI PENDAPATAN DAERAH PADA TAHUN 2024 SEBESAR Rp2.548.811.674.513,00 (**DUA TRILIUN LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN MILYAR DELAPAN RATUS SEBELAS JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS TIGA BELAS RUPIAH**) YANG BERARTI MENCAPAI 93,46% (**SEMBILAN PULUH TIGA KOMA EMPAT PULUH ENAM PERSEN**) DARI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN SEBESAR Rp2.727.171.220.537,00 (**DUA TRILIUN TUJUH RATUS DUA PULUH TUJUH MILYAR SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH TUJUH RUPIAH**).

BERKENAAN DENGAN POS BELANJA DAN TRANSFER APBD TAHUN 2024, REALISASI BELANJA DAN TRANSFER SEBESAR Rp2.554.467.819.500,00 **(DUA TRILIUN LIMA RATUS LIMA PULUH EMPAT MILYAR EMPAT RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS RIBU LIMA RATUS RUPIAH)** YANG BERARTI MENCAPAI 92,57% **(SEMBILAN PULUH DUA KOMA LIMA PULUH TUJUH PERSEN)** DARI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN SEBESAR Rp2.759.423.158.198,00 **(DUA TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH SEMBILAN MILYAR EMPAT RATUS DUA PULUH TIGA JUTA SERATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH).**

SELANJUTNYA BERKENAAN DENGAN POS PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2024, DAPAT DISAMPAIKAN UNTUK PEMBIAYAAN DAERAH REALISASINYA SEBESAR Rp32.251.937.661,00 **(TIGA PULUH DUA MILYAR DUA RATUS LIMA PULUH**

SATU JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH SATU RUPIAH) ATAU SEBESAR 100,00% (**SERATUS PERSEN**) DARI ANGGARAN SEBESAR Rp32.251.937.661,00 (**TIGA PULUH DUA MILYAR DUA RATUS LIMA PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH SATU RUPIAH**) SELANJUTNYA BERKENAAN DENGAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN ADALAH SEBESAR Rp26.595.792.674,00 (**DUA PULUH ENAM MILYAR LIMA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH**). SILPA TERSEBUT TERDIRI DARI:

- KAS YANG ADA DI KAS DAERAH PER 31 DESEMBER 2024 ADALAH SEBESAR Rp8.729.075.635,00 (**DELAPAN MILYAR TUJUH RATUS DUA PULUH**

SEMBILAN JUTA TUJUH PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH LIMA RUPIAH).

- KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2024 SEBESAR Rp33.772.102,00 ***(TIGA PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU SERATUS DUA RUPIAH).***
- KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN PER 31 DESEMBER 2024 SEBESAR Rp105.800,00 ***(SERATUS LIMA RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH).***
- KAS DI BLUD RSUD BAYU ASIH PER 31 DESEMBER 2024 SEBESAR Rp9.759.256.497,00 ***(SEMBILAN MILYAR TUJUH RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RUPIAH).***
- KAS DI BLUD PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN PER 31 DESEMBER 2024 SEBESAR Rp4.798.936.753,00 ***(EMPAT MILYAR TUJUH***

***RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA
SEMBILAN RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU
TUJUH RATUS LIMA PULUH TIGA RUPIAH).***

- KAS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PER 31 DESEMBER 2024 SEBESAR
Rp595.103.973,00 ***(LIMA RATUS SEMBILAN
PULUH LIMA JUTA SERATUS TIGA RIBU
SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TIGA
RUPIAH).***
- DAN KAS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
(BOK) PUSKESMAS PER 31 DESEMBER 2023
SEBESAR Rp2.679.541.914,00 ***(DUA MILYAR
ENAM RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA
LIMA RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU
SEMBILAN RATUS EMPAT BELAS RUPIAH).***

II. LAPORAN NERACA

NERACA DAERAH TERDIRI DARI DUA SISI, YAITU
SISI AKTIVA ADALAH ASET DAN SISI PASIVA ADALAH
KEWAJIBAN DAN EKUITAS.

ASET PER 31 DESEMBER 2024 SEBESAR Rp3.095.743.952.952,00 (**TIGA TRILIUN SEMBILAN PULUH LIMA MILYAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DUA RUPIAH**) ATAU ADANYA KENAIKAN SEBESAR 1,12% (**SATU KOMA DUA BELAS PERSEN**) DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2023 SEBESAR Rp3.061.379.032.264,00 (**TIGA TRILIUN ENAM PULUH SATU MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA TIGA PULUH DUA RIBU DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT RUPIAH**).

KEWAJIBAN PER 31 DESEMBER 2024 SEBESAR Rp131.211.819.595,00 (**SERATUS TIGA PULUH SATU MILYAR DUA RATUS SEBELAS JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RUPIAH**) ATAU ADANYA PENURUNAN SEBESAR 34,72% (**TIGA PULUH EMPAT KOMA TUJUH PULUH DUA**

PERSEN) DIBANDING DENGAN TAHUN 2023 SEBESAR Rp201.012.662.186,00 (***DUA RATUS SATU MILYAR DUA BELAS JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH DUA RIBU SERATUS DELAPAN PULUH ENAM RUPIAH***).

EKUITAS PER 31 DESEMBER 2024 SEBESAR Rp2.964.532.133.357,00 (***DUA TRILIUN SEMBILAN RATUS ENAM PULUH EMPAT MILYAR LIMA RATUS TIGA PULUH DUA JUTA SERATUS TIGA PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH TUJUH RUPIAH***) ATAU ADANYA KENAIKAN SEBESAR 3,64% (***TIGA KOMA ENAM PULUH EMPAT PERSEN***) DIBANDING DENGAN TAHUN 2023 SEBESAR Rp2.860.366.370.078,00 (***DUA TRILIUN DELAPAN RATUS ENAM PULUH MILYAR TIGA RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH RIBU TUJUH PULUH DELAPAN RUPIAH***).

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL MERUPAKAN KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN YANG MENYEDIKAN INFORMASI MENGENAI SELURUH KEGIATAN OPERASIONAL KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PURWAKARTA YANG TERCERMIN DALAM PENDAPATAN LAPORAN OPERASIONAL, BEBAN DAN SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL.

PENDAPATAN LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2024 SEBESAR Rp2.373.476.671.441,00
(DUA TRILIUN TIGA RATUS TUJUH PULUH TIGA MILYAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH SATU RUPIAH).

BEBAN LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2024 SEBESAR Rp2.306.347.294.320,00
(DUA TRILIUN TIGA RATUS ENAM MILYAR TIGA RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS

SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU TIGA RATUS DUA PULUH RUPIAH).

SURPLUS LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2024 SEBESAR Rp67.106.217.121,00 ***(ENAM PULUH TUJUH MILYAR SERATUS ENAM JUTA DUA RATUS TUJUH BELAS RIBU SERATUS DUA PULUH SATU RUPIAH).***

UNTUK LEBIH JELASNYA MENGENAI RINCIAN ANGKA DAPAT DILIHAT DALAM LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 YANG TELAH KAMI SAMPAIKAN.

DEMIKIAN NOTA PENGANTAR PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2024 YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, DAN UNTUK SELANJUTNYA MENJADI BAHAN DALAM PEMBAHASAN LEBIH LANJUT.

BILLAHI TAUFIK WAL HIDAYAH.

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.



BERITA ACARA

NOMOR : 000.5.7/18/DPRD/2025

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA DALAM RANGKA PEMBICARAAN TK I PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN AGENDA POKOK PENJELASAN BUPATI.

Pada hari ini Jum'at tanggal Tigabelas bulan Juni tahun Duaribu Duapuluh Lima (13-06-2025), telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta dalam rangka Pembicaraan Tk. I Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 dengan agenda Pokok Penjelasan Bupati.

I. Pembukaan

Rapat dilaksanakan dimulai pukul 09.45 WIB dan selesai pada pukul 10.25 WIB. Sesuai dengan waktu yang dijadwalkan dalam surat undangan nomor 100.3.2/499/DPRD Tanggal 12 Juni 2025 Perihal Undangan Rapat Paripurna DPRD, dan dihadiri oleh 33 (tigapuluh tiga) orang.

II. Pembahasan

Rapat Dipimpin dan dibuka Oleh Ketua DPRD sementara Kabupaten Purwakarta, Yth. Sri Puji Utami Dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati;
3. Do'a / Penutup.

1. Pembukaan

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pengajuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta Ta 2024 telah disampaikan oleh Bupati melalui Surat Bupati Purwakarta Nomor 100.3.2/1020-BKAD/2025 tanggal 12 Juni 2025 kepada Pimpinan DPRD.

2. Penjelasan Bupati

Penjelasan Bupati disampaikan oleh Wakil Bupati Sdr. Abang Ijo Hapidin.

3. Do'a / Penutup

Do'a penutup dipimpin oleh Asep Junaedi, S.H.

III. Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, kami akan memberikan kesempatan untuk untuk menyampaikan melalui pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna TK. I agenda pokok Pemandangan Umum Fraksi.

Demikian Berita acara ini dibuat dan di tandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

SEKRETARIS DPRD



a **Drs. H SUHANDI M. Si**

KETUA



SRI PUJI UTAMI

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. PURWAKARTA

HARI : JUM'AT
TANGGAL : 13 JUNI 2025
PUKUL : 08.30 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD
ACARA : RAPAT PARIPURNA PEMBICARAAN TK. I
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RAPERDA
P2APBD KABUPATEN PURWAKARTA TA.
2024 AGENDA POKOK PENJELASAN BUPATI

NO	NAMA	JABATAN	PARTAI	TANDATANGAN
1	SRI PUJI UTAMI	KETUA	GERINDRA	1
2	DIAS RUKMANA PRAJA, S.E.	WK. KETUA	GOLKAR	2
3	LUTHFI BAMALA	WK. KETUA	NASDEM	3
4	Drs. H. ENTIS SUTISNA, S.H., M.M.	WK. KETUA	PDI-P	4
5	RICKY SYAMSUL FAUZI	ANGGOTA	GERINDRA	5
6	H. TEDDY NANDUNG HERYAWAN, S.E.	ANGGOTA	GERINDRA	6
7	REGINA MULYA DWIYANTI	ANGGOTA	GERINDRA	7
8	SAID ALI AZMI	ANGGOTA	GERINDRA	8
9	SULAEMAN	ANGGOTA	GERINDRA	9
10	ZUSYEF GUSNAWAN, S.E.	ANGGOTA	GERINDRA	10
11	WAWAN SETIAWAN, S.E.	ANGGOTA	GERINDRA	11
12	Hj. NINA HELTINA	ANGGOTA	GERINDRA	12
13	DIANA LISU ARRANG BATO LIMBONG, S.Pd.	ANGGOTA	GERINDRA	13
14	MESAKH SUPRIYADI, S.E., M.Si.	ANGGOTA	GOLKAR	14
15	AHMAD SANUSI, S.M.	ANGGOTA	GOLKAR	15
16	KARWITA, S.H., M.H.	ANGGOTA	GOLKAR	16
17	KAMAL, S.S.	ANGGOTA	GOLKAR	17
18	H. OJA SUTISNA	ANGGOTA	GOLKAR	18
19	Hj. ENAH ROHANAH	ANGGOTA	GOLKAR	19
20	H. ELAN SOFYAN, S.M.	ANGGOTA	GOLKAR	20
21	Hj. PUTRIARTI PUTIK HARUMAWANGI, S	ANGGOTA	GOLKAR	21
22	Dra. Hj. DENI YANTHI	ANGGOTA	NASDEM	22
23	H. ELTHON BRAMEISTA GUNAWAN, S.H.	ANGGOTA	NASDEM	23
24	IIN SALAMIRAH	ANGGOTA	NASDEM	24
25	DENISA WULANDARI, S.M.	ANGGOTA	NASDEM	25
26	DEVI MUTIARA SARI	ANGGOTA	NASDEM	26
27	ASTRI NOVITASARI	ANGGOTA	NASDEM	27
28	WARSENO, S.E.	ANGGOTA	PDI-P	28
29	INA HERLINA	ANGGOTA	PDI-P	29
30	LINA YULIANI	ANGGOTA	PDI-P	30
31	UJANG ROSADI	ANGGOTA	PDI-P	31
32	NOVITA PURWANTI	ANGGOTA	PDI-P	32

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI	TANDATANGAN
33	ALAIKASSALAM, S.H.I	ANGGOTA	PKB	33
34	HILMI SIROJUL FUADI	ANGGOTA	PKB	34
35	ZAENAL ARIFIN	ANGGOTA	PKB	35
36	CECENG ABDUL QODIR, S.Pd.I.	ANGGOTA	PKB	36
37	AGUS MAHARDIKA	ANGGOTA	PKB	37
38	DEDI JUHARI	ANGGOTA	PKS	38
39	H. MOH. ARIEF KURNIAWAN, M.M.	ANGGOTA	PKS	39
40	DIDIN HENDRAWAN, S.E.	ANGGOTA	PKS	40
41	H. ASEP NURYANI, S.Pd.I.	ANGGOTA	PKS	41
42	H. DEDI SUTARDI	ANGGOTA	PKS	42
43	DULNASIR, S.H., M.H.	ANGGOTA	DEMOKRAT	43
44	H. AGUS WIJAYA, S.H.	ANGGOTA	DEMOKRAT	44
45	ASEP CHANDRA TK	ANGGOTA	DEMOKRAT	45
46	MUHSIN JUNAEDI	ANGGOTA	HANURA	46
47	H. ASEP ABDULLOH	ANGGOTA	HANURA	47
48	YANTHI NURHAYATI, S.Pd.	ANGGOTA	PPP	48
49	ATO RUKMANA	ANGGOTA	PPP	49
50	H. AMING, S.M.	ANGGOTA	PAN	50

Purwakarta, 13 Juni 2025

PIMPINAN RAPAT



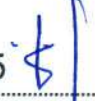
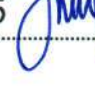
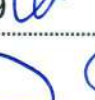


DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

HARI/ TANGGAL : JUM'AT/13 JUNI 2025
PUKUL : 08.30 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD PURWAKARTA
ACARA :

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
1		BUPATI	1
2		WAKIL BUPATI	2
3		SEKDA	3
4			4
5	Muhammad Smel	Pengadilan Agama.	5
6	SURIAWU	BKAD	6
7	Deby	PKAD	7
8	SUCIANTO	ARMED 9	8
9	Neni Mariani	DPPIRB	9
10	SRI SEHANTI	UPPIRB	10
11	Subreheri	Kec. Pongor	11
12	ABDUL KODIR	POLRES PWK	12
13	Aulia. Pamungkas	Kasatpol PP	13
14	ACE	PA	14
15	Asep Jaelan SH	KUA	15
16	Tikein	SETDA	16
17	Fatri	SETDA	17
18	HADYANTO P	DISPENSITAN	18
19	Muncenik	Caust Caupen	19

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN	
20	Lisardi P. Y.	DPR Kabupaten	20	
21	Kahmat. S	BKR Pemuda Rwa	21	
22	Yundi	Humas	22	
23	Kita	KPU	23	
24	Desi Adriana	DISPANGTAN	24	
25	Henni	Indra	25	
26	Knedy	Damka	26	
27	Isny. yuniar	Dinas Pendidikan	27	
28	M. Mambur	Kee. Manis	28	
29	H2 Popoz Marnia	Dinas Pendidikan	29	
30	KOSASIH -	DLH	30	
31	Tuti Gantini	Disnaker	31	
32	Asep R	Desdik	32	
33	Rusjuna	Disdik	33	
34	Wulanya	-	34	
35	Lunani M	Disrup	35	
36	AGUS SURAHMAN	BICAP	36	
37	Heni Kusawati	Disrup	37	
38	Hermana	monster	38	
39	Didin Samsudin	Disdik	39	
40	BAYU.	LAPAS	40	
41	VIVI	HUMAS	41	
42	Anne	Disperk	42	
43	Ita Rosati	-	43	

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
44	Fidriah	Dispecin	44 
45	SUCI	SETWAN	45 
46	Dede A	Disdik	46 
47	Ismu K	Diskominfo	47 
48	Ade Alimul	Damcar	48 
49	Agus Rasmali	Damkar Pay	49 
50	Dandi	BKPPM	50 
51	Ikham. M	PSUD PAYU ADIT	51 
52	Roma	Kec Cidahu	52 
53	RUSMAN A	Kec. Bbc	53 
54	HERIANUR	Kec. Pind	54 
55	YASMIN F.I.S	DISKANAK	55 
56	Hastin	"	56 
57	Enung	"	57 
58	Mila L	DISKANAK	58 
59	Ima K	"	59 
60	Didi Garnadi	Disnakertrans	60 
61	Dani A	Sd.	61 
62	R. Hery H	Disdik P3A	62 
63	DINAR	"	63 
64	Udahg Sanyadi	"	64 
65	Agus Dero Cusa	Bayenda	65 
66	TIN ANDRUM	CEPA	66 
67	ERNI ROSNIAWATI	GUB	67 

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
68	Kole		68
69	Heri Hidayat	DIKER	69
70	Zuh. Tela		70
71	M. Iqbal T.		71
72	Klanang, M	Dinsosp3 A	72
73	Dewi Sarah	- u -	73
74	Nina S	"	74
75	Arief B	Destia	75
76	Fahmi S	Diskamuk	76
77	PRANUSI	DISHUB	77
78	Asy. Saquni	OPPERB	78
79	ES Srikandari	Bapros 2a	79
80	Rasmat S	Sutopo PP	80
81	DEDEEN RN	ADBARO	81
82	Rudi Hik	SETDA	82
83	Dian	Bipulwin	83
84	M. NURCAHYA	BKAD	84
85	LITTA Opa APP	SUPDEN PAN PAK.	85
86	Asop TS	Kec. Kiarapedas	86
87	M. Kusma	Comar Buzer	87
88	BANI	Diskamuk	88
89	E. Soppani	Kec. Sekatani	89
90	Abu Iqbal	PZHI	90

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
91	D. Gernangin	P2HP	91
92	Anton K	Pustkesmas	92
93	Ablek K	Diskarale -	93
94	Dede Iwan	BPBP	94
95	Ary Furman	Pacar Hewan	95
96	Sheila	Slup	96
97	Muhammad	"	97
98	Evi	"	98
99	Warwan	"	99
100	Shihwan	"	100
101	Dindin M	"	101
102	Drs. Al Idrus Nurhasan	Camat kec. Darangdun	102
103	Kepkan inf Eryk P	Pansamil 05 / 7H	103
104	Kapten Arm Syarudin	meurakhi Pansamed	104
105	Sri B.	Diskom.	105
106	Henra Amahar	Bapenda	106
107	Henry mto	Diskom	107
108	Andi Maulana	Diskominfo	108
109	Jaka SB.	Diskores	109
110	Rendi H	Diskom	110
111	Yacaf	DPICB	111
112	H. Didi S	DINBO	112
113	Wini Karmila	Distanak	113
114	Wim Aditya	kec. Pura	114

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
115	Wawan. S	kec. Wanasari	115
116	Roni		116
117	Ade S		117
118	Mimida. a	Sampul BP	118
119	Nuryati	Sat pol PV	119
120	Ika wahyuni	saat	120
121	Nabila.	Protocol	121
122	Ign.	Protocol	122
123	Nabila Auli	Komunikasi	123
124	Puisuci	Komunikasi	124
125	R. DIAN AHPK.	COMAS MARIIS.	125
126	hik yulur	kec. Dondan	126
127	Amugrah	Driver race	127
128	Guxon	pamkada	128
129	Jakam	"	129
130	Rei	"	130
131	MROX	"	121
132	Malau	pam sus	132
133	Dayan	Kasi Transib / Kas Jatiluhur	133
134	ILKAS	Humas	134
135	SRI -	"	125
136	Eka -	"	136

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
137	JAKARIA	Lmp	137
138	Hurri. I	Lmp	138
139	Rani -		139
140	Sri -		140
141	AlYunda -		141
142	Keta -		142
143	Hikmah		143
144	Kandi -		144
145	Agus S		145
146	umar -		146
147	Sbi Pal. P P.		147
148	Adi.		148
149	ASIP.		149
150	Wahid, H	DisHUB	150
151	Holim	— " —	151
152	Aan	— " —	152
153	EDY .S	— " —	153
154	Duna	— " —	154
155	Ali	Staf Bupati	155
156	Hendro	— " —	156
157	Ucup	— " —	157
158	Sri	Sekolah	158
159	ARI S.	Risdan	159

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
160			160
161			161
162			162
163			163
164			164
165			165
166			166
167			167
168			168
169			169
170			170
171			171
172			172
173			173
174			174
175			175
176			176
177			177
178			178
179			179
180			180
181			181
182			182
183			183
184			184
185			185
186			186
187			187

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
188			188
189			189
190			190
191			191
192			192
193			193
194			194
195			195
196			196
197			197
198			198
199			199
200			200
201			201
202			202
203			203
204			204
205			205
206			206
207			207
208			208
209			209
210			210
211			211
212			212
213			213
214			214
215			215



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152
Telepon: (0264) 207908 Faksimile: (0264) 211229

Laman : <https://dprd.purwakartakab.go.id/> pos-el: sekretariatdprd.purwakartakab@gmail.com

Purwakarta, 12 Juni 2025

Nomor : 900.1/ 499 /DPRD
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Paripurna DPRD

Yth. Sdr. Bupati Purwakarta
di-

Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tk. I, yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tk. I Pembahasan Raperda tentang P2APBD Kabupaten Purwakarta TA. 2024

a) Rapat Paripurna dengan Agenda Pokok Penjelasan Bupati;

Hari / Tanggal : Jum'at/ 13 Juni 2025;
Pukul : 08.30 WIB;
Pakaian : PSH;
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Purwakarta;
Acara : 1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati;
3. Do'a/Penutup.

b) Rapat Paripurna dengan Agenda Pokok Pandangan Umum Fraksi:

Hari / Tanggal : Jum'at/ 13 Juni 2025;
Pukul : 13.30 WIB;
Pakaian : PSH;
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Purwakarta;
Acara : 1. Pembukaan;
2. Pandangan Umum Fraksi;
3. Do'a/Penutup.

- c) Rapat Paripurna dengan Agenda Pokok Jawaban Bupati;
Hari/ Tanggal: Jum'at/ 13 Juni 2025;
Pukul : 19.30 WIB;
Pakaian : PSH;
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Purwakarta;
Acara : 1. Pembukaan;
2. Jawaban Bupati;
3. Do'a/Penutup.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purwakarta
Ketua



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

SRI PUJI UTAMI

Catatan :
Dimohon hadir 15 menit sebelum acara dimulai.

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0214) 207908 Purwakarta

RISALAH : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
PEMBICARAAN TK I DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RAPERDA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN AGENDA
PANDANGAN UMUM FRAKSI.

HARI : JUMAT;

TANGGAL : 13 JUNI 2025;

PUKUL : 13.30 WIB;

TEMPAT : AULA RAPAT PARIPURNA DPRDKAB.
PURWAKARTA

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.
SAMPURASUN....

Yth. SDR WAKIL BUPATI PURWAKARTA;

YTH, PIMPINAN DAN PARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA;

Yth. UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;

Yth. KEPALA KEPOLISIAN RESORT
PURWAKARTA ATAU YANG MEWAKILI;

Yth. KOMANDAN DISTRIK MILITER 0619
PURWAKARTA ATAU YANG MEWAKILI;

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA
ATAU YANG MEWAKILI;

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
ATAU YANG MEWAKILI;

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA ATAU YANG MEWAKILI;

Yth. KOMANDAN MEN ARMED1/SY/I KOSTRAD;

Yth. KOMANDAN YON ARMED 09 PASOPATI;

Yth. KOMANDAN SUB DEN POM PURWAKARTA;

Yth. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
PURWAKARTA;

Yth. KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN
PURWAKARTA;

Yth. SEKRETARIS DAERAH, PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH,
PARA CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA SE KABUPATEN
PURWAKARTA;

Yth. PENGURUS PARPOL/ORMAS/LSM, PERS DAN TOKOH
MASYARAKAT SERTA PARA ALIM ULAMA SE-KABUPATEN
PURWAKARTA DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

SYUKUR ALHAMDULILLAH KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA HANYA ATAS RAHMAT DAN KARUNIA-NYA. PADA HARI INI KITA DALAM KEADAAN SEHAT, DAN MASIH BERKESEMPATAN UNTUK MENGIKUTI PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT I DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN AGENDA PANDANGAN UMUM FRAKSI. SHOLAWAT SERTA SALAM SENANTIASA TERCURAH KEPADA NABI MUHAMMAD SAW, KEPADA KELUARGANYA PARA SAHABATNYA SERTA UMAT NYA HINGGA AKHIR JAMAN.

RAPAT DEWAN YANG KAMI MULYAKAN SELANJUTNYA SESUAI LAPORAN DARI PIHAK SEKRETARIAT DEWAN, BAHWA PARA ANGGOTA DEWAN TELAH HADIR SEBANYAK 34 (TIGA PULUH EMPAT) ORANG DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN TATA TERTIB DEWAN, RAPAT TELAH DAPAT DILAKSANAKAN.

DIAWALI UCAPAN

"BISMILLAHIRROHMANIRROHIM"

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI JUMAT, TANGGAL 13 JUNI 2025, KAMI NYATAKAN :

===== DI BUKA =====

===== KETUK PALU 1 KALI =====

PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA SUSUNAN ACARA RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN;
2. PANDANGAN UMUM FRAKSI ;
3. DO`A / PENUTUP

1. PEMBUKAAN

SEPERTI KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA SAUDARA BUPATI TELAH MENYAMPAIKAN PENJELASAN MENGENAI RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

SELANJUTNYA AGENDA PANDANGAN UMUM FRAKSI AKAN DILAKSANAKAN PADA HARI INI. MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 6 AYAT (3) PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB, BAHWA DALAM PEMBICARAAN TINGKAT I (SATU) PERLU MENDAPATKAN PEMANDANGAN UMUM DARI FRAKSI-FRAKSI TERHADAP PENJELASAN BUPATI TENTANG RAPERDA PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

2. PANDANGAN UMUM FRAKSI.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI BANGGAKAN

BAIKLAH KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KEDUA YAITU PANDANGAN UMUM FRAKSI KESEMPATAN **PERTAMA** KEPADA JURU BICARA DARI FRAKSI GERINDRA UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSINYA, KAMI PERSILAHKAN____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. H. TEDDY NANDUNG H, SE YANG
TELAH MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSINYA.

KEDUA : KEPADA JURU BICARA DARI FRAKSI GOLONGAN KARYA,
UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSINYA,
KAMI PERSILAHKAN.

TERIMAKASIH KEPADA SDR. H. ELAN SOFYAN, SM ATAS
PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSINYA.

KETIGA : KEPADA JURU BICARA DARI FRAKSI NASDEM, UNTUK
MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSINYA,
KAMI PERSILAHKAN.

TERIMAKASIH KEPADA SDR. DENISA WULANDARI ATAS
PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSINYA.

KEEMPAT :KEPADA FRAKSI PDI-P, UNTUK
MENYAMPAIKANPANDANGAN UMUM FRAKSINYA,
KAMI PERSILAHKAN_____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. LINA YULIANI ATAS PENYAMPAIAN
PANDANGAN UMUM FRAKSINYA.

KELIMA : KEPADA JURU BICARA DARI FRAKSI PKB UNTUK
MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSINYA,
DIPERSILAHKAN.

TERIMAKASIH KEPADA SDR. ZAENAL ARIFIN YANG TELAH
MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSINYA.

KEENAM : KEPADA FRAKSI PKS UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSINYA, KAMI PERSILAHKAN.

TERIMAKASIH KEPADA FRAKSI PKS ATAS PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSINYA.

KETUJUH : KEPADA FRAKSI DEPAN UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSINYA, DIPERSILAHKAN.

TERIMAKASIH KEPADA SDR. DULNASIR, S.H., M.H. YANG TELAH MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSINYA.

TERAKHIR : KEPADA FRAKSI PERHATIAN UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSINYA, DIPERSILAHKAN.

TERIMAKASIH KEPADA SDR. ATO RUKMANA YANG TELAH MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSINYA.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI

TELAH KITA SIMAK BERSAMA PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TA 2024 YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH MASING MASING JURU BICARANYA.

SELANJUTNYA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 6 AYAT (3) PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB, KAMI BERHARAP SAUDARI BUPATI AKAN DAPAT

MENYAMPAIKAN JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERSEBUT.

3. DO'A / PENUTUP

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI BANGGAKAN SAMPAILAH PADA ACARA YANG TERAKHIR YAITU DO'A/ PENUTUP.

AKHIRNYA KAMI ATAS NAMA PIMPINAN DEWAN, MENGUCAPKAN TERIMA KASIH YANG SETINGGI TINGGINYA KEPADA REKAN REKAN ANGGOTA DEWAN MAUPUN KEPADA SAUDARA BUPATI DAN SEMUA PIHAK YANG TELAH BERKENAN HADIR UNTUK MEMENUHI UNDANGAN KAMI.

MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA. DIAKHIRI UCAPAN

"ALHAMDULILLAHIROBBILALAMIN"

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI, JUMAT TANGGAL 13 JUNI 2025, KAMI NYATAKAN :

===== DI TUTUP =====

===== KETUK PALU 3 KALI =====

BILLAHITAUFIK WAL HIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

SEKRETARIS,



a Drs. H SUHANDI M.Si

KETUA,



SRI PUJI UTAMI

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT I PEMBAHASAN
RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2024
TANGGAL, 13 JUNI 2025

BISMILLAHIRROHMANIROHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULOHI WABAROKATUH

SAMPURASUN...

YTH. SDR. PIMPINAN RAPAT;

YTH. BUPATI PURWAKARTA & WAKIL BUPATI PURWAKARTA;

YTH. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN PARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. PARA UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. PARA PEJABAT PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. PARA ULAMA, PIMPINAN ORGANISASI SOSIAL MASYARAKAT, LSM, INSAN PERS, CAMAT,
LURAH DAN KEPALA DESA SERTA HADIRIN TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

SALAM INDONESIA RAYA,

SEBAGAI HAMBA YANG SENTIASA SELALU BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, MARILAH KITA SEJENAK MENUNDUKAN KEPALA SERAYA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT ATAS SEGALA RAHMAT HIDAYAH DAN *INAYAH*-NYA YANG TELAH DILIMPAHKAN KEPADA KITA, SEHINGGA PADA KESEMPATAN INI, KITA MASIH DIBERIKAN KESEHATAN UNTUK BERTEMU DAN BERKUMPUL KEMBALI DALAM KEADAAN SEHAT *WAL AFIYAT* GUNA BERSAMA-SAMA MENGIKUTI JALANNYA RAPAT PARIPURNA TINGKAT I DENGAN AGENDA PEMANDANGAN UMUM TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

SHOLAWAT DAN SALAM SELALU KAMI SAMPAIKAN KEPADA JUNJUNAN KITA NABI MUHAMMAD SAW, DAN SEMOGA KITA MENDAPATKAN *SYAFAAT*-NYA DI *YAUMIL AKHIR* NANTI. *AAMIIN*.

DALAM KESEMPATAN INI KAMI FRAKSI GERINDRA TURUT MENYAMPAIKAN RASA DUKA MENDALAM ATAS TERJADINYA MUSIBAH PERGERAKAN TANAH YANG TERJADI DI DESA PASIRMUNJUL KECAMATAN SUKATANI, SEMOGA PARA KORBAN DIBERIKAN KESABARAN DAN KETABAHAN ATAS UJIAN INI. *AAMIIN YRA*. DAN KAMI SAMPAIKAN APRESIASI SERTA UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA BUPATI PURWAKARTA DAN JAJARAN PEMERINTAH DAERAH YANG SUDAH *GASS POLL & GERCEP* DALAM PENANGANAN BENCANA TERSEBUT.

HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI

KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN RAPAT, ATAS KESEMPATAN YANG DIBERIKAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA MENGENAI RAPERDA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024;

TAK LUPA KAMI UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA BUPATI PURWAKARTA YANG TELAH MENYAMPAIKAN NOTA PENGANTAR ATAS USULAN RAPERDA YANG DIMAKSUD.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA YANG BERBAHAGIA

RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2024 YANG TELAH DISAMPAIKAN SAUDARA BUPATI, FRAKSI GERINDRA MEMANDANG TELAH BANYAK PENCAPAIAN HASIL KINERJA YANG MENDAPATKAN PENGAKUAN DARI MASYARAKAT DAN PENGAKUAN DARI PEMERINTAH PUSAT TERUTAMA DENGAN DICAPAINYA PENGHARGAAN **WTP 10 KALI** BERTURUT-TURUT DARI BPK-RI, UNTUK ITU KAMI FRAKSI GERINDRA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA MENGUCAPKAN SELAMAT BAIK SECARA KOLEKTIF MAUPUN YANG DICAPAI SECARA INDIVIDU ATAS KEBERHASILANNYA DAN MEMBERIKAN APRESIASI YANG TINGGI KEPADA SELURUH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. DENGAN HARAPAN SEMOGA DI TAHUN-TAHUN KEDEPAN KABUPATEN PURWAKARTA YANG KITA CINTAI INI, LEBIH MAJU SEBAGAIMANA HARAPAN WARGA MASYARAKAT KABUPATEN PURWAKARTA.

SELANJUTNYA KAMI FRAKSI GERINDRA MENCATAT KONDISI PEREKONOMIAN PURWAKARTA, YAITU: *PERTAMA*, EKONOMI MAKRO DARI SISI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) TAHUN 2024 TERCANTUM 4,64% MENGALAMI PERLAMBATAN DARI TAHUN 2023 SEBESAR 4,97%. *KEDUA*, TINGKAT INFLASI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 TERKOREKSI DRASTIS DARI 2,89% MENJADI 1,34% DI TAHUN TAHUN 2024 HAL INI MENUNJUKKAN PENURUNAN YANG SIGNIFIKAN DARI KESEPAKATAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO TAHUN 2024. *KETIGA*, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 MENCAPAI 73,99 POINT YANG TERUS MENGALAMI KENAIKAN DARI TAHUN 2023 YAITU 73,43 POINT. *KEEMPAT*, PRESENTASE ANGKA KEMISKINAN TAHUN 2024 ADALAH 8,41% MENGALAMI PENURUNAN DARI TAHUN 2023 SEBESAR 8,46%. *KELIMA*, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TAHUN 2024 TURUN MENJADI 7,34% DARI TAHUN 2023 SEBESAR 7,72%. DAN *KEENAM*, GINI RASIO TAHUN 2024 SEBESAR 0,398 MENGALAMI KENAIKAN DARI TAHUN 2023 SEBESAR 0,372.

FRAKSI GERINDRA MEMAKNAI BAHWA KEENAM INDIKATOR EKONOMI MAKRO TERSEBUT TERJADI ANOMALI, DISHARMONI ATAU TIDAK SINKRON, MOHON DIKOREKSI BILA PEMAHAMAN ATAU ASUMSI KAMI SALAH ATAU TIDAK TEPAT. TIGA INDIKATOR EKONOMI,

YAITU: LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE), INFLASI, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TIDAK MAMPU MENDEGRADASI TIGA INDIKATOR EKONOMI LAINNYA, YAITU KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN, SERTA RASIO GINI. SELANJUTNYA DARI INDIKATOR KEMISKINAN, JUMLAH PENDUDUK MISKIN SEBESAR **81,44 RIBU** ORANG DENGAN PERSENTASE **8,41%** DARI POPULASI PENDUDUK. PERSENTASE KEMISKINAN MENURUN JIKA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA YAITU **8,46%**.

RAPAT PARIPURNA DPRD SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

SELANJUTNYA KAMI FRAKSI PARTAI GERINDRA MENGAPRESIASI TERJADI SIGNIFIKANSI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBESAR **RP 2.548.811.674.513,00 (DUA TRILIUN LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN MILYAR DELAPAN RATUS SEBELAS JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS TIGA BELAS RUPIAH)** YANG BERARTI MENCAPAI **93,46% (SEMBILAN PULUH TIGA KOMA EMPAT PULUH ENAM PERSEN)** DARI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN SEBESAR **RP 2.727.171.220.537,00 (DUA TRILIUN TUJUH RATUS DUA PULUH TUJUH MILYAR SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH TUJUH RUPIAH).**

DARI HASIL ANALISA FRAKSI KAMI BERKENAAN DENGAN POS BELANJA APBD TAHUN 2024, REALISASI BELANJA BERKENAAN DENGAN POS BELANJA DAN TRANSFER APBD TAHUN 2024, REALISASI BELANJA DAN TRANSFER SEBESAR **RP 2.554.467.819.500,00 (DUA TRILIUN LIMA RATUS LIMA PULUH EMPAT MILYAR EMPAT RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS RIBU LIMA RATUS RUPIAH)** YANG BERARTI MENCAPAI **92,57% (SEMBILAN PULUH DUA KOMA LIMA PULUH TUJUH PERSEN)** DARI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN SEBESAR **RP 2.759.423.158.198,00 (DUA TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH SEMBILAN MILYAR EMPAT RATUS DUA PULUH TIGA JUTA SERATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH).**

KAMI HARAPKAN KEDEPANNYA PEMERINTAH DAERAH DAPAT MELAKSANAKAN DENGAN PENUH KECERMATAN DAN KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA *SPENDING BETTER* YAITU MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELUARAN ANGGARAN AGAR MENGHASILKAN *OUTPUT* YANG LEBIH BAIK DAN BERDAMPAK POSITIF BAGI MASYARAKAT DENGAN BIAYA YANG LEBIH RENDAH DI TENGAH KETERBATASAN KEUANGAN YANG DIHADAPI, SERTA AGENDA PENGUATAN EKONOMI, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PURWAKARTA.

KAMI FRAKSI GERINDRA MENYAMPAIKAN APRESIASI ATAS SEGALA CAPAIAN PEMERINTAH DAERAH, NAMUN KAMI JUGA KONSISTEN MEMBERIKAN KRITIK DAN SARAN KONSTRUKTIF YANG SEMATA-MATA UNTUK PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DIMASA YANG AKAN DATANG. FRAKSI GERINDRA BERTEKAD UNTUK TERUS BERJUANG DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENUJU PURWAKARTA ISTIMEWA.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG SAYA HORMATI

DEMIKIAN PANDANGAN FRAKSI GERINDRA, MOHON MAAF APABILA TERDAPAT HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN. ATAS SEGALA PERHATIANNYA DALAM MENGIKUTI SIDANG PARIPURNA INI KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH. SEMOGA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG MEMBIMBING KITA SEMUA KEPADA TUJUAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK MEWUJUDKAN NEGARA ADIL DAN MAKMUR "*PURWAKARTA ISTIMEWA, JAYA DIBUANA*".

***BILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.***

*MAKAN DI PANTAI DI TRAKTIR TEH NINA
SETELAH MAKAN NAIK DELMAN KUDA SUMBAWA
AYO WUJUDKAN PEMBANGUNAN PARIPURNA
BERSAMA GERINDRA PURWAKARTA ISTIMEWA*

*MAKAN MIE AYAM ENAKNYA PAKE SUMPIT
JANGAN LUPA TUANGKAN SAMBALNYA
MARI BERSINERGI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF
MAKA ISTIMEWA MASYARAKATNYA*

PURWAKARTA, 13 JUNI 2025

FRAKSI GERINDRA
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

SEKRETARIS

KETUA



SAID ALI AZMI

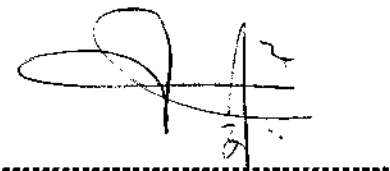


TEDDY NANDUNG HERYAWAN

ANGGOTA :

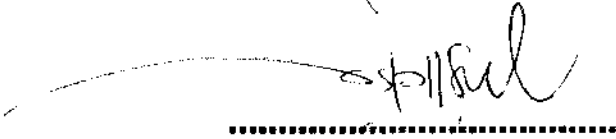


1. SRI PUJI UTAMI

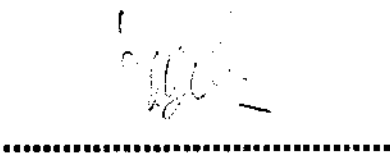


2. HJ. NINA HELTINA

3. RICKY SYAMSUL FAUZI



4. REGINA MULYA DWIYANTI



5. SULAEMAN



6. ZUSYEF GUSNAWAN



7. WAWAN SETIAWAN



8. DIANA LISU ARRANG BATO LIMBONG



**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT I
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024
JUMAT, 13 JUNI 2025**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

YTH. PIMPINAN DPRD DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA.

YTH. BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA.

YTH. BAPAK KAPOLRES KABUPATEN PURWAKARTA

YTH. KOMANDAN KODIM 0619, KOMANDAN RESIMEN ARMED STHIRA YUDHA,
KOMANDAN BATALYON ARMED - 9 PASOPATI PURWAKARTA

YTH. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DAN KETUA PENGADILAN NEGERI

YTH. KEPALA KEMENTRIAN AGAMA DAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

YTH. UNSUR PEJABAT PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

YTH. PARA PIMPINAN ORGANISASI SOSIAL, KETUA KPUD, KETUA BAWASLU, PARA KEPALA
DESA,
ORMAS, LSM, OKP, BEM SE-PURWAKARTA, INSAN PERS SERTA HADIRIN YANG KAMI
MULYAKAN.

PERTAMA-TAMA, MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT, KARENA
ATAS RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, KITA DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK HADIR DALAM
FORUM TERHORMAT INI—RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2024.

FRAKSI PARTAI GOLKAR MENGAPRESIASI PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MENYAMPAIKAN
DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN INI SECARA LENGKAP DAN SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KAMI JUGA MENGUCAPKAN SELAMAT DAN
APRESIASI KEMBALI DIRAIHNYA OPINI **WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)** DARI BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN (BPK). INI ADALAH PENCAPAIAN PENTING DALAM MENJAGA
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

HADIRIN YANG KAMI HORMATI

FRAKSI GOLKAR MEMANDANG REALISASI PENDAPATAN SEBESAR 93,46% MENANDAKAN TARGET TIDAK TERCAPI HAMPIR RP180 MILIAR. INI MENUNJUKKAN MASIH LEMAHNYA STRUKTUR FISKAL DAERAH, YANG SANGAT TERGANTUNG PADA TRANSFER PUSAT DAN BELUM DIDUKUNG OLEH OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG CAPAIANNYA HANYA 83, 90 %. PENGUATAN PAD SELAMA INI MASIH BERSIFAT KONVENSIONAL, BELUM INOVATIF, SERTA MINIM *POLITICAL WILL* UNTUK MEMBENAHİ SUMBER-SUMBER PAJAK DAN RETRIBUSI YANG BELUM OPTIMAL.

OLEH KARENANYA FRAKSI GOLKAR MEMBERIKAN CATATAN YAKNI:

KESATU

FRAKSI GOLKAR MENDORONG AGAR STRUKTUR BELANJA TAHUN BERJALAN 2025 DAN KEDEPANNYA LEBIH PROGRESIF.

KEDUA

FRAKSI GOLKAR MENDORONG ADANYA REWARD AND PUNISHMENT SYSTEM YANG TEGAS.

KETIGA

INSPEKTORAT DAERAH HARUS DIPERKUAT PERAN DAN KAPASITASNYA. MENGUSULKAN AGAR PENGAWASAN BERBASIS TEKNOLOGI DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT SIPIL DIPERLUAS, UNTUK MEMBENTUK SISTEM KONTROL SOSIAL YANG LEBIH KUAT.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA

DENGAN DEMIKIAN, FRAKSI PARTAI GOLKAR MENYATAKAN DAPAT MENERIMA DAN MENDUKUNG PEMBAHASAN LEBIH LANJUT ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2024, DENGAN SEJUMLAH CATATAN KOREKTIF UNTUK PERBAIKAN MENYELURUH KE DEPAN.

SELAMAT MENJALANKAN TUGAS, NGURUS LEMBUR NATA KOTA DENGAN JALAN MULUS, IMAH ALUS, RAKYAT KA URUS DAPAT SEGERA TERWUJUD.

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

SEKRETARIS



Dr. KARWITA, SH., M.H.

WAKIL KETUA

Hj. PUTRIARTI PUTIK H, S.E.

KETUA



Hj. ENAH ROHANAH

ANGGOTA:

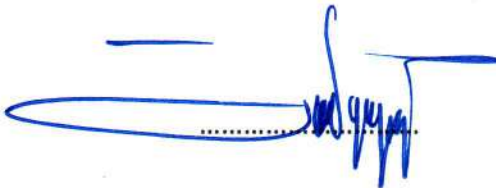
1. DIAS RUKMANA PRAJA, S.E.

.....

2. H. OJA SUTISNA



3. H. ELAN SOPYAN, S.M.



4. H. MESAKH SUPRIADI, SE. M.SI.



5. H. AHMAD SANUSI, S.M.



6. KAMAL, S.S

.....

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
DALAM RAPAT PARIPURNA PEMBICARAAN TK I
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

TANGGAL, 13 JUNI 2025

BISMILLAHIRROHMANIROHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULOHI WABAROKATUH

SAMPURASUN...

YTH. SDR. PIMPINAN RAPAT;

YTH. SDR. BUPATI PURWAKARTA;

YTH. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN PARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. PARA UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. PARA PEJABAT PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. PARA ULAMA, PIMPINAN ORGANISASI SOSIAL MASYARAKAT, LSM, INSAN PERS, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA SERTA HADIRIN TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

SALAM RESTORASI,

SEBAGAI HAMBA YANG SENTIASA SELALU BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, MARILAH KITA SEJENAK MENUNDUKAN KEPALA SERAYA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT ATAS SEGALA RAHMAT HIDAYAH DAN *INAYAH*-NYA YANG TELAH DILIMPAHKAN KEPADA KITA, SEHINGGA PADA KESEMPATAN INI, KITA MASIH DIBERIKAN KESEHATAN UNTUK BERTEMU DAN BERKUMPUL KEMBALI DALAM KEADAAN SEHAT *WAL AFIYAT* GUNA BERSAMA-SAMA MENGIKUTI JALANNYA RAPAT PARIPURNA TINGKAT I DENGAN AGENDA PEMANDANGAN UMUM TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024.

SHOLAWAT DAN SALAM KAMI SAMPAIKAN KEPADA JUNJUNAN KITA NABI MUHAMMAD SAW, DAN SEMOGA KITA MENDAPATKAN *SYAFAAT*-NYA DI *YAUMIL AKHIR* NANTI. *AAMIIN*.

HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI

KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN RAPAT, ATAS KESEMPATAN YANG DIBERIKAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM MENGENAI RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024.

TAK LUPA KAMI UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA BUPATI PURWAKARTA YANG TELAH MENYAMPAIKAN NOTA PENGANTAR ATAS USULAN RAPERDA YANG DIMAKSUD.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA YANG BERBAHAGIA

RAPERDA RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024.

TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 FRAKSI NASDEM MEMAHAMI BAHWA UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BUPATI BERKEWAJIBAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, DALAM HAL INI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

FRAKSI NASDEM JUGA MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA SELURUH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 MENDAPAT OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP), HARAPAN SEMOGA DI TAHUN-TAHUN MENDATANG KABUPATEN PURWAKARTA YANG KITA CINTAI INI, LEBIH MAJU SEBAGAIMANA HARAPAN WARGA MASYARAKAT KABUPATEN PURWAKARTA.

SETELAH KAMI MEMBACA, MEMPELAJARI, MENCERMATI DENGAN SEKSAMA PENJELASAN PEJABAT BUPATI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 KAMI SAMPAIKAN PERTANYAAN, PENDAPAT DAN SARAN SEBAGAI BERIKUT :

1. PENDAPATAN DAERAH

REALISASI PENDAPATAN DAERAH PADA TAHUN 2024 SEBESAR Rp. 2.548.811.674.513,00 (**DUA TRILIUN LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN MILYAR DELAPAN RATUS SEBELAS JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS TIGA BELAS RUPIAH**) YANG BERARTI MENCAPAI 93,46% (**SEMBILAN PULUH TIGA KOMA EMPAT**

PULUH ENAM PERSEN) DARI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN SEBESAR Rp. 2.727.171.220.537,00 (**DUA TRILIUN TUJUH RATUS DUA PULUH TUJUH MILYAR SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH TUJUH RUPIAH**). HAL INI BERARTI MASIH ADA POTENSI PENDAPATAN YANG PERLU DIUPAYAKAN SEBESAR 6,54% (**ENAM KOMA LIMA PULUH EMPAT PERSEN**) ATAU SEBESAR Rp. 178.359.546.024 (**SERATUS TUJUH PULUH DELAPAN MILYAR TIGA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU DUAPULUH EMPAT RUPIAH**). DARI SEKTOR PENDAPATAN INI KAMI FRAKSI NASDEM BERPANDANGAN BAHWA SISA POTENSI PENDAPATAN YANG ADA PERLU DIUPAYAKAN LAGI TERUTAMA DI SEKTOR PAJAK DAN RETRIBUSI. KAMI MENYARANKAN AGAR DILAKUKAN PENGKAJIAN DAN INTENSIFIKASI KEMBALI TERHADAP SISTEM PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, BAIK INTENSIFIKASI SASARAN PENDAPATAN DAERAH BAIK BERUPA PAJAK ATAU RETRIBUSI DAN LAINNYA, PENINGKATAN SISTEM MAUPUN KEMAMPUAN PELAKSANA PENGELOLAANNYA SERTA LEBIH MENINGKATKAN LAGI PELAKSANAAN SOSIALISASI TERHADAP MASYARAKAT. SEHINGGA DI TAHUN TAHUN MENDATANG POTENSI POTENSI PENDAPATAN TERSEBUT DAPAT DIMANFAATKAN SECARA MAKSIMAL.

2. REALISASI BELANJA DAERAH

REALISASI BELANJA DAN TRANSFER SEBESAR Rp2.554.467.819.500,00 (**DUA TRILIUN LIMA RATUS LIMA PULUH EMPAT MILYAR EMPAT RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS RIBU LIMA RATUS RUPIAH**) YANG BERARTI MENCAPAI 92,57% (**SEMBILAN PULUH DUA KOMA LIMA PULUH TUJUH PERSEN**) DARI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN SEBESAR Rp2.759.423.158.198,00 (**DUA TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH SEMBILAN MILYAR EMPAT RATUS DUA PULUH TIGA JUTA SERATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH**). HAL INI MENUNJUKAN PENCAPAIAN TERSEBUT BELUM MAKSIMAL, SEHINGGA DALAM PELAKSANAANNYA DIHARAPKAN ADANYA SISTEM YANG DAPAT MENILAI SECARA DINI YANG DAPAT MANAMPIKAN DAN MENGUKUR GAMBARAN REALISASI BELANJA DAERAH SECARA MENYELURUH SEHINGGA DAPAT MENGANTISIPASI EFEKTIFITAS BELANJA DAERAH SECARA KESELURUHAN.

3. PENGELOLAAN SILPA

SELANJUTNYA BERKENAAN DENGAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN ADALAH SEBESAR Rp26.595.792.674,00 (**DUA PULUH ENAM MILYAR LIMA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH**). HAL INI PERLU DI SIKAPI MELALUI EVALUASI, ANALISIS DAN PENILAIAN YANG SEKSAMA APAKAH TERJADI ADANYA PERSOALAN PEMANFAATAN YANG KURANG OPTIMAL ATAU KEMUNGKINAN ADANYA HAMBATAN HAMBATAN TERTENTU BAIK HAMBATAN ADMINISTRASI, PERIJINAN, PERENCANAAN ATAU HAL LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TERTUNDANYA PELAKSANAAN KEGIATAN. TENTUNYA HAL INI SANGAT PENTING DISIKAPI AGAR REALISASI KEGIATAN DAN SIKLUS ANGGARAN TAHUN BERIKUTNYA DAPAT BERJALAN LEBIH BAIK LAGI.

DEMIKIANLAH PEMANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM, MOHON MAAF APABILA TERDAPAT HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN. ATAS SEGALA PERHATIANNYA DALAM MENGIKUTI SIDANG PARIPURNA INI KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH. SEMOGA ALLAH SWT MELINDUNGI KITA SEMUA AGAR DAPAT MELAKSANAKAN AMANAH RAKYAT DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB. AAMIIN YRA.

***BILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.***

PURWAKARTA, 13 JUNI 2025

**FRAKSI NASDEM
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA



**H. ELTHON BRAMEISTA GUNAWAN,
S.H**

SEKRETARIS



ASTRI NOVITASARI, S.E

ANGGOTA :

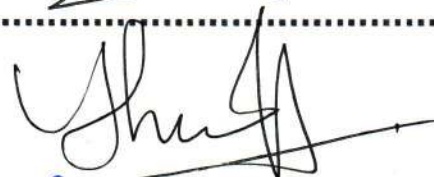
1. LUTHFI BAMALA, A.Md


.....

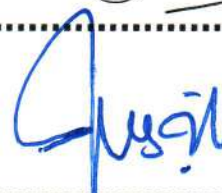
2. DEVI MUTIARA SARI, S.H


.....

3. DRA. HJ DENI YANTHI


.....

4. IIN SALAMIRAH


.....

5. DENISA WULANDARI, S.M


.....

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT I
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 KABUPATEN PURWAKARTA
RAPAT PARIPURNA TANGGAL 13 JUNI 2025**

BISMILLAHIRROHMANIROHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

MERDEKA !!!....

SAMPURASUN !!..

YTH. BUPATI PURWAKARTA;

YTH. WAKIL BUPATI PURWAKARTA;

YTH. PIMPINAN BESERTA SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. UNSUR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
YANG DIANTARANYA :

YTH. KEPALA KEPOLISIAN RESORT PURWAKARTA;

YTH. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA;

YTH. KOMANDAN BATALYON ARMED-9 PASOPATI;

YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA;

YTH. KOMANDAN SUBDENPOM PURWAKARTA;

YTH. SEKRETARIS DAERAH DAN PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA;

YTH. PARA KEPALA PEJABAT PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. PARA CAMAT DAN PARA KEPALA DESA

- PARA TOKOH MASYARAKAT, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, KETUA ORGANISASI DAN PARA INSAN PERS YANG BERBAHAGIA;

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KITA KE HADIRAT ALLAH SWT , KARENA ATAS RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, SEHINGGA PADA HARI INI KITA MASIH DIBERI KESEHATAN DAN MASIH DIBERI KESEMPATAN UNTUK BERKUMPUL BERSAMA PADA ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT I PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2024.

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA SELALU TERCURAH KEPADA NABI BESAR KITA MUHAMMAD SAW, JUGA KEPADA KELUARGANYA, PARA SAHABAT DAN KEPADA KITA SEKALIAN SEBAGAI UMATNYA SAMPAI AKHIR ZAMAN. AMIIINN YARABBAL ALAMIN.

HADIRIN RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

SEBELUM KAMI MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024, PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI, KAMI MENGUCAPKAN SYUKUR ALHAMDULILLAH SUDAH BANYAK KEBERHASILAN PEMBANGUNAN YANG TELAH DICAPAI PADA TAHUN ANGGARAN 2024. JUGA, FRAKSI PDI PERJUANGANPUN MENYAMPAIKAN APRESIASI ATAS PRESTASI PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BISA MEMPERTAHANKAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

NAMUN DEMIKIAN, PERMASALAHAN PEMBANGUNAN YANG KITA HADAPI PADA TAHUN 2025 DAN KEDEPANNYA, AKAN SEMAKIN PENUH TANTANGAN, SEJALAN DENGAN TUNTUTAN DAN DINAMIKA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. OLEH KARENANYA, FRAKSI PDI PERJUANGAN AKAN TERUS MEMBERIKAN MASUKAN, SARAN DAN KOREKSI UNTUK PERBAIKAN PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH TERCINTA PURWAKARTA.

HADIRIN RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024, FRAKSI PDI PERJUANGAN MENYAMPAIKAN PANDANGANNYA SEBAGAI BERIKUT :

1. MENGENAI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2024

FRAKSI PDI PERJUANGAN BERPANDANGAN BAHWA PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), POTENSINYA MASIH SANGAT BESAR UNTUK DITINGKATKAN APABILA DITUNJANG DENGAN TEKNOLOGI DAN SARANA PRASARANA, SERTA SUMBER DAYA MANUSIA YANG MEMADAI. SELAIN ITU, PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK, SERTA INTEGRASI DATA DAN KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MUTLAK DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH. CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2024 SEBESAR 83,90% HARUS MENJADI BAHAN EVALUASI KITA SEMUA UNTUK TERUS MELAKUKAN KEGIATAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI DI BIDANG PERPAJAKAN. PEMERINTAH DAERAH JUGA AGAR TERUS BERINOVASI MELAKUKAN DIVERSIFIKASI SUMBER PENDAPATAN UNTUK PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, TERUTAMA MENGOPTIMALKAN **DANACSR**.

SELANJUTNYA, FRAKSI PDI PERJUANGAN JUGA BERPANDANGAN BAHWA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI HARUS DITINGKATKAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN TRANSFER DARI PROVINSI, KARENA REALISASI TAHUN 2024 MENURUN BILA DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI TAHUN 2023. KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI JUGA SANGAT PENTING AGAR PURWAKARTA MENDAPATKAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN YANG OPTIMAL, TERUTAMA BANTUAN PROVINSI DI BIDANG INFRASTRUKTUR UNTUK JALAN DAN JEMBATAN, SERTA PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI, SEBAGAIMANA YANG TELAH DICITA-CITAKAN OLEH BUPATI KITA, YAITU JALAN MULUS IMAH ALUS. DAN JUGA PROGRAM BUPATI TENTANG LEMBUR DIURUS KOTA DITATA HARUS MENJADI PRIORITAS PEMBANGUNAN AGAR KABUPATEN PURWAKARTA MENJADI LEBIH ISTIMEWA.

2. MENGENAI REALISASI BELANJA TAHUN 2024

FRAKSI PDI PERJUANGAN MELIHAT, BAHWA REALISASI BELANJA TRANSFER KEPADA PEMERINTAH DESA, TERUTAMA BELANJA BAGI HASIL SANGATLAH RENDAH YAITU 70,36%. DARI ANGGARAN SEBESAR RP. 35,8 MILYAR DELAPAN RUPIAH HANYA TEREALISASI 25,2 MILYAR RUPIAH. MOHON PENJELASANNYA KENAPA PELAKSANAAN BELANJA TRANSFER KEPADA DESA TAHUN 2024 TIDAK OPTIMAL.

3. MENGENAI NERACA

NERACA PER 31 DESEMBER 2024 MENYAJIKAN, BAHWA PIUTANG PAJAK BERSIH SANGATLAH BESAR MENCAPAI 50,9 MILYAR RUPIAH. FRAKSI PDI PERJUANGAN BERPANDANGAN, PEMERINTAH DAERAH HARUS BERUSAHA UNTUK MENARIK PIUTANG INI AGAR MASUK KE KAS DAERAH. SELAIN PIUTANG PAJAK, TERCATAT JUGA SOAL UTANG BELANJA TRANSFER BAGI HASIL KEPADA DESA SEBESAR 19,7 MILYAR RUPIAH, INI JUGA MOHON KIRANYA AGAR MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK DISELESAIKAN.

HADIRIN RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

DEMIKIANLAH PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, KAMI BERHARAP PEMBAHASAN YANG LEBIH RINCI BISA DILAKSANAKAN OLEH BADAN ANGGARAN DPRD BERSAMA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN LANCAR SESUAI JADWAL, AGAR APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 BISA SEGERA DISAHKAN, AGAR PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAPAT DIWUJUDKAN, TERUTAMA DI BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN.

TERIMAKASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKHILAFAN.

WALLAHUL MUWAAFIQ ILA AQWAAMIT THORIQ

WASSALAMUALAIKUM WR.WB

SAMPURASUN !!!...

MERDEKA !!!...

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

SEKRETARIS

NOVITA PURWANTI

KETUA

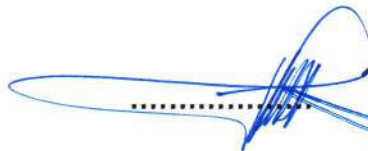
LINA YULIANI

ANGGOTA :

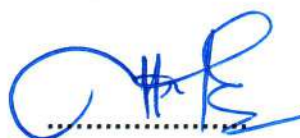
1. H. ENTIS SUTISNA, SH., MH., MM.
2. WARSENO, SE.
3. HJ. INA HERLINA
4. UJANG ROSADI



.....



.....



.....



.....



PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Tentang

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

dalam

RAPAT PARIPURNA TINGKAT I DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

pada tanggal 13 Juni 2025



**PANDANGAN UMUM FRAKSI PKS
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT I
PEMBAHASAN RAPERDA USULAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

SALAM ADIL DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.

YANG TERHORMAT, PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA.

YANG KAMI HORMATI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA.

YANG KAMI HORMATI, PARA KETUA FRAKSI, PARA KETUA KOMISI DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA.

YANG KAMI HORMATI, UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

YANG KAMI HORMATI, PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

YANG KAMI HORMATI, REKAN-REKAN WARTAWAN SERTA SEGENAP UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

ALHAMDULILLAH WA SYUKRULILLAH BI NI'MATILLAH, PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT TUHAN SEMESTA ALAM, ATAS SEGALA NIKMAT YANG TELAH DIANUGERAHKAN KEPADA KITA, SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT.

SHALAWAT DAN SALAM SEMOGA TERLIMPAH CURAHKAN KEPADA SURI TAULADAN KITA BAGINDA NABI MUHAMMAD SAW, BESERTA KELUARGA, SAHABAT DAN PENGIKUTNYA YANG ISTIQOMAH HINGGA AKHIR ZAMAN.

SELANJUTNYA KAMI SAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN RAPAT YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA FRAKSI PKS UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024.

MENGAWALI PANDANGAN UMUM FRAKSI, IZINKAN KAMI UNTUK MENGUCAPKAN SELAMAT DAN APRESIASI YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA ATAS KEMBALI DIRAIHNYA OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP) DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI, DAN HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

SETELAH MENDENGARKAN DAN MENYIMAK NOTA PENGANTAR RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2024 MAKA FRAKSI PKS MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM SEBAGAI BERIKUT:

FRAKSI PKS MEMAHAMI BAHWA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2024 MERUPAKAN KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL KEPALA DAERAH, SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM:

- 1. PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA, DAN**
- 2. PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.**

KEDUA KETENTUAN TERSEBUT MENEGASKAN BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KEPALA DAERAH, DALAM HAL INI BUPATI PURWAKARTA, BERKEWAJIBAN MENYAMPAIKAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KEPADA DPRD.

FRAKSI PKS MEMANDANG BAHWA PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 BUKAN HANYA SEBAGAI BENTUK KEPATUHAN TERHADAP REGULASI, TETAPI JUGA SEBAGAI MOMEN STRATEGIS UNTUK MENGEVALUASI SEJAUH MANA PELAKSANAAN APBD TELAH MEMBERIKAN DAMPAK NYATA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DAERAH.

PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI, DAN HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

FRAKSI PKS MENILAI BAHWA LAPORAN INI MENGGAMBARAKAN KESERJUSAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DALAM MENJALANKAN PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS SEBAGAIMANA AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KHUSUSNYA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BERDASARKAN DATA YANG DISAMPAIKAN, FRAKSI PKS MENCERMATI BAHWA:

- REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024 MENCAPAI 2,548 TRILIUN RUPIAH, ATAU 93,46% DARI TARGET SEBESAR 2,727 TRILIUN RUPIAH.
- REALISASI BELANJA DAN TRANSFER DAERAH TERCATAT SEBESAR 2,554 RUPIAH TRILIUN, ATAU 92,57% DARI ANGGARAN SEBESAR 2,759 RUPIAH TRILIUN.
- REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH MENCAPAI 100%, YAITU SEBESAR 32,25 MILIAR RUPIAH.
- DENGAN DEMIKIAN, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TERCATAT SEBESAR 26,59 MILIAR RUPIAH.

FRAKSI PKS MENYAMPAIKAN APRESIASI YANG TINGGI TERHADAP CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG MELAMPAUI 90%, YANG MENCERMINKAN KAPASITAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD YANG CUKUP BAIK. HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA SECARA UMUM, PEMERINTAH DAERAH MAMPU MENJAGA KONSISTENSI ANTARA TARGET DAN PELAKSANAAN ANGGARAN SECARA REALISTIS.

KAMI JUGA MENGAPRESIASI PENCAPAIAN REALISASI PEMBIAYAAN SEBESAR 100%, YANG TURUT MEMPERKUAT STRUKTUR FISKAL DAERAH DALAM RANGKA Mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

NAMUN DEMIKIAN, FRAKSI PKS MENILAI BAHWA TINGGINYA SERAPAN ANGGARAN HARUS BERBANDING LURUS DENGAN KUALITAS *OUTPUT* DAN *OUTCOME* PROGRAM, TERUTAMA DALAM SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN, KETAHANAN PANGAN, PENGENTASAN KEMISKINAN, DAN PELAYANAN DASAR MASYARAKAT.

SELAIN ITU, KEBERADAAN SILPA SEBESAR 26,59 MILIAR RUPIAH JUGA PERLU DIANALISIS SECARA MENYELURUH: APAKAH BERASAL DARI EFISIENSI ATAU KARENA PROGRAM-PROGRAM YANG TIDAK BERJALAN MAKSIMAL. FRAKSI PKS MENDORONG AGAR SILPA INI DIGUNAKAN SECARA BIJAK PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA DAN DAPAT Mendukung keberlanjutan program prioritas daerah.

PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI, DAN HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

DARI URAIAN TERSEBUT DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRROHMANIRROHIM BAHWA FRAKSI PKS MENERIMA DAN MENYETUJUI RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK SELANJUTNYA DIBAHAS DAN DI KAJI LEBIH DALAM LAGI OLEH BADAN ANGGARAN DPRD DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA .

DEMIKIAN Pemandangan umum Fraksi PKS. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

PURWAKARTA, 13 JUNI 2025
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

Ir. H. MOH. ARIEF KURNIAWAN, M.M.
(KETUA FRAKSI)

DIDIN HENDRAWAN, S.E.
(SEKRETARIS FRAKSI)

DEDI JUHARI
(WAKIL KETUA FRAKSI)

H. ASEP NURYANI, S.Pd.I.
(ANGGOTA FRAKSI)

H. DEDI SUTARDI
(ANGGOTA FRAKSI)



Peduli Ummat Melayani Rakyat

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

- YTH, SAUDARA BUPATI PURWAKARTA
- YTH, SAUDARI KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN PARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
- YTH, SEKRETARIS DAERAH DAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
- YTH, BAPAK DANDIM 0619 PURWAKARTA ATAU YANG MEWAKILI, BAPAK KAPOLRES ATAU YANG MEWAKILI, KEPALA PENGADILAN NEGERI, KEPALA PENGADILAN AGAMA, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA, DANMEN ARMED 2 STHIRA YUDHA, DANYON ARMED 9 PASOPATI, SERTA DANSUB DENPOM PURWAKARTA.
- YTH, KETUA MUI, KEPALA KEMENTERIAN AGAMA, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN ORGANISASI MASYARAKAT, INSAN PERS, MEDIA, PIMPINAN LSM, BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA, AKTIFIS SOSIAL, AKTIFIS LINGKUNGAN, DAN LAIN-LAIN
- YTH, CAMAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN KEPALA DESA SE-KABUPATEN PURWAKARTA YANG SENANTIASA KAMI BANGGAKAN
- YTH, PARA TAMU UNDANGAN DAN HADIRIN YANG KAMI CINTAI

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SEGALA PUJI BAGI ALLAH SWT ATAS SEGALA RAHMAT DAN NIKMAT YANG DICURAHKAN PADA KITA SEKALIAN, SEHINGGA KITA DAPAT BERTEMU KEMBALI DIKESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI DALAM RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

SEMOGA ACARA INI BERJALAN DENGAN LANCAR SERTA PENUH BAROKAH, AMIN YAA ROBBAL ALAMIIN. SHOLAWAT DAN SALAM SEMOGA TETAP TERCURAH KEPADA NABI DAN RASUL YANG PALING MULIA, NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI PENUTUP PARA NABI, SERTA KEPADA KELUARGA, PARA SAHABAT-SAHABATNYA JUGA KITA SELAKU UMATNYA, SEMOGA KITA DAPAT SYAFA'AT DI YAUMUL JAZA . AMIIN YA ROBAL ALAMIN.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA

MENGAWALI PANDANGAN INI, FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) MENYAMPAIKAN **SELAMAT HARI RAYA IDULADHA 1446 HIJRIAH**, SERAYA MENDOAKAN AGAR NILAI-NILAI PENGORBANAN, KEIKHLASAN, DAN KEBERSAMAAN YANG MENJADI MAKNA UTAMA IDULADHA DAPAT MENYERTAI KITA SEMUA DALAM MEMBANGUN KABUPATEN PURWAKARTA YANG LEBIH ADIL, BERMARTABAT, DAN SEJAHTERA.

SELANJUTNYA, KAMI MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM TERHADAP **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024**, SEBAGAI BENTUK PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DAN EVALUASI TERHADAP PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH. PANDANGAN INI KAMI SUSUN DENGAN MENEKANKAN PADA SEJUMLAH ASPEK TERUTAMA: **PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH**, SERTA **KEPATUHAN TERHADAP PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN YANG BAIK DAN TERTIB**.

KAMI JUGA MENCATAT BAHWA PEMERINTAH DAERAH KEMBALI MERAH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. FRAKSI PKB TENTU MENGHARGAI CAPAIAN TERSEBUT SEBAGAI BENTUK PENCAPAIAN ADMINISTRATIF. NAMUN DEMIKIAN, KAMI MENEKANKAN BAHWA OPINI WTP BUKANLAH JAMINAN ATAS SEMPURNANYA PENGELOLAAN KEUANGAN, MELAINKAN HANYA MENCERMINKAN KESESUAIAN PENYAJIAN

LAPORAN KEUANGAN DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH. OLEH SEBAB ITU, BERBAGAI CATATAN DAN TEMUAN DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TETAP HARUS DITINDAKLANJUTI SECARA SERIUS, KARENA MENCERMINKAN KELEMAHAN SUBSTANSIAL YANG TIDAK BOLEH DIABAIKAN.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SETELAH MEMPELAJARI SUBSTANSI RAPERDA INI DAN BERBAGAI PERSOALAN YANG ADA, FRAKSI PKB MEMBERIKAN PANDANGAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PERENCANAAN PENDAPATAN PERLU REALISTIS DAN BERBASIS DATA

FRAKSI PKB MENCERMATI BAHWA PERENCANAAN PENDAPATAN, KHUSUSNYA PAD, BELUM SEPENUHNYA REALISTIS. KESENJANGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI MENUNJUKKAN BAHWA PENYUSUNAN TARGET MASIH JAUH DARI PRINSIP KEHATI-HATIAN FISKAL. PENYUSUNAN TARGET SEMESTINYA MENGACU PADA TREN 3-5 TAHUN TERAKHIR, ANALISIS POTENSI RIIL, RASIO EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN, SERTA MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR EKSTERNAL SEPERTI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERUBAHAN REGULASI. FRAKSI PKB MENEGASKAN BAHWA PENYUSUNAN TARGET PENDAPATAN KE DEPAN HARUS BERBASIS DATA, RASIONAL, DAN INKLUSIF.

2. PELAKSANAAN BELANJA BELUM BERBASIS PRIORITAS DAN DAMPAK

FRAKSI PKB MENILAI PELAKSANAAN BELANJA BELUM SEPENUHNYA MENCERMINKAN DISIPLIN FISKAL DAN ORIENTASI PADA HASIL. KETIDAKSESUAIAN ANTARA PERENCANAAN DAN REALISASI, SERTA ALOKASI YANG BELUM SEPENUHNYA BERDASARKAN OUTPUT DAN OUTCOME, MENUNJUKKAN LEMAHNYA EFEKTIVITAS PENGANGGARAN. KE DEPAN, SETIAP BELANJA HARUS DIKAITKAN SECARA LANGSUNG DENGAN PENCAPAIAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN MANFAAT NYATA BAGI MASYARAKAT.

3. PEMBIAYAAN HARUS MENCERMINKAN STRATEGI PEMBANGUNAN

SILPA YANG BESAR DALAM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN MENUNJUKKAN ADANYA PERENCANAAN YANG TIDAK OPTIMAL. FRAKSI PKB MENILAI BAHWA SILPA TIDAK BOLEH HANYA DIJADIKAN PENYEIMBANG ADMINISTRATIF, NAMUN HARUS DIMANFAATKAN SECARA STRATEGIS UNTUK MEMPERKUAT KAPASITAS FISKAL DAN MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN. PEMBIAYAAN HARUS DIRANCANG UNTUK MEMPERBAIKI LAYANAN PUBLIK, BUKAN UNTUK MENUTUP KEGAGALAN DALAM REALISASI BELANJA.

4. KEPATUHAN TERHADAP PERUNTUKAN DANA TRANSFER HARUS DIPERKETAT

FRAKSI PKB MENCATAT PENGGUNAAN DANA TRANSFER PUSAT YANG TIDAK SESUAI PERUNTUKAN, SEPERTI DAU SPESIFIK GRANT DAN DBH. HAL INI BERPOTENSI MENURUNKAN KEPERCAYAAN PUBLIK DAN PUSAT TERHADAP TATA KELOLA FISKAL DAERAH. KAMI MENDORONG PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PENINGKATAN KAPASITAS MANAJERIAL OPD DALAM MENGELOLA DANA SESUAI KETENTUAN.

5. OPTIMALISASI PAD BUTUH INOVASI DAN PENGAWASAN

SEKTOR PAJAK DAERAH MASIH MEMILIKI POTENSI YANG BELUM TERGARAP MAKSIMAL. MINIMNYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI PENGAWASAN SEPERTI TAPPING BOX SERTA LEMAHNYA KEPATUHAN WAJIB PAJAK MENJADI KENDALA UTAMA. FRAKSI PKB MENDORONG INOVASI SISTEM PEMUNGUTAN, PENGUATAN REGULASI, DAN SINERGI LINTAS PERANGKAT DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAD SECARA BERKELANJUTAN.

6. REKOMENDASI BPK HARUS DITINDAKLANJUTI SECARA SERIUS

FRAKSI PKB MENILAI BAHWA TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI BPK BELUM BERJALAN OPTIMAL. HAL INI MENGINDIKASIKAN LEMAHNYA KOMITMEN TERHADAP PERBAIKAN SISTEMIK. FRAKSI PKB MENGAJAK PEMKAB UNTUK MENJADIKAN REKOMENDASI BPK SEBAGAI BAHAN KERJA PRIORITAS, BUKAN SEKADAR FORMALITAS TAHUNAN.

7. PEMANFAATAN APBD BELUM MENGURANGI KETIMPANGAN SECARA SIGNIFIKAN

DATA KEMISKINAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 MEMANG MENUNJUKKAN ADANYA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN SECARA MAKRO, YAITU DARI **8,70%** PADA TAHUN 2022 MENJADI **8,41%** PADA TAHUN 2024. NAMUN, PENURUNAN INI TIDAK DIBARENGI DENGAN PERBAIKAN KUALITAS HIDUP PENDUDUK MISKIN SECARA MENYELURUIH.

HAL INI TERLIHAT DARI DUA INDIKATOR PENTING: **PERTAMA, INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN BERADA PADA ANGKA 1,37**, YANG BERARTI RATA-RATA PENDAPATAN PENDUDUK MISKIN SEMAKIN JAUH DARI GARIS KEMISKINAN. **KEDUA, INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN MENCAPAI 0,35**, YANG MENUNJUKKAN BAHWA KESENJANGAN ANTARPENDUDUK MISKIN SENDIRI SEMAKIN BESAR.

SELAIN ITU, **ANGKA GINI RATIO SEBESAR 0,398** MENANDAKAN BAHWA KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KABUPATEN PURWAKARTA MASIH TERGOLONG TINGGI DAN MENDEKATI KATEGORI RAWAN. BERDASARKAN DATA TERSEBUT, FRAKSI PKB MENYIMPULKAN BAHWA PEMANFAATAN ANGGARAN PEMBANGUNAN BELUM CUKUP MENJANGKAU KELOMPOK TERMISKIN DAN RENTAN SECARA EFEKTIF. PROGRAM-PROGRAM YANG DIJALANKAN SELAMA INI CENDERUNG TIDAK MENYENTUH AKAR PERSOALAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN SECARA LANGSUNG. OLEH KARENA ITU KAMI MENDORONG:

- EVALUASI MENYELURUH ATAS EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN;
- PENINGKATAN KETEPATAN SASARAN BANTUAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI;
- INTEGRASI KEBIJAKAN FISKAL DENGAN STRATEGI PENGURANGAN KETIMPANGAN.

KESIMPULAN

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, FRAKSI PKB MENYAMPAIKAN:

1. MENERIMA RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2024 UNTUK DIBAHAS LEBIH LANJUT;
2. MEMBERIKAN CATATAN STRATEGIS AGAR PEMKAB LEBIH AKURAT DALAM MERUMUSKAN TARGET PENDAPATAN, DISIPLIN DALAM BELANJA, DAN CERMAT DALAM STRATEGI PEMBIAYAAN;
3. MENDORONG PERBAIKAN SISTEM EVALUASI DAN PENGAWASAN ANGGARAN GUNA MEWUJUDKAN APBD YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN BERKEADILAN.

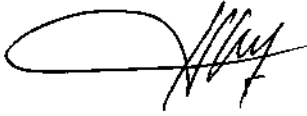
DEMIKIAN PANDANGAN UMUM INI KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BAGIAN DARI TANGGUNG JAWAB FRAKSI PKB DALAM MENDORONG TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG LEBIH BAIK. SEMOGA MOMENTUM PERTANGGUNGJAWABAN INI DAPAT MENJADI TITIK AWAL UNTUK MEMPERBAIKI POLA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH EFEKTIF DAN BERORIENTASI PADA KEMASLAHATAN UMAT.

WALLAHUL MUWAFFIQ ILA AQWAMIT THARIEQ

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

PURWAKARTA, 13 JUNI 2025
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA



CECENG ABDUL QODIR, S.Pd.I

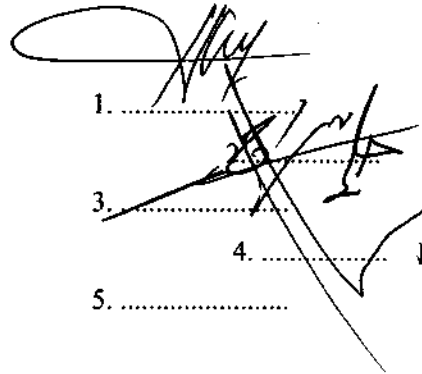
SEKRETARIS



HILMI SIROJUL FUADI

FRAKSI PKB:

1. CECENG ABDUL QODIR, S.Pd.
2. HILMI SIROJUL FUADI
3. I H. ALAIKASSALAM, SH.I
4. ZAENAL ARIFIN
5. AGUS MAHARDIKA



1.

2.

3.

4.

5.

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PERHATIAN (PERSATUAN HATI NURANI)
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TK I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD (P2APBD)
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

1. Yth. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA;
2. Yth. BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA;
3. Yth. UNSUR PIMPINAN DAERAH, KEPALA KEPOLISIAN RESOR PURWAKARTA ATAU YANG MEWAKILI, KOMANDAN KODIM 0619 PURWAKARTA ATAU YANG MEWAKILI
4. Yth. DAN MEN ARMED STHIRA YUDHA; ATAU YANG MEWAKILI
5. Yth. DAN YON ARMED 09 PASOPATI; ATAU YANG MEWAKILI
6. Yth. DAN SUBDENPOM III/3-4 PURWAKARTA, ATAU YANG MEWAKILI
7. Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA; ATAU YANG MEWAKILI
8. Yth. KETUA KPUD ATAU YANG MEWAKILI;
9. Yth. SEKRETARIS DAERAH DAN PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;
10. Yth. ALIM ULAMA, PARA KEPALA DESA, PARA PENGURUS PARPOL/ORMAS/LSM, PERS DAN TOKOH MASYARAKAT SE-KABUPATEN PURWAKARTA

HADIRIN DAN TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

SALAM SEJAHTERA KAMI SAMPAIKAN, TERIRING DO'A SEMOGA BAPAK/IBU SENANTIASA DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT, SELALU DALAM LINDUNGAN MAGHFIROH ALLAH SWT.

KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, BAHWA ATAS RAHMAT DAN KARUNIANYA, *ALHAMDULILLAH* PADA HARI INI KITA DAPAT HADIR BERSAMA-SAMA

DALAM RAPAT PARIPURNA INI, KAMI DARI FRAKSI PERHATIAN MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA SEMOGA IBADAH KURBAN KITA DITERIMA ALLAH SWT DAN BERKAH.

DAN JUGA SELAMAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA MENDAPATKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) TAHUN ANGGARAN 2024 SEMOGA AKAN MEMBAWA KABUPATEN PURWAKARTA ISTIMEWA INI MENJADI LEBIH ISTIMEWA LAGI.

SHALAWAT DAN SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAH LIMPAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW, KEPADA KELUARGANYA, KEPADA PARA SAHABATNYA DAN KITA SEMUA SELAKU UMATNYA HINGGA AKHIR ZAMAN. *AMIIIN*.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

MENGAWALI PANDANGAN UMUM, KAMI FRAKSI PERHATIAN SANGAT MENGAPRESIASI POSITIF TERHADAP KINERJA SELURUH ANGGOTA DPRD, SEMOGA INI MENJADIKAN HASIL YANG SANGAT BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT PURWAKARTA.

DEMIKIAN JUGA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA FRAKSI PERHATIAN UNTUK MEMBERIKAN PANDANGAN PADA PARIPURNA TINGKAT I ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD (P2APBD) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

HADIRIN DAN TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

KAMI FRAKSI PERHATIAN BERPANDANGAN BAHWA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 REALISASI PENDAPATAN DAERAH PADA TAHUN 2024 SEBESAR Rp2.548.811.674.513,00 (***DUA TRILIUN LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN MILYAR DELAPAN RATUS SEBELAS JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS TIGA BELAS RUPIAH***) YANG BERARTI MENCAPAI 93,46% (***SEMBILAN PULUH TIGA KOMA EMPAT PULUH ENAM PERSEN***) DARI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN SEBESAR Rp2.727.171.220.537,00 (***DUA TRILIUN TUJUH RATUS DUA PULUH TUJUH MILYAR SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH TUJUH RUPIAH***).

BERKENAAN DENGAN POS BELANJA DAN TRANSFER APBD TAHUN 2024, REALISASI BELANJA DAN TRANSFER SEBESAR Rp2.554.467.819.500,00 (***DUA TRILIUN LIMA RATUS LIMA PULUH EMPAT MILYAR EMPAT RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS RIBU LIMA RATUS***

RUPIAH) YANG BERARTI MENCAPAI 92,57% (SEMBILAN PULUH DUA KOMA LIMA PULUH TUJUH PERSEN) DARI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN SEBESAR Rp2.759.423.158.198,00 (DUA TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH SEMBILAN MILYAR EMPAT RATUS DUA PULUH TIGA JUTA SERATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH).

DARI ANGKA-ANGKA TERSEBUT DIATAS, FRAKSI PERHATIAN MENDORONG KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK LEBUH EFISIEN PADA PENGGUNAAN POS PEMBIAYAAN DAERAH. KARENA PENGGUNAAN DANA APBD MERUPAKAN BAGIAN PENTING BAGI KEBERLANJUTAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI.

DAN PEMERINTAH DAERAH JUGA AGAR MENGGUNAKAN DANA APBD LEBIH SELEKTIF, TEPAT SASARAN , MENYENTUH DAN MEMBERIKAN EFEK BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG LEBIH MERATA TANPA MENGABAIKAN BELANJA KEBUTUHAN LAINNYA YANG DI NILAI PENTING.

PADA PENERAPAN RAPERDA INI, SEKIRANYA DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN DALAM TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN. KAMI BERHARAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAPAT BERJALAN SESUAI DENGAN SEMESTINYA.

**RAPAT SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,
HADIRIN YANG BERBAHAGIA,**

DEMIKIANLAH PANDANGAN FRAKSI PERHATIAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA ATAS RANCANGAN PERDA PADA SIDANG PARIPURNA DI KESEMPATAN INI.

.*Billahittaufiq walhidayah*

Wassalamu'alaikum Wr. W

PURWAKARTA, 13 JUNI 2025
FRAKSI PERSATUAN HATI NURANI (PERHATIAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA,



H . ASEP ABDULOH

SEKERTARIS,



YANTHI NURHAYATI,S.Pd

ANGGOTA

1. ATO RUKMANA

2. MUHSIN JUNAEDI



1.

2.

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI DEPAN (DEMOKRAT PAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA JAWA BARAT



Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA

Tentang :

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD (P2APBD) KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam Rapat Paripurna
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
Purwakarta, 13 JUNI 2025

BISMILLAHIRROHMANIROHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

SAMPURASUN

1. Yth. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA;
2. Yth. BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA;
3. Yth. UNSUR PIMPINAN DAERAH, KEPALA KEPOLISIAN RESOR PURWAKARTA ATAU YANG MEWAKILI, KOMANDAN KODIM 0619 PURWAKARTA ATAU YANG MEWAKILI
4. Yth. DAN MEN ARMED STHIRA YUDHA; ATAU YANG MEWAKILI
5. Yth. DAN YON ARMED 09 PASOPATI; ATAU YANG MEWAKILI
6. Yth. DAN SUBDENPOM III/3-4 PURWAKARTA, ATAU YANG MEWAKILI
7. Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA; ATAU YANG MEWAKILI
8. Yth. KETUA KPUD ATAU YANG MEWAKILI;
9. Yth. SEKRETARIS DAERAH DAN PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;
10. Yth. ALIM ULAMA, PARA KEPALA DESA, PARA PENGURUS PARPOL/ORMAS/LSM, PERS DAN TOKOH MASYARAKAT SE-KABUPATEN PURWAKARTA

TERLEBIH DAHULU MARILAH KITA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT, ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, SEHINGGA PADA HARI INI KITA MASIH DIBERI KESEHATAN UNTUK DAPAT BERKUMPUL DAN BERSILATURRAHIM DALAM ACARA RAPAT PARIPURNA PEMBICARAAN TINGKAT I PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 .

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA DILIMPAHKAN KEPADA NABI BESAR MUHAMMAD SAW, JUGA KEPADA KELUARGANYA, PARA SAHABAT

DAN KEPADA KITA SEKALIAN SEBAGAI UMMATNYA SAMPAI AKHIR JAMAN.
AAMIIN.

PARA HADIRIN YANG TERHORMAT DAN BERBAHAGIA

FRAKSI DEPAN MENGAPRESIASI PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA ATAS PENYUSUNAN RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024, YANG SECARA UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DAN MENDAPAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BPK.

NAMUN DEMIKIAN, FRAKSI DEPAN MEMANDANG PENTING UNTUK MEMBERIKAN SEJUMLAH CATATAN STRATEGIS DAN TEKNIS, GUNA PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KE DEPAN.

:

1. OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

REALISASI PENDAPATAN SEBESAR RP2.548.811.674.513,00 (**DUA TRILIUN LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN MILYAR DELAPAN RATUS SEBELAS JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS TIGA BELAS RUPIAH**) 93,46% (**SEMBILAN PULUH TIGA KOMA EMPAT PULUH ENAM PERSEN**) DARI TARGET RP2.727.171.220.537,00 (**DUA TRILIUN TUJUH RATUS DUA PULUH TUJUH MILYAR SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH TUJUH RUPIAH**) MENUNJUKKAN ADANYA DEVIASI SEKITAR 6,5% (**ENAM KOMA LIMA PERSEN**). FRAKSI DEPAN MEREKOMENDASIKAN AGAR DILAKUKAN EVALUASI SUMBER-SUMBER PAD SERTA PENINGKATAN KAPABILITAS PERANGKAT PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI, AGAR DAPAT MENUTUP GAP TERSEBUT DI TAHUN-TAHUN MENDATANG.

2. BELANJA DAERAH DAN OUTCOME PROGRAM

REALISASI BELANJA YANG MENCAPAI 92,57% (**SEMBILAN PULUH DUA KOMA LIMA PULUH TUJUH PERSEN**) DARI TARGET MENUNJUKKAN CAPAIAN YANG BAIK, NAMUN PERLU DIIRINGI DENGAN PENGUKURAN INDIKATOR OUTPUT DAN OUTCOME. FRAKSI DEPAN BERHARAP ADANYA PENYAJIAN DATA BERBASIS KINERJA **PERFORMANCE-BASED BUDGETING** AGAR DAPAT MENILAI EFEKTIVITAS BELANJA SECARA MENYELURUH.

3. PENGELOLAAN SILPA

SILPA SEBESAR RP26.595.792.674,00 (**DUA PULUH ENAM MILYAR LIMA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH**). HENDAKNYA DITINDAKLANJUTI DENGAN ANALISIS KUANTITATIF TERHADAP PENYEBAB **UNDERUTILIZATION**, BAIK KARENA HAMBATAN ADMINISTRATIF, PERENCANAAN YANG KURANG PRESISI, ATAU REALISASI BELANJA MODAL YANG TERTUNDA. HAL INI PENTING AGAR SIKLUS ANGGARAN TAHUN BERIKUTNYA LEBIH AKURAT.

4. TREN NERACA DAERAH

PENINGKATAN ASET SEBESAR 1,12% (**SATU KOMA DUA BELAS PERSEN**) DAN PENURUNAN KEWAJIBAN SEBESAR 34,72% (**TIGA PULUH EMPAT KOMA TUJUH PULUH DUA PERSEN**) ADALAH INDIKASI POSITIF DALAM PENGELOLAAN FISKAL. NAMUN, KUALITAS ASET TETAP DAN PRODUKTIVITASNYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK MASIH PERLU DITINGKATKAN.

5. TRANSFORMASI DIGITAL DAN TATA KELOLA

KAMI MENDORONG AGAR PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH TERUS DITINGKATKAN, MELALUI INTEGRASI E-BUDGETING, E-PLANNING, DAN E-REPORTING SECARA MENYELURUH, AGAR PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL BISA DILAKUKAN LEBIH EFEKTIF.

PARA HADIRIN YANG TERHORMAT DAN BERBAHAGIA

DEMIKIAN KIRANYA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEPAN YANG
DAPAT KAMI SAMPAIKAN, SEMOGA APA YANG KITA RENCANAKAN DAPAT
DI BERI KELANCARAN OLEH ALLAH SWT DALAM PELAKSANAANNYA.
AAMIIN

BILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH

WASSALAMUALAIKUM WR. WB.

**PURWAKARTA, 13 JUNI 2025
FRAKSI DEMOKRAT PAN (DEPAN)
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA

ASEP CHANDRA TK

WAKIL KETUA

H. AMING

SEKERTARIS

DULNASIR,SH.MH

ANGGOTA :

1. H.AGUS WIJAYA,SH.

BERITA ACARA

NOMOR : 000.5.7/19/DPRD/2025

RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA (PEMBICARAAN TINGKAT I) PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN AGENDA POKOK PANDANGAN UMUM FRAKSI.

Pada hari ini Jum'at, Tanggal Tigabelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-06-2025), telah dilaksanakan rapat paripurna dalam rangka (Pembicaraan Tingkat I) Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 dengan Agenda Pokok Pandangan Umum Fraksi.

I. Pembukaan

Rapat dilaksanakan dimulai pukul 14.40 WIB dan selesai pada pukul 15.05 WIB sesuai dengan waktu yang dijadwalkan dalam surat undangan nomor 100.3.2/499/DPRD Tanggal 12 Juni 2025 Perihal Undangan Rapat Paripurna DPRD undangan rapat paripurna, dan dihadiri oleh 34 (tigapuluh empat) orang.

II. Pembahasan

Rapat Dipimpin dan dibuka oleh Ketua DPRD sementara Kabupaten Purwakarta Yth. Sri Puji Utami dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pandangan Umum Fraksi;
4. Do'a / Penutup

1. Pembukaan

Sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (3) huruf a dan b Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2025, bahwa penjelasan Bupati

terhadap raperda usul Bupati dalam Pembicaraan TK. I perlu mendapatkan Pandangan Umum dari fraksi – fraksi yang mendasari pada kesempatan hari ini dilaksanakannya rapat paripurna DPRD dengan agenda pokok pandangan umum fraksi.

2. Pandangan Umum Fraksi

- 1) Juru Bicara dari Fraksi Gerindra Sdr. H. Teddy Nandung H, SE;
- 2) Juru Bicara dari Fraksi Golkar Sdr. H. Elan Sofyan, SM disampaikan tanpa dibacakan;
- 3) Juru Bicara dari Fraksi Nasdem Sdri. Denisa Wulandai, SM disampaikan tanpa dibacakan;
- 4) Juru Bicara dari Fraksi PDI-P Sdri. Lina Yuliani disampaikan tanpa dibacakan;
- 5) Juru Bicara dari Fraksi PKB Sdr. Zaenal Arifin disampaikan tanpa dibacakan;
- 6) Juru Bicara dari Fraksi PKS telah menyampaikan pandangan umum Fraksi ke Pimpinan DPRD sebelum melaksanakan Bimtek Partai;
- 7) Juru Bicara dari Fraksi DEPAN Sdr. Dulnasir, S.H., M.H disampaikan tanpa dibacakan;
- 8) Juru Bicara dari Fraksi PERHATIAN Sdr. Ato Rukmana disampaikan tanpa dibacakan.

3. Doa/Penutup

Ditutup dengan mengucapkan hamdallah oleh Ketua Rapat Paripurna dan diketuk palu 3 kali.

III. Kesimpulan

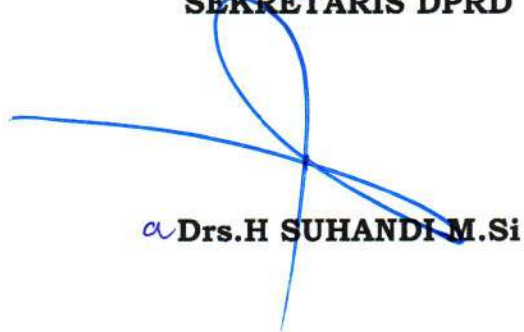
Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025, semoga Bupati akan dapat menyampaikan Jawaban

atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, dalam Rapat Paripurna DPRD yang akan dilaksanakan pada hari yang sama.

Demikian Berita acara ini dibuat dan di tandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

SEKRETARIS DPRD



a Drs. H SUHANDI M. Si

KETUA



SRI PUJI UTAMI

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. PURWAKARTA

HARI : JUM'AT
TANGGAL : 13 Juni 2025
PUKUL : 13.30 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD
ACARA : RAPAT PARIPURNA PEMBICARAAN TK. I DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RAPERDA P2APBD KABUPATEN PURWAKARTA TA. 2024 DENGAN AGENDA POKOK PANDANGAN UMUM FRAKSI

NO	NAMA	JABATAN	PARTAI	TANDATANGAN
1	SRI PUJI UTAMI	KETUA	GERINDRA	1
2	DIAS RUKMANA PRAJA, S.E.	WK. KETUA	GOLKAR	2
3	LUTHFI BAMALA	WK. KETUA	NASDEM	3
4	Drs. H. ENTIS SUTISNA, S.H., M.M.	WK. KETUA	PDI-P	4
5	RICKY SYAMSUL FAUZI	ANGGOTA	GERINDRA	5
6	H. TEDDY NANDUNG HERYAWAN, S.E.	ANGGOTA	GERINDRA	6
7	REGINA MULYA DWIYANTI	ANGGOTA	GERINDRA	7
8	SAID ALI AZMI	ANGGOTA	GERINDRA	8
9	SULAEMAN	ANGGOTA	GERINDRA	9
10	ZUSYEF GUSNAWAN, S.E.	ANGGOTA	GERINDRA	10
11	WAWAN SETIAWAN, S.E.	ANGGOTA	GERINDRA	11
12	Hj. NINA HELTINA	ANGGOTA	GERINDRA	12
13	DIANA LISU ARRANG BATO LIMBONG, S.Pd.	ANGGOTA	GERINDRA	13
14	MESAKH SUPRIYADI, S.E., M.Si.	ANGGOTA	GOLKAR	14
15	AHMAD SANUSI, S.M.	ANGGOTA	GOLKAR	15
16	KARWITA, S.H., M.H.	ANGGOTA	GOLKAR	16
17	KAMAL, S.S.	ANGGOTA	GOLKAR	17
18	H. OJA SUTISNA	ANGGOTA	GOLKAR	18
19	Hj. ENAH ROHANAH	ANGGOTA	GOLKAR	19
20	H. ELAN SOFYAN, S.M.	ANGGOTA	GOLKAR	20
21	Hj. PUTRIARTI PUTIK HARUMAWANGI, S	ANGGOTA	GOLKAR	21
22	Dra. Hj. DENI YANTHI	ANGGOTA	NASDEM	22
23	H. ELTHON BRAMEISTA GUNAWAN, S.H.	ANGGOTA	NASDEM	23
24	IIN SALAMIRAH	ANGGOTA	NASDEM	24
25	DENISA WULANDARI, S.M.	ANGGOTA	NASDEM	25
26	DEVI MUTIARA SARI	ANGGOTA	NASDEM	26
27	ASTRI NOVITASARI	ANGGOTA	NASDEM	27
28	WARSENO, S.E.	ANGGOTA	PDI-P	28
29	INA HERLINA	ANGGOTA	PDI-P	29
30	LINA YULIANI	ANGGOTA	PDI-P	30
31	UJANG ROSADI	ANGGOTA	PDI-P	31
32	NOVITA PURWANTI	ANGGOTA	PDI-P	32

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI	TANDATANGAN
33	ALAIKASSALAM, S.H.I	ANGGOTA	PKB	33
34	HILMI SIROJUL FUADI	ANGGOTA	PKB	34
35	ZAENAL ARIFIN	ANGGOTA	PKB	35
36	CECENG ABDUL QODIR, S.Pd.I.	ANGGOTA	PKB	36
37	AGUS MAHARDIKA	ANGGOTA	PKB	37
38	DEDI JUHARI	ANGGOTA	PKS	38
39	H. MOH. ARIEF KURNIAWAN, M.M.	ANGGOTA	PKS	39
40	DIDIN HENDRAWAN, S.E.	ANGGOTA	PKS	40
41	H. ASEP NURYANI, S.Pd.I.	ANGGOTA	PKS	41
42	H. DEDI SUTARDI	ANGGOTA	PKS	42
43	DULNASIR, S.H., M.H.	ANGGOTA	DEMOKRAT	43
44	H. AGUS WIJAYA, S.H.	ANGGOTA	DEMOKRAT	44
45	ASEP CHANDRA TK	ANGGOTA	DEMOKRAT	45
46	MUHSIN JUNAEDI	ANGGOTA	HANURA	46
47	H. ASEP ABDULLOH	ANGGOTA	HANURA	47
48	YANTHI NURHAYATI, S.Pd.	ANGGOTA	PPP	48
49	ATO RUKMANA	ANGGOTA	PPP	49
50	H. AMING, S.M.	ANGGOTA	PAN	50

Purwakarta, 13 Juni 2025

PIMPINAN RAPAT





DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

HARI/ TANGGAL : Jum'at/13 Juni 2025
PUKUL : 13.30 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD PURWAKARTA
ACARA :

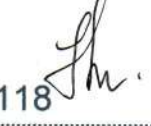
NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
1		BUPATI	1
2		WAKIL BUPATI	2
3		SEKDA	3
4	Alit Sukana	PLT Kadis DPMO	4
5	HM JOHN DIEN TH	Ketum MUI Pwk	5
6	Ander		6
7	Dicky D	Staf RRI / Setda	7
8	Farid Purwanto	Disdik	8
9	IWAN SOEROSO	DisHub	9
10	Desi A.	DISPERAGRA	10
11	BENNY		11
12	Raden Juad	Disdi	12
13	A. Bueyan	Disdik	13
14	Vesip	Disdik	14
15	VJang Apud	Disdik	15
16	Drs. Al Idrus Nurhasan	Camat Kec. Darangdan	16
17	Iis karti	Disdik	17
18	Suparna	Disdik	18
19	Budiana H.	Damkar	19

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
20	Pusri	Setu an.	20
21	Putri	Ditah	21
22	Tunda	Humas	22
23	Vini	"	23 Vini
24	Pani	"	24
25	Fatke	Dapoparband	25
26	Jakaria	LMP/ Aliansi	26
27	Dia	Kadis	27
28	Hening.	Sec. pubk.	28
29	Marwah m	Ka BBL	29
30	Dede Iwan	BPSD	30
31	Desi Hendhyani	Disarpus	31
32	Ridwan	Protokol	32
33	Andi	Protokol	33
34	Jyus J.	Disarpus	34
35	Agiat suranman	BICAP	35
36	Alvi		36
37	Purnaningsih		37
38	Ayudaman N	Dinkes	38
39	Kr. Eka LD	Dinkes	39
40	HUTUN . M .	DEKUP.	40
41	Parni	DEKUP	41
42	Tuti Cantini	Desuaker	42
43	Agol- mhyati	Sukati	43

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
44	Damir	Damkar	44
45	Zeb. Balun	Damkar	45
46	Rafly	Damkar	46
47	Hasan Alwan	Disdik	47
48	Rina Rosdiana	Disdik	48
49	Yanwasti	- u -	49
50	Habibah	- u -	50
51	Mikro R.S	Disdik	51
52	M. ISA. Koswari	Kec. Bojong	52
53	H. Mamsud	Kec. Manis	53
54	II Istadiwinata	DKOP	54
55	Rodmanawati	Disdik	55
56	Deby	DKOP	56
57	Suryanti	.	57
58	Firmaniyah	.	58
59	M. Bagus	.	59
60	Dori	"	60
61	Dimas	"	61
62	M. Nurcahya	DKOP	62
63	AI SAIDAH	Setdik	63
64	Kania	Disdik	64
65	Ade Ahmad	Damkar	65
66	Agus P	Damkar	66
67	Kaliswara	Damkar	67

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
68	Dani Cahyadi	Damkar	68
69	Ardi Wihda	Dinas Kertrans	69
70	Dero A	Wangsa	70
71	Rd. Moh. Dadi R	Disdik	71
72	Fahmi S	Disdik	72
73	Dade Hermawan	Dukamalah	73
74	Subachri'	Kec. P. Balan	74
75	Rumel	Kec. Cibadun	75
76	Zubaidah Q	Disdik.	76
77	Deur N	Disdik	77
78	Sheila	Purpanan	78
79	Ilham -	Humas	79
80	Stegio	Prosum	80
81	Hovi	Situan	81
82	Edo. Gunardi	DKUPP	82
83	Daryan	Kab. Tana Toraja / Kec. Jhe.	83
84	Rizka	Humas	84
85	Hikmah -	"	85
86	Rangsi -	"	86
87	Zainul	"	87
88	Vini -	"	88
89	Sri -	"	89
90	Kari	"	90

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
91	Rio	Humas	91
92	Dhan	"	92
93	Tamir Ponda	Disdik	93
94	Herma		94
95	Rini	Sepren	95
96	Hisa	"	96
97	Purani	"	97
98	eneep	"	98
99	ahmar	"	99
100	ahmad	"	100
101	Hj Eti Suharti	"	101
102	Ade Abray	"	102
103	Poni J	"	103
104	MUTIL.P	Keu	104
105	Bede	Umum	105
106	Ade	Umum	106
107	Triyati	Umum	107
108	UPANG	Grupam	108
109	IHSAN	Umum	109
110	ADE	Umum	110
111	Luki	~	111
112	Syandra	~	112
113	AROL	~	113
114	WIBISANA	~	114

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
	Ageng Salma Dhiya	Staf Ku	
115	Ahmad O	~	115 
116	Mubichin	~	116 
117	Vena C.	~	117 
118	Ika	~	118 
119	Josi	~	119 
120	Asmana	~	120 
121	Hendra.	~	121 
122	Rizal	~	122 
123	Agus.	~	123 
124	Agus	Umum.	124 
125	SOPHAN	Satpam.	125 
126	Dan.	Umum.	126 
127	Agus	Ku	127 
128	Rian.	Ku.	128 
129	Jajang	~	129 
130	Edi Junaedi	~	130 
131	Angga.	Um	131 
132	Revi P.	~	132 
133	Maman R	~	133 
134	Diky	Um -	134 
135	Erlan D	Besg	125 
136	Asif Cu		136 

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
137			137
138			138
139			139
140			140
141			141
142			142
143			143
144			144
145			145
146			146
147			147
148			148
149			149
150			150
151			151
152			152
153			153
154			154
155			155
156			156
157			157
158			158
159			159

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
160			160
161			161
162			162
163			163
164			164
165			165
166			166
167			167
168			168
169			169
170			170
171			171
172			172
173			173
174			174
175			175
176			176
177			177
178			178
179			179
180			180
181			181
182			182
183			183
184			184
185			185
186			186
187			187

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
188			188
189			189
190			190
191			191
192			192
193			193
194			194
195			195
196			196
197			197
198			198
199			199
200			200
201			201
202			202
203			203
204			204
205			205
206			206
207			207
208			208
209			209
210			210
211			211
212			212
213			213
214			214
215			215



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152
Telepon: (0264) 207908 Faksimile: (0264) 211229

Laman : <https://dprd.purwakartakab.go.id/> pos-el: sekretariatdprd.purwakartakab@gmail.com

Purwakarta, 12 Juni 2025

Nomor : 900.1/ 500 /DPRD
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Paripurna DPRD

Yth. Sdr. Wakil Bupati Purwakarta
di-
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka penyampaian raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tk. I, yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tk. I Pembahasan raperda tentang P2APBD Kabupaten Purwakarta TA. 2024

a) Rapat Paripurna dengan Agenda Pokok Penjelasan Bupati;

Hari / Tanggal : Jum'at/ 13 Juni 2025;
Pukul : 08.30 WIB;
Pakaian : PSH;
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Purwakarta;
Acara : 1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati;
3. Do'a/Penutup.

b) Rapat Paripurna dengan Agenda Pokok Pandangan Umum Fraksi:

Hari / Tanggal : Jum'at/ 13 Juni 2025;
Pukul : 13.30 WIB;
Pakaian : PSH;
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Purwakarta;
Acara : 1. Pembukaan;
2. Pandangan Umum Fraksi;
3. Do'a/Penutup.

- c) Rapat Paripurna dengan Agenda Pokok Jawaban Bupati;
Hari/ Tanggal: Jum'at/ 13 Juni 2025;
Pukul : 19.30 WIB;
Pakaian : PSH;
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Purwakarta;
Acara : 1. Pembukaan;
2. Jawaban Bupati;
3. Do'a/Penutup.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purwakarta
Ketua



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

SRI PUJI UTAMI

Catatan :
Dimohon hadir 15 menit sebelum acara dimulai.

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0214) 207908 Purwakarta

**RISALAH : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA (PEMBICARAAN TINGKAT I) DALAM
RANGKA PENYAMPAIAN RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN
2025 DENGAN AGENDA JAWABAN BUPATI.**

HARI : JUMAT;

TANGGAL : 13 JUNI 2025;

PUKUL : 19.30 WIB;

**TEMPAT : AULA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA**

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM,

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SAMPURASUN.....

Yth. SDR WAKIL BUPATI PURWAKARTA;

YTH. PIMPINAN DAN PARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA;

Yth. UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN

DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;

Yth. KEPALA KEPOLISIAN RESORT

PURWAKARTA ATAU YANG MEWAKILI;

Yth. KOMANDAN DISTRIK MILITER 0619

PURWAKARTA ATAU YANG MEWAKILI;

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

ATAU YANG MEWAKILI;

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA

ATAU YANG MEWAKILI;

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA ATAU YANG MEWAKILI;

Yth. KOMANDAN MEN ARMED 1/SY/I KOSTRAD;

Yth. KOMANDAN YON ARMED 09 PASOPATI;

Yth. KOMANDAN SUB DEN POM PURWAKARTA;

Yth. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
PURWAKARTA;

Yth. KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA;

Yth. SEKRETARIS DAERAH, PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH, PARA
CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA SE KABUPATEN PURWAKARTA;

Yth. PENGURUS PARPOL/ORMAS/LSM, PERS DAN TOKOH MASYARAKAT
SERTA PARA ALIM ULAMA SE-KABUPATEN PURWAKARTA DAN
HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ILLAHI ROBBI, ATAS LIMPAHAN RAKHMAT DAN KARUNIA-NYA, SEHINGGA SAAT INI KITA MASIH DIBERI KEKUATAN LAHIR DAN BATIN, UNTUK MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA DALAM RANGKA PEMBICARAAN TK I DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN TA 2024 DENGAN AGENDA JAWABAN BUPATI TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI.

SHOLAWAT SERTA SALAM SENANTIASA TERCURAH KEPADA JUNGJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW BESERTA KELUARGANYA, PARA SAHABATNYA DAN SELURUH UMATNYA HINGGA AKHIR JAMAN.

SELANJUTNYA SESUAI LAPORAN DARI PIHAK SEKRETARIAT DEWAN, BAHWA PARA ANGGOTA DEWAN TELAH HADIR DAN MENANDATANGANI SEBANYAK 35 (TIGAPULUH LIMA) ORANG, DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN TATA TERTIB DEWAN, RAPAT TELAH DAPAT DILAKSANAKAN.

DIAWALI UCAPAN

"BISMILLAHIRROHMANIRROHIM"

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI JUMAT, TANGGAL 13 JUNI 2025, KAMI NYATAKAN :

===== DI BUKA =====

===== KETUK PALU 1 KALI =====

PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA SUSUNAN ACARA RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN;
2. JAWABAN BUPATI ;
3. DO`A / PENUTUP.

1. PEMBUKAAN

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI, BAHWA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG DUA RAPERDA USUL PEMERINTAH DAERAH, TELAH DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA SEBELUMNYA UNTUK ITU, DALAM RAPAT PARIPURNA HARI INI, SETELAH DIAGENDAKAN PENJELASAN BUPATI DAN PANDANGAN UMUM FRAKSI FRAKSI, DIBERIKAN KESEMPATAN KEPADA SAUDARA BUPATI DALAM MENYAMPAIKAN JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI FRAKSI.

2. JAWABAN BUPATI.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

BAIKLAH UNTUK SELANJUTNYA, KITA IKUTI SECARA SEKSAMA ACARA YANG KEDUA YAITU JAWABAN BUPATI. KEPADA SAUDARA WAKIL BUPATI KAMI PERSILAHKAN_____

TERIMAKASIH, KEPADA SAUDARA WAKIL BUPATI YANG TELAH BERKENAN MENYAMPAIKAN JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI, SEMOGA KITA SEKALIAN KHUSUSNYA PARA ANGGOTA DEWAN YANG TERGABUNG DALAM FRAKSI-FRAKSI

TELAH DAPAT MEMAHAMI SUBSTANSI DARI JAWABAN BUPATI YANG BARU SAJA DISAMPAIKAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DALAM PEMBAHASAN LEBIH LANJUT PADA RAPAT RAPAT DEWAN BERIKUTNYA.

3. DO'A / PENUTUP

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI
SAMPAILAH PADA ACARA YANG TERAKHIR YAITU DO'A / PENUTUP.
DENGAN INI KAMI MOHON KESEDIAAN SAUDARA ASMANA, S.Pd.,
M.Si. UNTUK MEMIMPIN PEMBACAAN DO'A , DIPERSILAHKAN.

TERIMAKASIH, SEMOGA DO'A KITA SEKALIAN DIKABULKAN OLEH
ALLAH SWT. AAMIIN.

AKHIRNYA KAMI ATAS NAMA PIMPINAN DEWAN MENGUCAPKAN
TERIMAKASIH , MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA .
DIAKHIRI UCAPAN,

"ALHAMDULILLAHIRROBIL'ALAMIN"

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI,
JUMAT TANGGAL 13 JUNI 2025,KAMI NYATAKAN :

=====DI TUTUP =====
===== KETUK PALU 3 KALI =====

WABILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH

WASSALAMUALLAIKUM WR WB.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

SEKRETARIS,



a Drs. H. SUHANDI, MSi

KETUA,



SRI PUJI UTAMI



**JAWABAN BUPATI PURWAKARTA
ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TA 2024
PURWAKARTA, JUNI 2025**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM.

ASSALAMU 'ALAIKUM WR. WB.

SAMPURASUN

- YANG TERHORMAT BAPAK/IBU PIMPINAN BESERTA SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA;
- YANG TERHORMAT, UNSUR PIMPINAN DAERAH, KAPOLRES PURWAKARTA, DANDIM 0619 PURWAKARTA, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI, KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA, KETUA PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA, DANMED ARMED, DANYON ARMED-9 PASOPATI, SERTA DANSUB DENPOM PURWAKARTA;

JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM PRAKSI TERHADAP PPA
KAB. PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

- PARA PIMPINAN ORGANISASI SOSIAL POLITIK, KETUA KPU DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, SESEPUH DAN PINISEPUH PURWAKARTA, ORMAS, LSM, INSAN PERS SERTA MASYARAKAT PURWAKARTA YANG SAYA CINTAI;

HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

SEGALA PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS RAHMAT, NIKMAT, HIDAYAH DAN KARUNIA-NYA YANG TAK PERNAH PUTUS KEPADA KITA SEMUA, HINGGA PADA SAAT INI KITA DAPAT BERSILATURAHIM DAN BERKUMPUL UNTUK MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

**RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT
DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,**

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA,
BAHWA TELAH DISAMPAIKAN PANDANGAN UMUM
DARI FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA TERHADAP RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024. PADA
KESEMPATAN INI, IJINKAN KAMI MENYAMPAIKAN
JAWABAN DAN PENJELASAN TERHADAP PANDANGAN
UMUM YANG TELAH DISAMPAIKAN MASING-MASING
FRAKSI PADA RAPAT PARIPURNA DPRD SEBELUMNYA
YAITU SEBAGAI BERIKUT :

**A. BERSAMA INI KAMI SAMPAIKAN JAWABAN
ATAS PANDANGAN UMUM DARI FRAKSI
GERINDRA**

PERTAMA-TAMA KAMI MENGHATURKAN TERIMA
KASIH ATAS APRESIASI FRAKSI GERINDRA TERHADAP
PENCAPAIAN HASIL KINERJA PEMERINTAH DAERAH
YANG MENDAPATKAN PENGAKUAN DARI MASYARAKAT
DAN PEMERINTAH PUSAT TERKAIT PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN YANG MENDAPATKAN PREDIKAT

JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM PRAKSI TERHADAP PPA
KAB. PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP), SEHINGGA DAPAT MEMACU PERANGKAT DAERAH UNTUK DAPAT MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH YANG BERLAKU.

SEBAGAIMANA YANG DISAMPAIKAN FRAKSI GERINDRA POIN-POIN YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MENGENAI :

1. KAMI MENGAPRESIASI PERHATIAN FRAKSI GERINDRA TERHADAP DINAMIKA EKONOMI DAERAH YANG MENUNJUKKAN KETIDAKSINKRONAN ANTAR INDIKATOR SEPERTI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE), INFLASI, IPM, ANGKA KEMISKINAN, TINGKAT PENGANGGURAN, DAN RASIO GINI. HAL INI MENJADI CATATAN PENTING DAN REFLEKSI BERSAMA, BAHWA PERTUMBUHAN EKONOMI BELUM SEPENUHNYA INKLUSIF DAN MERATA. OLEH KARENA ITU PEMERINTAH DAERAH KEDEPAN AKAN MEMPERKUAT SINERGI PROGRAM ANTAR SEKTOR UNTUK MENGATASI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN, MENGARAHKAN PEMBANGUNAN PADA WILAYAH DAN KELOMPOK MASYARAKAT YANG PALING RENTAN SERTA

MENGINTEGRASIKAN DATA STATISTIK SEKTORAL UNTUK KEBIJAKAN YANG LEBIH TEPAT SASARAN.

2. PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN APRESIASI YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA FRAKSI GERINDRA ATAS PENGHARGAAN SERTA PENILAIAN OBJEKTIF TERHADAP CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN DAN REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN SEBESAR 93,46% DAN BELANJA DAERAH SEBESAR 92,57% MERUPAKAN HASIL DARI KERJA KOLEKTIF DAN SINERGIS SELURUH PERANGKAT DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN SERTA OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI TENGAH BERBAGAI TANTANGAN FISKAL YANG DIHADAPI. KAMI JUGA MENYAMBUUT BAIK DORONGAN FRAKSI GERINDRA AGAR PEMERINTAH DAERAH TERUS MENGEDEPANKAN PRINSIP SPENDING BETTER, YAKNI MEMBELANJAKAN ANGGARAN DENGAN LEBIH CERMAT, EFISIEN, DAN BERORIENTASI PADA HASIL (OUTCOME) YANG MEMBERIKAN MANFAAT

JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM PRAKSI TERHADAP PPA
KAB. PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

NYATA BAGI MASYARAKAT. SEJALAN DENGAN HAL TERSEBUT, PEMERINTAH DAERAH BERKOMITMEN UNTUK MENINGKATKAN KETEPATAN PERENCANAAN ANGGARAN YANG BERBASIS KEBUTUHAN RIIL DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, MENGUATKAN MANAJEMEN PELAKSANAAN ANGGARAN AGAR BELANJA LEBIH EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SERTA MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN EVALUASI BERKELANJUTAN GUNA MEMASTIKAN BAHWA SETIAP PENGELUARAN BERDASARKAN PRINSIP EFEKTIF, EFISIEN DAN EKONOMIS.

B. KEMUDIAN KAMI SAMPAIKAN JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR

1. KAMI MENGHATURKAN TERIMA KASIH ATAS APRESIASI FRAKSI GOLKAR TERHADAP PENYAMPAIAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN SECARA LENGKAP DAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ATAS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA DAPAT MEMPERTAHANKAN PREDIKAT WTP (WAJAR TANPA PENGECEUALIAN) DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024, HAL INI MERUPAKAN PENCAPAIAN PENTING DALAM MENJAGA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

2. TERKAIT CATATAN-CATATAN PENTING UNTUK PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA, PEMERINTAH DAERAH AKAN SELALU MEMPERHATIKAN STRUKTUR BELANJA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU, DAN KAMI SEPENDAPAT BAHWA ADANYA SISTEM REWARD DAN PUNISMENT YANG JELAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, SERTA PENGUATAN PERAN DAN KAPASITAS APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN BERBASIS TEKNOLOGI AKAN MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG LEBIH BAIK.

**C. SELANJUTNYA KAMI SAMPAIKAN JAWABAN
ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM
SEBAGAI BERIKUT:**

PERTAMA-TAMA KAMI MENGHATURKAN TERIMA KASIH ATAS APRESIASI FRAKSI NASDEM TERHADAP PENCAPAIAN HASIL KINERJA PEMERINTAH DAERAH YANG MENDAPATKAN PENGAKUAN DARI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH PUSAT TERKAIT PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN YANG MENDAPATKAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP), SEHINGGA DAPAT MEMACU PERANGKAT DAERAH UNTUK DAPAT MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH YANG BERLAKU.

SEBAGAIMANA YANG DISAMPAIKAN FRAKSI NASDEM POIN-POIN YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MENGENAI :

1. BERKAITAN DENGAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA MENYAMBUT BAIK ATAS SARAN DAN PANDANGAN DARI FRAKSI NASDEM MENGENAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH. KAMI MEMAHAMI PENTINGNYA MENGOPTIMALKAN POTENSI

PENDAPATAN SEBESAR 6,54% ATAU SEBESAR RP178.359546.024,00 TERUTAMA DI SEKTOR PAJAK DAN RETRIBUSI. PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI HASIL PAJAK DAERAH YANG TIDAK MENCAPI TARGET CUKUP SIGNIFIKAN YAITU BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TEREALISASI SEBESAR RP66.622.249.648,00 ATAU MENCAPI 41,95%, HAL INI DISEBABKAN OLEH SISTEM SELF-ASSESSMENT BPHTB SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 1 TAHUN 2022, MENYEBABKAN NILAI TRANSAKSI YANG DILAPORKAN WAJIB PAJAK SERINGKALI TIDAK MENCERMINKAN HARGA PASAR RIIL, NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) DI KABUPATEN PURWAKARTA YANG MASIH RENDAH DIBANDINGKAN DENGAN HARGA PASAR AKTUAL, MASIH ADANYA TRANSAKSI UTANG-PIUTANG DI LAPANGAN DENGAN JAMINAN TANAH DAN DITEMUKAN TRANSAKSI TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA YANG BARU MENGAJUKAN VALIDASI BPHTB TAHUN INI, ADANYA KESULITAN VERIFIKASI NILAI

TRANSAKSI DI LAPANGAN KARENA TERBATASNYA BUKTI YANG TERSEDIA, SERTA POTENSI BPHTB DARI PT PERKEBUNAN NUSANTARA DAN PT KERETA CEPAT INDONESIA CHINA TIDAK TEREALISASI. DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN POTENSI PENDAPATAN TERSEBUT, PEMERINTAH DAERAH BERENCANA MELAKUKAN BEBERAPA LANGKAH STRATEGIS, YAITU PENGKAJIAN DAN INTENSIFIKASI SISTEM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, PENINGKATAN KAPASITAS DAN KEMAMPUAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, SERTA PENINGKATAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT MENGENAI PENTINGNYA MEMBAYAR PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH. DENGAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS TERSEBUT, PEMERINTAH DAERAH OPTIMIS DAPAT MENGOPTIMALKAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH DAN MENCAPAI TARGET PENDAPAT YANG TELAH DITETAPKAN DI TAHUN-TAHUN MENDATANG.

2. KAITAN DENGAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH TERUS BERUSAHA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS BELANJA MELALUI PENINGKATAN PORSI BELANJA PUBLIK DAN MENEKAN BELANJA APARATUR. UPAYA TERSEBUT DILAKUKAN MELALUI PENGENDALIAN BELANJA YANG LEBIH EFISIEN DAN PRODUKTIF SERTA BERFOKUS PADA KEGIATAN YANG MENDUKUNG AKSELERASI PEMBANGUNAN SERTA DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR MASYARAKAT YANG SEMAKIN MENINGKAT, BAIK PELAYANAN WAJIB MAUPUN PELAYANAN YANG SIFATNYA SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR SEHINGGA MANFAAT PEMBANGUNAN DAPAT LANGSUNG DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT.
3. SELANJUTNYA TERKAIT PENGELOLAAN SILPA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA MENYAMBUUT BAIK MASUKAN AGAR DILAKUKAN EVALUASI, ANALISIS, DAN PENILAIAN SECARA MENYELURUH TERHADAP SUMBER DAN PENYEBAB ADANYA SILPA DALAM PROSES PELAKSANAAN ANGGARAN.

HAMBATAN SILPA PADA TAHUN ANGGARAN 2024 TERDIRI ATAS SISA DANA BLUD PELAYANAN PASIEN COVID DARI TAHUN 2020-2022 YANG TERTAHAN DAN BARU DIGUNAKAN SECARA BERTAHAP DARI TAHUN 2023-2025, SILPA BLUD PUSKESMAS DAN BOK PUSKESMAS YANG TIDAK DAPAT DIREALISASIKAN DIKARENAKAN MENUNGGU TERKAIT PENGGUNAANNYA, ADANYA KETERLAMBATAN TERKAIT JUKNIS SERTA KETERLAMBATAN PROSES PENYALURAN DANA DARI PUSAT KE KAS DAERAH ATAS DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA YANG HARUS MENGIKUTI KETENTUAN YANG BERLAKU

D. SELANJUTNYA KAMI SAMPAIKAN JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN

KAMI MENGHATURKAN TERIMA KASIH ATAS APRESIASI FRAKSI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH DAERAH SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAPAT MEMPERTAHANKAN PREDIKAT

JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM PRAKSI TERHADAP PPA
KAB. PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

WTP (WAJAR TANPA PENGECUALIAN) DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024, HAL INI TENTUNYA TIDAK TERLEPAS DARI KOORDINASI SELURUH STAKEHOLDERS DAN MERUPAKAN HASIL KERJA KERAS BERSAMA SELURUH PERANGKAT DAERAH DALAM MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH YANG BERLAKU. SELAIN ITU KAMI SEPENDAPAT AKAN PENTINGNYA PERMASALAHAN PEMBANGUNAN YANG DIHADAPI PADA TAHUN 2025 DAN KEDEPANNYA, AKAN SEMAKIN PENUH TANTANGAN, SEJALAN DENGAN TUNTUTAN DAN DINAMIKA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA UNTUK KITA PERBAIKI KEDEPANNYA.

1. SEHUBUNGAN DENGAN PANDANGAN YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN ANGGARAN 2024 DAN ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN SERTA PEMBANGUNAN DAERAH, PEMERINTAH DAERAH SEPENDAPAT BAHWA POTENSI PENDAPATAN ASLI

JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM PRAKSI TERHADAP PPA
KAB. PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

DAERAH (PAD) MASIH SANGAT BESAR UNTUK DITINGKATKAN. UPAYA PENINGKATAN DILAKUKAN MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI, PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN, SERTA PEMUTAKHIRAN DAN INTEGRASI DATA PERPAJAKAN DAERAH. PEMERINTAH JUGA TERUS MENDORONG INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK SERTA MENGEMBANGKAN DIVERSIFIKASI SUMBER PENDAPATAN, TERMASUK OPTIMALISASI DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DARI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA UNTUK MENDUKUNG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. TERKAIT DENGAN PENURUNAN PENDAPATAN TRANSFER DARI PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH DAERAH TELAH MELAKUKAN KOORDINASI SECARA AKTIF AGAR ALOKASI BANTUAN KEUANGAN, TERUTAMA DI BIDANG INFRASTRUKTUR SEPERTI JALAN, JEMBATAN, DAN RUMAH LAYAK HUNI DAPAT DITINGKATKAN. PROGRAM STRATEGIS DAERAH

SEPERTI "JALAN MULUS IMAH ALUS" DAN "LEMBUR DIURUS KOTA DITATA" MENJADI BAGIAN PENTING DARI PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG TERUS DIUPAYAKAN AGAR MENDAPAT DUKUNGAN OPTIMAL DARI PEMERINTAH PROVINSI.

2. REALISASI BELANJA BAGI HASIL KEPADA DESA YANG HANYA MENCAPAI 70,36% DISEBABKAN OLEH BEBERAPA FAKTOR, ANTARA LAIN KETERLAMBATAN PELAPORAN DAN PENYAMPAIAN DATA DARI DESA, BELUM OPTIMALNYA PENERIMAAN DARI SEKTOR PAJAK DAN RETRIBUSI, KENDALA TEKNIS DAN ADMINISTRASI SEPERTI PENYESUAIAN REGULASI, SERTA KETERLAMBATAN PENGAJUAN PERSYARATAN PENYALURAN OLEH DESA. PEMERINTAH DAERAH BERKOMITMEN UNTUK MELAKUKAN EVALUASI MENYELURUH DAN MENINGKATKAN KOORDINASI SERTA KAPASITAS PERANGKAT DESA GUNA MEMASTIKAN PENYALURAN TRANSFER DESA BERJALAN LEBIH OPTIMAL KE DEPANNYA.

3. PEMERINTAH DAERAH SEPENDAPAT BAHWA PIUTANG PAJAK SEBESAR Rp50.907.793.497,00 HARUS SEGERA DITINDAKLANJUTI. UPAYA PENAGIHAN AKAN DILAKUKAN MELALUI PENGUATAN SISTEM, INTENSIFIKASI, DAN PEMUTAKHIRAN DATA WAJIB PAJAK. SEMENTARA ITU, UTANG BELANJA BAGI HASIL KEPADA DESA SEBESAR RP19.735.800.472,00 JUGA MENJADI PERHATIAN DAN AKAN DISELESAIKAN SECARA BERTAHAP SESUAI KEMAMPUAN FISKAL DAERAH, DENGAN PERENCANAAN YANG LEBIH BAIK AGAR TIDAK TERULANG DI MASA MENDATANG.

E. SELANJUTNYA KAMI SAMPAIKAN JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA SEBAGAI BERIKUT:

1. KAMI HATURKAN TERIMA KASIH ATAS APRESIASI KEBERHASILAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 SEHINGGA DAPAT MEMPERTAHANKAN PREDIKAT WTP DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK). KAMI MENYADARI SEPENUHNYA BAHWA OPINI WTP MERUPAKAN BENTUK PENGAKUAN ATAS

JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM PRAKSI TERHADAP PPA
KAB. PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

KESESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP), NAMUN BUKAN MERUPAKAN CERMINAN SEMPURNA DARI SELURUH ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN, SEBAGAIMANA TELAH DISAMPAIKAN SECARA BIJAK OLEH FRAKSI PKB. SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT, PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BERKOMITMEN PENUH UNTUK MENINDAKLANJUTI SELURUH REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK SECARA SISTEMATIS, TERUKUR, DAN BERKELANJUTAN.

2. KAMI SEPENDAPAT DENGAN PANDANGAN FRAKSI PKB MENGENAI PERLUNYA PENYUSUNAN TARGET PENDAPATAN DAERAH YANG LEBIH REALISTIS DAN BERBASIS DATA. KE DEPAN, PEMERINTAH DAERAH BERKOMITMEN UNTUK MENYUSUN PROYEKSI PAD BERDASARKAN TREN HISTORIS, POTENSI RIIL, KONDISI EKONOMI MAKRO DAN MENGEDEPANKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN. SELAIN ITU MENGEMBANGKAN SISTEM PENGAWASAN DAN DIGITALISASI PEMUNGUTAN PAD SERTA

MEMPERKUAT SINERGI LINTAS PERANGKAT DAERAH.

3. KAMI SEPENDAPAT BAHWA BELANJA DAERAH HARUS DIARAHKAN PADA PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS YANG MEMBERIKAN MANFAAT NYATA BAGI MASYARAKAT. UNTUK ITU PEMERINTAH AKAN MEMPERKUAT PERFORMANCE-BASED BUDGETING, MENINGKATKAN DISIPLIN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA MENYUSUN INDIKATOR KINERJA YANG TERUKUR PADA SETIAP BELANJA PROGRAM.
4. KAMI MEMAHAMI DAN SEPENDAPAT BAHWA PEMBIAYAAN DAERAH IDEALNYA MENCERMINKAN STRATEGI PEMBANGUNAN YANG BERORIENTASI PADA PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DAN PENGUATAN KAPASITAS FISKAL DAERAH SECARA BERKELANJUTAN. KEBERADAAN SILPA PADA TAHUN ANGGARAN 2024 SEBAGIAN BESAR DISEBABKAN OLEH EFISIENSI BELANJA, KETERLAMBATAN PROSES PENGADAAN, SERTA BELUM TERSERAPNYA BEBERAPA ALOKASI BELANJA KARENA FAKTOR TEKNIS DAN ADMINISTRATIF. KAMI MENYADARI BAHWA HAL

INI MENJADI CATATAN PENTING DALAM ASPEK PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN. KEDEPAN PEMERINTAH DAERAH BERKOMITMEN UNTUK MENINGKATKAN KETEPATAN PERENCANAAN ANGGARAN SERTA MELAKUKAN EVALUASI MENYELURUH BAIK DARI SISI PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MAUPUN PENGENDALIAN ANGGARAN. DENGAN DEMIKIAN, KAMI BERHARAP KE DEPAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH, TERMASUK PEMANFAATAN SILPA, DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG LEBIH NYATA DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH.

5. KAMI MEMAHAMI SEPENUHNYA BAHWA PENGGUNAAN DANA TRANSFER YANG TIDAK SESUAI PERUNTUKAN, SELAIN BERPOTENSI MENIMBULKAN KETIDAKTERTIBAN DALAM PENGELOLAAN FISKAL DAERAH, JUGA DAPAT MENURUNKAN KEPERCAYAAN PUBLIK MAUPUN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KOMITMEN DAN INTEGRITAS TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH. KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PENGGUNAAN DANA TRANSFER MERUPAKAN

KOMITMEN KAMI, DAN MENJADI BAGIAN PENTING DALAM PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, SERTA PELAPORAN KEUANGAN DAERAH. PEMERINTAH DAERAH SECARA BERKELANJUTAN AKAN MENINGKATKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL AGAR SETIAP DANA YANG BERSUMBER DARI TRANSFER PUSAT DIGUNAKAN SESUAI PETUNJUK TEKNIS DAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

6. KAMI SEPENDAPAT BAHWA POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA MASIH DAPAT DIOPTIMALKAN LEBIH LANJUT, TERUTAMA MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN. KAMI MENYADARI BAHWA KEPATUHAN WAJIB PAJAK MENJADI TANTANGAN YANG HARUS DISIKAPI SECARA SERIUS DAN BERKELANJUTAN. OLEH KARENA ITU PEMERINTAH DAERAH SECARA TERUS MENERUS MELAKUKAN UPAYA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI DIGITALISASI SISTEM PEMUNGUTAN DAN PENGAWASAN PAD, PENINGKATAN

SOSIALISASI DAN EDUKASI KEPADA WAJIB PAJAK, PENGUATAN REGULASI DAERAH SERTA PENINGKATAN KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MENDUKUNG KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH BAIK.

7. KAMI MENYADARI BAHWA PEMBANGUNAN DAERAH HARUS BERDAMPAK LANGSUNG PADA PENURUNAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN OLEH KARENA ITU KEDEPANNYA PEMERINTAH DAERAH AKAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH MELALUI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SELANJUTNYA AKAN DIALOKASIKAN UNTUK BELANJA YANG BERFOKUS PADA KEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL SEPERTI MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, PERBAIKAN INFRASTRUKTUR, PELAYANAN KESEHATAN, PENINGKATAN EKONOMI DAN TEKNOLOGI PELAYANAN PUBLIK DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN PRINSIP EFEKTIF, EFISIEN DAN EKONOMIS.

**F. KEMUDIAN KAMI SAMPAIKAN JAWABAN
ATAS PANDANGAN UMUM DARI FRAKSI PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA**

KAMI MENGHATURKAN TERIMA KASIH ATAS APRESIASI FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera TERHADAP KEBERHASILAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA YANG TELAH MEMPERTAHANKAN RAIHAN WTP (WAJAR TANPA PENGECUALIAN) DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. UNTUK MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN 10 (SEPULUH) KALI BERTURUT-TURUT, HAL TERSEBUT DIBUTUHKAN KERJA KERAS DAN KERJA CERDAS SELURUH STAKEHOLDERS DEMI TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.

SELANJUTNYA KAMI JUGA MENYAMBUT BAIK MASUKAN FRAKSI PKS TERHADAP PENTINGNYA KUALITAS OUTPUT DAN OUTCOME DARI SETIAP PROGRAM. PEMERINTAH DAERAH SEPENDAPAT BAHWA TINGGINYA SERAPAN ANGGARAN HARUS SEJALAN DENGAN PENINGKATAN MANFAAT NYATA

JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM PRAKSI TERHADAP PPA
KAB. PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

BAGI MASYARAKAT, TERUTAMA DALAM SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN, KETAHANAN PANGAN, PENGENTASAN KEMISKINAN, DAN PELAYANAN DASAR. SEJALAN DENGAN HAL TERSEBUT KEDEPANNYA PEMERINTAH DAERAH AKAN MENGOPTIMALKAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH MELALUI PENGUATAN PENGANGGARAN DENGAN MENGAITKAN SETIAP BELANJA DENGAN INDIKATOR HASIL YANG TERUKUR, MONITORING DAN EVALUASI BERKALA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS, GUNA MEMASTIKAN EFEKTIVITAS DAN KETEPATAN SASARAN SERTA PENGUATAN SINERGI ANTAR-PERANGKAT DAERAH AGAR PELAKSANAAN KEGIATAN LINTAS SEKTOR LEBIH TERKOORDINASI DAN BERDAYA GUNA. PEMERINTAH DAERAH BERKOMITMEN UNTUK MENGOPTIMALKAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGENDALIAN PROGRAM, UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PURWAKARTA.

UNTUK PENGELOLAAN SILPA KEDEPANNYA AKAN DILAKUKAN ANALISIS LEBIH LANJUT SECARA KOMPREHENSIF MELIPUTI ANALISA KUANTITATIF

JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM PRAKSI TERHADAP PPA
KAB. PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

DAN KUALITATIF SEHINGGA SILPA TERSEBUT DI TAHUN 2025 BISA DIGUNAKAN SECARA MAKSIMAL.

PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TELAH DISAJIKAN DENGAN TEPAT WAKTU. UNTUK SELANJUTNYA RAPERDA INI AGAR SEGERA DIBAHAS OLEH BANGGAR DAN DILAKUKAN KESEPAKATAN BERSAMA.

G. KEMUDIAN BERSAMA INI KAMI SAMPAIKAN JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT DAN PAN (DEPAN)

KAMI HATURKAN TERIMA KASIH ATAS APRESIASI FRAKSI DEMOKRAT PAN ATAS PENYUSUNAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 YANG TELAH DISUSUN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DAN CAPAIAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN.

KEDEPANNYA PEMERINTAH DAERAH AKAN MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI EVALUASI SUMBER-SUMBER PAD SERTA PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT PENGELOLA

PAJAK DAN RETRIBUSI AGAR BISA MEMAKSIMALKAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH. TERKAIT PENCAPAIAN BELANJA DAERAH DAN OUTCOME PROGRAM UNTUK PENYAJIAN DATA BERBASIS KINERJA PERFORMANCE-BASED BUDGETING TERSAJI DALAM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

UNTUK PENGELOLAAN SILPA KEDEPANNYA SEBAGAIMANA TELAH KAMI SAMPAIKAN ATAS JAWABAN DARI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.

TERKAIT TREN ASET DI NERACA DAERAH YANG MENGALAMI PENINGKATAN MERUPAKAN INDIKASI POSITIF DALAM PENGELOLAAN FISKAL, TENTUNYA DARI SISI KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TERHADAP PELAYANAN PUBLIK AKAN TERUS KAMI TINGKATKAN. SELANJUTNYA TERKAIT TRANSFORMASI DIGITAL DAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH KEDEPANNYA PEMERINTAH DAERAH AKAN MELAKUKAN INTEGRASI E-BUDGETING, E-PLANNING, DAN E-REPORTING SECARA MENYELURUH, AGAR PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL BISA DILAKUKAN LEBIH EFEKTIF.

JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM PRAKSI TERHADAP PPA
KAB. PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

H. YANG TERAKHIR KAMI SAMPAIKAN JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PERSATUAN HATI NURANI (PERHATIAN)

PERTAMA-TAMA KAMI MENGHATURKAN TERIMA KASIH ATAS APRESIASI FRAKSI PERSATUAN HATI NURANI (PERHATIAN) TERHADAP CAPAIAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK), OPINI WTP INI MENJADI MOTIVASI BAGI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENJADI LEBIH BAIK DIMASA YANG AKAN DATANG.

SELANJUTNYA TERKAIT HASIL PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MERUPAKAN HASIL CAPAIAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2024.

KEDEPANNYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH AKAN LEBIH EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TEPAT SASARAN SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PURWAKARTA SECARA MERATA. SEBAGAIMANA HARAPAN FRAKSI

PERSATUAN HATI NURANI AGAR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH BERJALAN SESUAI DENGAN SEMESTINYA UNTUK SELANJUTNYA RAPERDA INI AGAR SEGERA DIBAHAS OLEH BANGGAR DAN DILAKUKAN KESEPAKATAN BERSAMA.

DEMIKIAN JAWABAN DAN PENJELASAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, SEMOGA ALLAH SWT MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN SENANTIASA MEMBIMBING KITA DALAM MENGEMBAN TUGAS DAN AMANAH DARI SEGENAP MASYARAKAT PURWAKARTA YANG KITA CINTAI.

BILLAHİ TAUFİK WAL HİDAYAH.

WASSALAMU' ALAIKUM WR.WB.



JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM PRAKSI TERHADAP PPA
KAB. PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

BERITA ACARA

NOMOR : 000.5.7/20/DPRD/2025

RAPAT PARIPURNA DPRD PURWAKARTA DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT I PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN AGENDA POKOK JAWABAN BUPATI.

Pada hari ini Jum'at, Tanggal Tigabelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluhlima (13-06-2025), telah dilaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta dalam rangka Pembicaraan Tk. I Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 dengan Agenda Pokok Jawaban Bupati.

I. Pembukaan

Rapat dilaksanakan dimulai pukul 15.10 WIB dan selesai pada pukul 16.40 WIB sesuai dengan waktu yang dijadwalkan dalam surat undangan nomor 100.3.2/499/DPRD Tanggal 12 Juni 2025 Perihal Undangan Rapat Paripurna DPRD undangan rapat paripurna, dan dihadiri oleh 35 (tigapuluh lima) orang.

II. Pembahasan

Rapat Dipimpin dan dibuka Oleh Ketua DPRD sementara Kabupaten Purwakarta Yth. Sri Puji Utami dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Jawaban Bupati;
3. Do`a / Penutup.

1. Pembukaan

Berdasarkan Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2022 Pasal 6 ayat (3) tentang rangkaian kegiatan Rapat Paripurna TK. I,

maka kali ini rangkaian kegiatannya adalah Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.

2. Jawaban Bupati

Jawaban Bupati disampaikan oleh Wakil Bupati Sdr. Abang Ijo Hapidin.

3. Doa/Penutup

Disampaikan oleh saudara Asmana, S.Pd.I., M.Si.

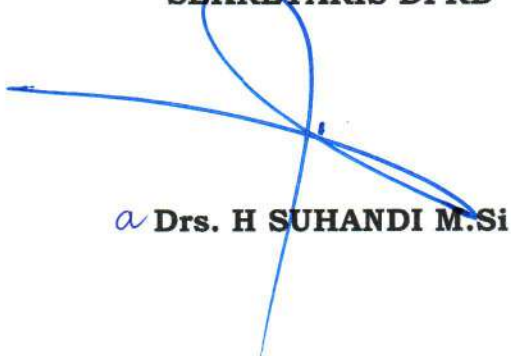
III. Kesimpulan

Demikian Berita acara ini dibuat dan di tandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

SEKRETARIS DPRD



a Drs. H SUHANDI M.Si

KETUA



SRI PUJI UTAMI

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. PURWAKARTA

HARI : JUM'AT
TANGGAL : 13 Juni 2025
PUKUL : 19.30 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD
ACARA : RAPAT PARIPURNA PEMBICARAAN TK. I DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RAPERDA P2APBD KABUPATEN PURWAKARTA TA. 2024 DENGAN AGENDA POKOK JAWABAN BUPATI

NO	NAMA	JABATAN	PARTAI	TANDATANGAN
1	SRI PUJI UTAMI	KETUA	GERINDRA	1
2	DIAS RUKMANA PRAJA, S.E.	WK. KETUA	GOLKAR	2
3	LUTHFI BAMALA	WK. KETUA	NASDEM	3
4	Drs. H. ENTIS SUTISNA, S.H., M.M.	WK. KETUA	PDI-P	4
5	RICKY SYAMSUL FAUZI	ANGGOTA	GERINDRA	5
6	H. TEDDY NANDUNG HERYAWAN, S.E.	ANGGOTA	GERINDRA	6
7	REGINA MULYA DWIYANTI	ANGGOTA	GERINDRA	7
8	SAID ALI AZMI	ANGGOTA	GERINDRA	8
9	SULAEMAN	ANGGOTA	GERINDRA	9
10	ZUSYEF GUSNAWAN, S.E.	ANGGOTA	GERINDRA	10
11	WAWAN SETIAWAN, S.E.	ANGGOTA	GERINDRA	11
12	Hj. NINA HELTINA	ANGGOTA	GERINDRA	12
13	DIANA LISU ARRANG BATO LIMBONG, S.Pd.	ANGGOTA	GERINDRA	13
14	MESAKH SUPRIYADI, S.E., M.Si.	ANGGOTA	GOLKAR	14
15	AHMAD SANUSI, S.M.	ANGGOTA	GOLKAR	15
16	KARWITA, S.H., M.H.	ANGGOTA	GOLKAR	16
17	KAMAL, S.S.	ANGGOTA	GOLKAR	17
18	H. OJA SUTISNA	ANGGOTA	GOLKAR	18
19	Hj. ENAH ROHANAH	ANGGOTA	GOLKAR	19
20	H. ELAN SOFYAN, S.M.	ANGGOTA	GOLKAR	20
21	Hj. PUTRIARTI PUTIK HARUMAWANGI, S	ANGGOTA	GOLKAR	21
22	Dra. Hj. DENI YANTHI	ANGGOTA	NASDEM	22
23	H. ELTHON BRAMEISTA GUNAWAN, S.H.	ANGGOTA	NASDEM	23
24	IIN SALAMIRAH	ANGGOTA	NASDEM	24
25	DENISA WULANDARI, S.M.	ANGGOTA	NASDEM	25
26	DEVI MUTIARA SARI	ANGGOTA	NASDEM	26
27	ASTRI NOVITASARI	ANGGOTA	NASDEM	27
28	WARSENO, S.E.	ANGGOTA	PDI-P	28
29	INA HERLINA	ANGGOTA	PDI-P	29
30	LINA YULIANI	ANGGOTA	PDI-P	30
31	UJANG ROSADI	ANGGOTA	PDI-P	31
32	NOVITA PURWANTI	ANGGOTA	PDI-P	32

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI	TANDATANGAN
33	ALAIKASSALAM, S.H.I	ANGGOTA	PKB	33
34	HILMI SIROJUL FUADI	ANGGOTA	PKB	34
35	ZAENAL ARIFIN	ANGGOTA	PKB	35
36	CECENG ABDUL QODIR, S.Pd.I.	ANGGOTA	PKB	36
37	AGUS MAHARDIKA	ANGGOTA	PKB	37
38	DEDI JUHARI	ANGGOTA	PKS	38
39	H. MOH. ARIEF KURNIAWAN, M.M.	ANGGOTA	PKS	39
40	DIDIN HENDRAWAN, S.E.	ANGGOTA	PKS	40
41	H. ASEP NURYANI, S.Pd.I.	ANGGOTA	PKS	41
42	H. DEDI SUTARDI	ANGGOTA	PKS	42
43	DULNASIR, S.H., M.H.	ANGGOTA	DEMOKRAT	43
44	H. AGUS WIJAYA, S.H.	ANGGOTA	DEMOKRAT	44
45	ASEP CHANDRA TK	ANGGOTA	DEMOKRAT	45
46	MUHSIN JUNAEDI	ANGGOTA	HANURA	46
47	H. ASEP ABDULLOH	ANGGOTA	HANURA	47
48	YANTHI NURHAYATI, S.Pd.	ANGGOTA	PPP	48
49	ATO RUKMANA	ANGGOTA	PPP	49
50	H. AMING, S.M.	ANGGOTA	PAN	50

Purwakarta, 13 Juni 2025

PIMPINAN RAPAT





DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

HARI/ TANGGAL : Jum'at/13 Juni 2025
PUKUL : 19.30 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD PURWAKARTA
ACARA :

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
1		BUPATI	1
2		WAKIL BUPATI	2
3		SEKDA	3
4	Alit Sukandi	PLT Kabid DPMU	4
5	HM JOHN DEEN TH	Ketum MUI Pwk	5
6	Andri		6
7	Dicky D	Staf AGS / Seka	7
8	Farid Purwanto	Disdik	8
9	IWAN SUDOSO	DISTHUB	9
10	Desi A	Disparangtan	10
11	BENNY		11
12	Rade Juvul.	Disor	12
13	A. Dungan	Disdik	13
14	Vsep	Disdik	14
15	Agang P. Fird	disdik	15
16	Drs. Al Idrus Nurhasan	Camat Kec. Parungdan	16
17	lis karki	Disdik	17
18	Suparna	Disdik	18
19	Barliang H	Pamkar	19

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN	
20	Purn	sum	20	
21	Yuse V.	Disarpo	21	
22	Indri	Inde	22	
23	MURUN. M.	Drup.	23	
24	Tuti Santini	Disnaker	24	
25	Fadhie	Disparparbu &	25	
26	Jakaria	LMP / Aliansi	26	
27	Dia S	Kadus	27	
28	Nengy Spi	kec. Pak	28	
29	Marwah W	kec. PBC	29	
30	Dede Iwan	BPBD	30	
31	Desi Henyanti	Disarpus	31	
32	Ridwan T	Protokol	32	
33	Andi	Protokol	33	
34	Tunda	Humas	34	
35	Vivi	"	35	
36	Rani	"	36	
37	ALDI	Sekwan	37	
38	Surwanigih	"	38	
39	Agus SURANIMAN	BKAD	39	
40	Dr. Eva Lytha D	Dinkes	40	
41	Agus N	Dinkes	41	
42	parni	Drup	42	
43	Ogop. Mahyati	Sufasi	43	

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
44	Devi	Danlar	44
45	Zah. Bulem	Dman	45
46	Ratny	Damkar	46
47	Hasan Alwan	Disdik	47
48	Rina Rosdiana	DisKOMINFO	48
49	Yanwanti D	- - -	49
50	Habibah	- - -	50
51	Mikha. R. S	Disrepus	51
52	M. Isa Koswara	Kec. Bojong	52
53	H. Manduh	Kec. Manung	53
54	LI ISTADIWINATA	DEURP	54
55	Roehmawati	Din. rospzn	55
56	Surwati	BLAD	56
57	Netty	"	57
58	Firmanayah	"	58
59	Qori	"	59
60	M. Bagus	"	60
61	Dimas	"	61
62	M. Nurcahya	BKAD	62
63	AI SAIDATI	Setda	63
64	Kania	Disdik	64
65	Ade Alimul	Danlar	65
66	Agus P	Damkar	66
67	Kafiswara	Damkar	67

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
68	Dari Cahya	Dokter	68
69	Ardi Widi	Disnaker trans	69
70	Deri. san	Wanayasa.	70
71	Ro. Moh Vadi. R	Disdik	71
72	Dade Hermawan	Muhammadiyah	72
73	Fahri S	Disdik	73
74	Subachri	Kec. P. Solan	74
75	Ruzul F	Kec. Cebada	75
76	Zubaidah ch	Disdik	76
77	Dewi N	Disdik	77
78	Shela		78
79	ILYAS	Humas	79
80	Sergio	Protokol	80
81	Hari	Situan	81
82	Edi gunardi	DKUPP	82
83	Daryun	Kris Transis/Kec. At	83
84	Dian	Humas	84
85	Rio -	4	85
86	Ketika	4	86
87	Hikmah	4	87
88	Kemari	4	88
89	Sumi	4	89
90	Sri	4	90

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
91	Lani -	Humas	91 Bm
92	Vivi	"	92 H
93	Tanti Pozi	Disdik	93
94	Ady		94
95	Rini	Sekwan	95
96	Hisa	"	96
97	Putri	"	97
98	Meep	"	98
99	ahma'	"	99
100	ahmal	"	100
101			101
102			102
103			103
104			104
105			105
106			106
107			107
108			108
109			109
110			110
111			111
112			112
113			113
114			114

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN	
115				115
116			116	
117				117
118			118	
119				119
120			120	
121				121
122			122	
123				123
124			124	
125				125
126			126	
127				127
128			128	
129				129
130			130	
131				121
132			132	
133				133
134			134	
135				125
136			136	

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
137			137
138			138
139			139
140			140
141			141
142			142
143			143
144			144
145			145
146			146
147			147
148			148
149			149
150			150
151			151
152			152
153			153
154			154
155			155
156			156
157			157
158			158
159			159

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
160			160
161			161
162			162
163			163
164			164
165			165
166			166
167			167
168			168
169			169
170			170
171			171
172			172
173			173
174			174
175			175
176			176
177			177
178			178
179			179
180			180
181			181
182			182
183			183
184			184
185			185
186			186
187			187

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
188			188
189			189
190			190
191			191
192			192
193			193
194			194
195			195
196			196
197			197
198			198
199			199
200			200
201			201
202			202
203			203
204			204
205			205
206			206
207			207
208			208
209			209
210			210
211			211
212			212
213			213
214			214
215			215



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152
Telepon: (0264) 207908 Faksimile: (0264) 211229

Laman : <https://dprd.purwakartakab.go.id/> pos-el: sekretariatdprd.purwakartakab@gmail.com

Purwakarta, 08 Juli 2025

Nomor : 100.3.2/ 597/DPRD
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Sms Center Undangan Rapat Paripurna DPRD

Yth. Sdr. Bupati Purwakarta

di
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka Pembicaraan Tk. II Persetujuan Bersama terhadap Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta TA. 2024, dengan ini kami mengundang Para Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon III untuk hadir dalam Rapat Paripurna yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu / 09 Juli 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Purwakarta
Pakaian : PSR
Acara : 1. Pembukaan
2. Laporan Badan Anggaran
3. Pendapat Fraksi-Fraksi
4. Keputusan;
5. Pendapat Akhir Bupati;
6. Do'a / Penutup;

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terimakasih.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purwakarta
Ketua,



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

SRI PUJI UTAMI

Catatan :

1. Protokol Kesehatan ditetapkan
2. Pakaian :
 - Sipil : PSR;
 - TNI / POLRI : Menyesuaikan;
 - Organisasi : Seragam Organisasi.
3. Dimohon hadir 15 menit sebelum acara dimulai.

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152
Telepon: (0264) 207908 Faksimile: (0264) 211229

Laman : <https://dprd.purwakartakab.go.id/> pos-el: sekretariatdprd.purwakartakab@gmail.com

Purwakarta, 08 Juli 2025

Nomor : 100.3.2/ 595 /DPRD
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Paripurna DPRD

Yth. Sdr. Wakil Bupati Purwakarta

di
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka Pembicaraan Tk. II Persetujuan Bersama terhadap Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta TA. 2024, dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir dalam Rapat Paripurna yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu / 09 Juli 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Purwakarta
Pakaian : PSR
Acara : 1. Pembukaan
2. Laporan Badan Anggaran
3. Pendapat Fraksi-Fraksi
4. Keputusan;
5. Pendapat Akhir Bupati;
6. Do'a / Penutup;

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terimakasih.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purwakarta
Ketua,



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

SRI PUJI UTAMI

Catatan :
Dimohon hadir 15 menit sebelum acara dimulai;

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152
Telepon: (0264) 207908 Faksimile: (0264) 211229

Laman : <https://dprd.purwakartakab.go.id/> pos-el: sekretariatdprd.purwakartakab@gmail.com

Purwakarta, 08 Juli 2025

Nomor : 100.3.2/ 593 /DPRD
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Paripurna DPRD

Yth. Para Anggota DPRD
Kabupaten Purwakarta
di
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka Pembicaraan Tk. II Persetujuan Bersama terhadap Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta TA. 2024, dengan ini kami mengundang Saudara, untuk hadir dalam Rapat Paripurna yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu / 09 Juli 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Purwakarta
Pakaian : PSR
Acara : 1. Pembukaan
2. Laporan Badan Anggaran
3. Pendapat Fraksi-Fraksi
4. Keputusan;
5. Pendapat Akhir Bupati;
6. Do'a / Penutup;

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terimakasih.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purwakarta
Ketua,



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

SRI PUJI UTAMI

Catatan :
Dimohon hadir 15 menit sebelum acara dimulai;

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152
Telepon: (0264) 207908 Faksimile: (0264) 211229

Laman : <https://dprd.purwakartakab.go.id/> pos-el: sekretariatdprd.purwakartakab@gmail.com

Purwakarta, 08 Juli 2025

Nomor : 100.3.2/ 594 /DPRD
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Paripurna DPRD

Yth. Sdr. Bupati Purwakarta

di
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka Pembicaraan Tk. II Persetujuan Bersama terhadap Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta TA. 2024, dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir sekaligus menyampaikan Pendapat Akhir Bupati dalam Rapat Paripurna yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu / 09 Juli 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Purwakarta
Pakaian : PSR
Acara : 1. Pembukaan
2. Laporan Badan Anggaran
3. Pendapat Fraksi-Fraksi
4. Keputusan;
5. Pendapat Akhir Bupati;
6. Do'a / Penutup;

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terimakasih.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purwakarta
Ketua,



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

SRI PUJI UTAMI

Catatan :
Dimohon hadir 15 menit sebelum acara dimulai;

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152
Telepon: (0264) 207908 Faksimile: (0264) 211229

Laman : <https://dprd.purwakartakab.go.id/> pos-el: sekretariatdprd.purwakartakab@gmail.com

Purwakarta, 08 Juli 2025

Nomor : 100.3.2/ 596 /DPRD
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Paripurna DPRD

Yth. _____

di
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka Pembicaraan Tk. II Persetujuan Bersama terhadap Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta TA. 2024, dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir dalam Rapat Paripurna yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu / 09 Juli 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Purwakarta
Pakaian : PSR
Acara : 1. Pembukaan
2. Laporan Badan Anggaran
3. Pendapat Fraksi-Fraksi
4. Keputusan;
5. Pendapat Akhir Bupati;
6. Do'a / Penutup;

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terimakasih.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purwakarta
Ketua,



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

SRI PUJI UTAMI

Catatan :

1. Protokol Kesehatan ditetapkan
2. Pakaian :
 - Sipil : PSR;
 - TNI / POLRI : Menyesuaikan;
 - Organisasi : Seragam Organisasi.
3. Dimohon hadir 15 menit sebelum acara dimulai.

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA**

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0264) 207908 Purwakarta

**RISALAH : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA PEMBICARAAN TK II DALAM
RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP
RAPERDA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024.**

HARI : RABU;

TANGGAL : 09 JULI 2024

PUKUL : 13.30 WIB;

**TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA.**

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SAMPURASUN.....

- YTH. WAKIL BUPATI PURWAKARTA;
- YTH. UNSUR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA YANG DIANTARANYA :
- YTH. KEPALA KEPOLISIAN RESORT PURWAKARTA;
- YTH. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA;
- YTH. KOMANDAN DISTRIK MILITER 0619 PURWAKARTA;
- YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA;
- YTH. KEPALA KEMENTRIAN AGAMA RI KAB. PURWAKARTA;
- YTH. KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA PURWAKARTA;
- YTH. KOMANDAN RESIMEN ARMED 1/SY/I KOSTRAD;
- YTH. DAN YON ARMED 9 PASOPATI;
- YTH. KOMANDAN SUBDENPOM III PURWAKARTA;
- YTH. KEPALA LAPAS PURWAKARTA;
- YTH. KETUA KPU KABUPATEN PURWAKARTA;
- YTH. SEKRETARIS DAERAH DAN PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. KEPALA BUMN DAN BUMD YANG ADA DI KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. PARA KEPALA PEJABAT PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. PARA CAMAT DAN PARA KEPALA DESA;

- PARA TOKOH MASYARAKAT, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, KETUA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PARA INSAN PERS YANG BERBAHAGIA;
- PARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA YANG KAMI BANGGAKAN;
- SERTA TAMU UNDANGAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI..

PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT YANG MANA TELAH MEMBERIKAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA KEPADA KITA SEHINGGA BISA BERKUMPUL DALAM KEADAAN SEHAT PADA HARI INI.

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA TERCURAH BAGI NABI BESAR MUHAMMAD SAW BESERTA KELUARGA DAN PARA SAHABATNYA.

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI.

HARI INI KITA BERKUMPUL UNTUK MENGIKUTI PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA PEMBICARAAN TK II DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

SELANJUTNYA PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA SESUAI LAPORAN DARI PIHAK SEKRETARIAT DEWAN, BAHWA PARA ANGGOTA DEWAN TELAH HADIR, SEBANYAK 38 (TIGAPULUH DELAPAN) ORANG.

BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 170 AYAT (1) HURUF B PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB, YANG MENGATUR BAHWA RAPAT PARIPURNA UNTUK MENETAPKAN PERATURAN DAERAH, MEMENUHI QUORUM APABILA DIHADIRI OLEH PALING SEDIKIT $\frac{2}{3}$ (DUA PERTIGA) DARI JUMLAH KESELURUHAN ANGGOTA DEWAN.

DENGAN DEMIKIAN MAKA , RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI DINYATAKAN TELAH MEMENUHI QUORUM DAN DAPAT DILAKSANAKAN.

DIAWALI UCAPAN "BISMILLAHIRROHMANIRROHIM" RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA , PADA HARI INI RABU TANGGAL 09 JULI 2025, KAMI NYATAKAN :

===== DI BUKA =====

===== KETUK PALU 1 KALI =====

BERIKUTNYA KAMI BERITAHUKAN , BAHWA SUSUNAN ACARA RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN;
2. LAPORAN BADAN ANGGARAN;
3. PENDAPAT FRAKSI – FRAKSI;
4. KEPUTUSAN;

5. PENDAPAT AKHIR BUPATI; DAN
6. DO'A / PENUTUP.

1. PEMBUKAAN.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI

SEBELUM MEMULAI ACARA PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI KAMI SAMPAIKAN BAHWA SAUDARA BUPATI PURWAKARTA BERHALANG HADIR DAN TELAH MENYAMPAIKAN SURAT KUASA NOMOR: 100.3.5.2/1159-UMUM/2025 TANGGAL 08 JULI 2025 BAHWA BUPATI PURWAKARTA MEMBERIKAN KUASA KEPADA WAKIL BUPATI PURWAKARTA UNTUK MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA TK. II PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP PENETAPAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA HARI INI.

SELANJUTNYA SEBAGAIMANA KITA MAKLUMI BERSAMA, BAHWA PELAKSANAAN PARIPURNA INI, ADALAH MERUPAKAN TAHAPAN AKHIR DARI SERANGKAIAN PEMBAHASAN DALAM RAPAT-RAPAT DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024. NAMUN DEMIKIAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB, BAHWA RAPERDA YANG BERASAL DARI KEPALA DAERAH DIBAHAS OLEH DPRD DAN KEPALA DAERAH UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN BERSAMA.

SELANJUTNYA MENGENAI PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DILAKSANAKAN OLEH BADAN ANGGARAN BERSAMA DENGAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT YANG MANA BADAN ANGGARAN DAN DPRD BEKERJA SAMA DENGAN PIHAK PEMERINTAH DAERAH, TELAH DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DALAM MENYELESAIKAN PEMBAHASAN NYA TERHADAP RAPERDA DIMAKSUD.

2. LAPORAN BADAN ANGGARAN.

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

SEBAGAIMANA TELAH KAMI UTARAKAN TADI, BAHWA PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 DIBAHAS OLEH BADAN ANGGARAN MAKA LAPORAN HASIL PEMBAHASAN AKAN DISAMPAIKAN OLEH PERWAKILAN DARI BADAN ANGGARAN, KAMI PERSILAHKAN_____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. DIAS RUKMANA PRAJA, S.E. YANG TELAH BERKENAN MENYAMPAIKAN LAPORANNYA

3. PENDAPAT FRAKSI - FRAKSI

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI

BERIKUTNYA KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KETIGA YAITU PENDAPAT FRAKSI - FRAKSI :

UNTUK KESEMPATAN PERTAMA KAMI PERSILAHKAN KEPADA JURU BICARA DARI **FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)** UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. RICKY SYAMSUL FAUZI, S.H. YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KEDUA : KEPADA JURU BICARA DARI **FRAKSI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)**, UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA, KAMI PERSILAHKAN

TERIMAKASIH KEPADA SDR. H. ELAN SOFYAN, S.M. ATAS PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KETIGA : KEPADA JURU BICARA DARI **FRAKSI NASDEM**, UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA, KAMI PERSILAHKAN

TERIMAKASIH KEPADA SDR. DENISA WULANDARI, S.M. ATAS PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KEEMPAT : KEPADA **FRAKSI PDI-PERJUANGAN**, UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA, KAMI PERSILAHKAN.

TERIMAKASIH KEPADA SDR. NOVITA PURWANTI ATAS PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KELIMA : KEPADA JURU BICARA DARI **FRAKSI PKB** UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. AGUS MAHARDIKA YANG TELAH
MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KEENAM : KEPADA **FRAKSI PKS** UNTUK MENYAMPAIKAN
PENDAPAT FRAKSINYA, KAMI
PERSILAHKAN, _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. DIDIN HENDRAWAN, S.E. PENYAMPAIAN
PENDAPAT FRAKSINYA.

KETUJUH : KEPADA **FRAKSI DEMOKRAT DAN PAN (DEPAN)**
UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA,
DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. H. AMING YANG TELAH MENYAMPAIKAN
PENDAPAT FRAKSINYA.

TERAKHIR : KEPADA **FRAKSI PPP DAN HANURA (PERHATIAN)**
UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA,
DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. YANTHI NURHAYATI, S.Pd.I YANG TELAH
MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA.

4. KEPUTUSAN.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

TELAH KITA DENGARKAN BERSAMA PENDAPAT DARI FRAKSI-
FRAKSI YANG DISAMPAIKAN OLEH JURU BICARANYA MASING-MASING.

MESKIPUN TERDAPAT SARAN DAN MASUKAN-MASUKAN, TETAPI MENURUT HEMAT KAMI PADA PRINSIPNYA SEMUA FRAKSI DAPAT MENERIMA DAN MENYETUJUI RAPERDA YANG KITA BICARAKAN PADA HARI INI.

BAIKLAH KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KE EMPAT, YAITU KEPUTUSAN.

SESUAI KETENTUAN PASAL 6 AYAT (4) HURUF a ANGKA 2 PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB, MAKA PADA ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN INI KAMI AKAN MEMINTA PERSETUJUAN, BAIK DARI PARA ANGGOTA DEWAN MAUPUN DARI SDR. BUPATI YANG HARI INI DIWAKILI OLEH WAKIL BUPATI.

DALAM MELAKSANAKAN ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN INI, KAMI AKAN LANGSUNG BERTANYA KEPADA PARA ANGGOTA DEWAN DAN SDR. BUPATI YANG DIWAKILI OLEH WAKIL BUPATI.

BAHWA RAPERDA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 HASIL PEMBAHASAN YANG MANA TELAH DILAPORKAN OLEH BADAN ANGGARAN, APAKAH SAUDARA-SAUDARA ANGGOTA DEWAN DAN SDR. BUPATI SETUJU?

PARA ANGGOTA DEWAN DAN BUPATI

_____SETUJU _____

===== KETUK PALU SATU KALI =====

TERIMAKASIH ATAS PERSETUJUANNYA.

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

SESUAI KETENTUAN DALAM PASAL 22 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, MAKA PERSETUJUAN DALAM RAPAT PARIPURNA INI, AKAN DITUANGKAN DALAM BENTUK KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA DPRD DAN BUPATI.

5. PENDAPAT AKHIR BUPATI.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

BAIKLAH KITA LANJUTKAN PADA ACARA BERIKUTNYA YAITU PENDAPAT AKHIR BUPATI. KEPADA SDR. WAKIL BUPATI UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPATNYA, DIPERSILAHKAN_____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. WAKIL BUPATI YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPATNYA.

6. DO`A PENUTUP

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI.

SAMPAILAH PADA ACARA YANG TERAKHIR YAITU DO`A/PENUTUP.

KEPADA SDR. ABDUL MUIZ KAMI MOHON KESEDIAANNYA UNTUK MEMIMPIN PEMBACAAN DO`A, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH, SEMOGA DO`A KITA SEKALIAN DIKABULKAN OLEH ALLAH SWT. AMIN.

KAMI SELAKU PIMPINAN DEWAN MENGUCAPKAN TERIMAKASIH YANG SETINGGI-TINGGINYA, BAIK KEPADA SDR. BUPATI DAN WAKIL BUPATI,

BESERTA JAJARANNYA, MAUPUN KEPADA PARA ANGGOTA DEWAN, JAJARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWAKARTA DAN SELURUH TAMU UNDANGAN YANG TELAH HADIR DALAM RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI.

SEMOGA KITA SEMUA DIBERIKAN KEKUATAN OLEH ALLAH SWT. AMIIN AAMIIN YA ROBBAL ALAMIN.

AKHIR KATA DENGAN MENGUCAPKAN.....

"ALHAMDULILLAHIROBIL'ALAMIN"

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI RABU TANGGAL 09 JULI 2025, KAMI NYATAKAN :

===== DI TUTUP =====

==== KETUK PALU 3 KALI ====

BILLAHITAUFIK WAL HIDAYAH

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**



SEKRETARIS

RUDI HARTONO, S.AP., M.M



KETUA,

SRI PUJI UTAMI

BERITA ACARA

NOMOR : 000.5.7/26/DPRD/2025

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA PEMBICARAAN TK II DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP PENETAPAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan bulan Juli tahun Duaribu Duapuluh Lima (09-07-2025), telah dilaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka (Pembicaraan Tingkat II) dalam rangka Persetujuan bersama terhadap Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

I. Pembukaan

Rapat dilaksanakan secara tatap muka dimulai pukul 14.40 WIB dan selesai pada pukul 15.55 WIB sesuai dengan waktu yang dijadwalkan dalam surat undangan nomor 100.3.2/597/DPRD Tanggal 08 Juli 2025 Perihal Undangan Rapat Paripurna DPRD, dan dihadiri oleh 38 (tigapuluh delapan) orang.

II. Pembahasan

Rapat Dipimpin dan dibuka Oleh Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Yth. Sri Puji Utami dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Badan Anggaran;
3. Pendapat Akhir Fraksi;
4. Keputusan;
5. Pendapat Akhir Bupati; dan
6. Do'a / Penutup.

1. Pembukaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, bahwa Raperda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapat persetujuan

Bersama dalam hal ini Badan Anggaran telah bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah dan telah melaksanakan tugas dalam menyelesaikan pembahasannya terhadap raperda dimaksud.

Kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pasal 6 ayat 4 huruf A yang menyebutkan bahwa pembicaraan Tingkat II meliputi pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan menyampaikan laporan Badan Anggaran, Pendapat Fraksi, Persetujuan secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna serta Pendapat akhir Bupati.

2. Laporan Pansus Badan Anggaran

Laporan Badan Anggaran disampaikan oleh Dias Rukmana Praja, S.E.

3. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi

- Juru Bicara dari Fraksi Gerindra Sdr. Ricky Syamsul Fauzi, S.H.;
- Juru Bicara dari Fraksi Golkar Sdr. H. Elan Sofyan, S.M. diserahkan langsung ke Pimpinan Rapat tanpa dibacakan;
- Juru Bicara dari Fraksi Nasdem, Sdr. Denisa Wulandari, S.M.;
- Juru Bicara dari Fraksi PDI-Perjuangan Sdr. Novita Purwanti diserahkan langsung ke Pimpinan Rapat tanpa dibacakan;
- Juru Bicara dari Fraksi PKB Sdr. Agus Mahardika;
- Juru Bicara dari Fraksi PKS Sdr. Didin Hendrawan, S.E.;
- Juru Bicara dari Fraksi DEPAN Sdr. H. Aming diserahkan langsung ke Pimpinan Rapat tanpa dibacakan;
- Juru Bicara dari Fraksi PERHATIAN Sdri. Yanthi Nurhayati, S.Pd.I diserahkan langsung ke Pimpinan Rapat tanpa dibacakan.

4. Keputusan

Sesuai ketentuan pasal 6 ayat (4) huruf a angka 2 Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, maka pada acara pengambilan keputusan pimpinan meminta persetujuan, baik dari para anggota dewan maupun dari Bupati dengan bertanya kepada para anggota dewan dan Bupati bahwa raperda hasil pembahasan dalam rapat-rapat DPRD sebagaimana telah

dilaporkan oleh Badan Anggaran, apakah anggota dewan dan saudara Bupati yang diwakili oleh Wakil Bupati setuju ? para anggota dewan dan Bupati menyetujui, ditandai dengan ketuk palu satu kali.

5. Pendapat Akhir Bupati

Disampaikan oleh Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin.

6. Doa Penutup

Dibacakan oleh Sdr. Abdul Muis.

III. Kesimpulan

Selanjutnya Sesuai Ketentuan Dalam Pasal 94 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Tertib DPRD, Maka Persetujuan Dalam Rapat Paripurna, akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama Antara DPRD Dan Bupati.

Demikian Berita acara ini dibuat dan di tandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

SEKRETARIS DPRD



RUDI HARTONO, S.AP., M.M.

KETUA DPRD



SRI PUJI UTAMI

**LAPORAN BADAN ANGGARAN
TERHADAP PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD, TANGGAL 09 JULI 2024**

*BISSMILLAHIRRAHMANIRRHIM
ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.*

YTH. PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA;
YTH. BUPATI PURWAKARTA;
YTH. WAKIL BUPATI PURWAKARTA;
YTH. PARA UNSUR FORKOPIMDA KABUPATEN PURWAKARTA;
YTH. PARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA SERTA PARA
UNDANGAN YANG KAMI MULIAKAN.

TERIRING RASA SYUKUR YANG TAK TERHINGGA KE HADLIRAT ILLAHI ROBBI ATAS LIMPAHAN NIKMAT DAN ROHMATNYA, PADA HARI INI KITA DAPAT MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT II, PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024, SHOLAWAT DAN SALAM SEMOGA SELALU TERCURAHKAN KEPADA BAGINDA NABIYULLOH MUHAMMAD SAW KEPADA PARA SAHABAT, KELUARGA NABI, DAN KEPADA KITA SEMUA YANG SENANTIASA ISTIKOMAH DIJALANNYA.

TAK LUPA PADA KESEMPATAN INI PULA KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN RAPAT, YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN HASIL KERJA BADAN ANGGARAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

RAPAT DEWAN YANG BERBAHAGIA,

BADAN ANGGARAN TELAH MENERIMA BERKAS RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2024 PADA 13 JUNI 2025 UNTUK DIBAHAS LEBIH LANJUT PADA RAPAT BADAN ANGGARAN BERSAMA PEMERINTAH DAERAH.

ADAPUN BERKAS YANG DITERIMA BADAN ANGGARAN DIMAKSUD TERDIRI ATAS :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 YANG MEMUAT ANTARA LAIN :
 - LAPORAN REALISASI ANGGARAN;
 - LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH;
 - LAPORAN OPERASIONAL.
 - LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS;
 - NERACA ;
 - LAPORAN ARUS KAS, DAN ;
 - CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ;
2. PENJELASAN BUPATI DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD, TANGGAL 13 JUNI 2025;
3. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI, DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD TANGGAL 13 JUNI 2024;
4. JAWABAN BUPATI DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD TANGGAL 13 JUNI 2024;

SESUAI JADWAL YANG DITETAPKAN, RAPERDA TERSEBUT TELAH DIBAHAS SECARA SEKSAMA DALAM RAPAT RAPAT BADAN ANGGARAN BAIK INTERNAL MAUPUN BERSAMA-SAMA DENGAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH, SERTA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PURWAKARTA.

RAPAT DEWAN YANG BERBAHAGIA,

BADAN ANGGARAN MENYAMPAIKAN APRESIASI YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA PEMERINTAH DAERAH ATAS TERLAKSANANYA PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SECARA TEPAT WAKTU, SEBAGAI WUJUD KETAATAN TERHADAP UNDANG-UNDANGAN NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG – UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DALAM BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TELAH DISESUAIKAN DENGAN HASIL AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA BARAT, SEHINGGA TELAH MEMENUHI ASPEK NORMATIF, KEPATUTAN DAN KEWAJARAN. TERLEBIH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TELAH DIANUGERAHI KEMBALI PENGHARGAAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) KE 10 KALINYA SECARA BERTURUT-TURUT, SEHINGGA HAL TERSEBUT SANGAT MEMPENGARUHI DASAR PENYUSUNAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2024.

DALAM PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PENDAPATAN TEREALISASI SEBESAR RP. 2.548.811.674.513 YANG MERUPAKAN RINCIAN DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENDAPATAN TRANSFER, DAN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH. SEDANGKAN BELANJA DAERAH TEREALISASI SEBESAR RP. 2.554.467.819.500 YANG TERDIRI DARI BELANJA OPERASIONAL, BELANJA MODAL, BELANJA TAK TERDUGA, DAN BELANJA TRANSFER. PADA PEMBIAYAAN DAERAH TEREALISASI SEBESAR RP. 26.595.792.674 YANG TERDIRI DARI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DIKURANGI PENGELUARAN PEMBIAYAAN.

SELANJUTNYA, HASIL KERJA BADAN ANGGARAN ATAS RAPERDA TERSEBUT DI ATAS, BADAN ANGGARAN MEMBERIKAN REKOMENDASI SEBAGAI BERIKUT :

1. BAHWA PADA TAHUN ANGGARAN 2024 INI KABUPATEN PURWAKARTA DIPIMPIN OLEH PJ. BUPATI DI MASA TRANSISI DARI KEPALA DAERAH SEBELUMNINYA KE KEPALA DAERAH TERPILIH HASIL PEMILUKADA NOVEMBER 2024. SEHINGGA PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PURWAKARTA ARAH KEBIJAKANNYA TERGANTUNG PADA KEBIJAKAN PJ. BUPATI UNTUK MENCIPTAKAN KONDUSIFITAS SELAMA MASA TRANSISI;
2. BAHWA MASIH TERDAPAT TEMUAN PENGELOLAAN KAS DAN PENGANGGARAN PENDAPATAN DAERAH BELUM MEMADAI DAN ADA KESALAHAN PENGANGGARAN BELANJA PADA BEBERAPA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. INI MENANDAKAN BELUM MATANGNYA PROSES PERENCANAAN YANG DILAKUKAN OLEH TIM PENYUSUN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PERENCANA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PERLU PERHATIAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH AGAR KESALAHAN INI TIDAK BERULANG;
3. TERKAIT DENGAN PENDAPATAN MASIH BELUM MEMADAINYA PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DILIHAT DARI EFEKTIFITAS TAPPING BOX YANG MASIH KURANG OPTIMAL DIKARENAKAN JUMLAH TAPPING BOX BELUM MEMADAI, SELAIN ITU PERLU VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PERPAJAKAN YANG DITERIMA OLEH BAPENDA. SEHINGGA PENERIMAAN PAJAK DAERAH DARI BEBERAPA OBJEK PAJAK BISA OPTIMAL;

4. TERKAIT DENGAN REALISASI BELANJA BAHAN BAKAR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERLU LEBIH OPTIMAL DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN ANGGARANNYA DAN LEBIH CERMAT DALAM MEMVERIFIKASI BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS;
5. TERKAIT PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN MINIMAL, MAKA PEMERINTAH DAERAH HARUS LEBIH OPTIMAL DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PERANGKAT DAERAH;
6. ADANYA TEMUAN REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TIDAK SESUAI PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BOS. MAKA KEPALA DINAS PENDIDIKAN HARUS LEBIH OPTIMAL MENGENDALIKAN PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI BELANJA PADA SEKOLAH;
7. TERAKHIR TERKAIT DENGAN ASET YAITU PENGELOLAAN PERSEDIAAN BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/ PIHAK LAIN BELUM TERTIB DAN PENATAUSAHAAN SERTA PENGAMANAN ASET TETAP BELUM TERTIB SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH MELALUI PERANGKAT DAERAH TERKAIT MEMBUAT BERITA ACARA SERAH TERIMA GEDUNG DAN BANGUNAN KEPADA MASING-MASING INSTANSI PENERIMA BARANG SERTA PENGELOLAAN BARANG LEBIH OPTIMAL DALAM MELAKSANAKAN KOORDINASI ATAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, KHUSUSNYA TERKAIT PENATAUSAHAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH.

ATAS REKOMENDASI TERSEBUT MAKA PEMERINTAH DAERAH DIHARAPKAN LEBIH MEMPERHATIKAN SELURUH PROSES PENGANGGARAN HINGGA SAMPAI PADA PERTANGGUNGJAWABAN YANG DIDALAMNYA MENCAKUP PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SEHINGGA DAPAT MEMINIMALISIR KESALAHAN – KESALAHAN YANG MUNGKIN AKAN TERJADI. RAPERDA TENTANG PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 INI MERUPAKAN HASIL DARI AUDIT BPK RI PERWAKILAN JAWA BARAT DAN SUDAH ADA OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAS PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TETAPI MASIH ADA BEBERAPA TEMUAN YANG SEYOGYANYA SUDAH DISELESAIKAN OLEH PERANGKAT DAERAH MASING – MASING. TETAPI INI MENJADI CATATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH AGAR KESALAHAN PADA TAHUN ANGGARAN 2024 INI TIDAK TERULANG PADA TAHUN ANGGARAN 2025. KAMI MENYARANKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA MEMPERHATIKAN REKOMENDASI YANG TELAH DISAMPAIKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANG DAERAH.

DEMIKIAN LAPORAN BADAN ANGGARAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, UNTUK MENJADI BAHAN EVALUASI DAN PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI MASA YANG AKAN DATANG DAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DEWAN DALAM RAPAT PARIPURNA HARI INI.

*BILLAHITTAUFIQ WAL HIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.*

PURWAKARTA, 09 JULI 2025

**BADAN ANGGARAN DPRD
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

SEKRETARIS



RUDI HARTONO, S.AP., M.M.

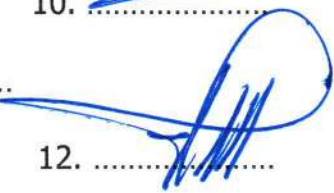
ANGGOTA :

1. SAID ALI AZMI
2. ZUSYEF GUSNAWAN, S.E.
3. H. TEDDY NANDUNG H, S.E.
4. RICKY SYAMSUL FAUZI, S.H.
5. Dr. KARWITA, S.H., M.H.
6. H. ELAN SOFYAN, S.M.
7. KAMAL, S.S.
8. H. AHMAD SANUSI, S.M.
9. H. ELTHON BRAMEISTA G, S.H.
10. DEVI MUTIARASARI
11. ASTRI NOVITASARI
12. WARSENO, S.E.
13. UJANG ROSADI
14. CECENG ABDUL QODIR, S.Pd,I

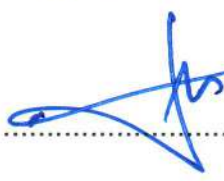
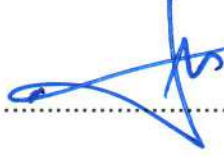
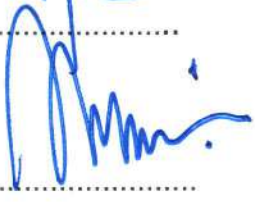
WAKIL KETUA



DIAS MUKMANA PRAJA, SE

1. 
2.
3. 
4. 
5.
6. 
7.
8. 
9. 
10. 
11.
12. 
13.
14. 

15. H. ALAIKASSALAM, S.H.i
16. DEDI JUHARI
17. DIDIN HENDRAWAN, S.E
18. DULNASIR, S.H., M.H.
19. H. AMING
20. H. ASEP ABDULOH
21. ATO RUKMANA

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21.

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT II PEMBAHASAN
RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2024
TANGGAL, 09 JULI 2025

BISMILLAHIRROHMANIROHIM

*Hamdan Wazkron Lilah' sholeh nasir
ala Rasulullah*

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULOHI WABAROKATUH

SAMPURASUN...

Tang kurni Hormat

YTH. SDR. PIMPINAN RAPAT;

YTH. BUPATI PURWAKARTA & WAKIL BUPATI PURWAKARTA;

YTH. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN PARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. PARA UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. PARA PEJABAT PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. PARA ULAMA, PIMPINAN ORGANISASI SOSIAL MASYARAKAT, LSM, INSAN PERS, CAMAT,

LURAH DAN KEPALA DESA SERTA HADIRIN TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

SALAM INDONESIA RAYA,

SEGALA PUJI BAGI ALLAH, TUHAN SEMESTA ALAM. DENGAN RAHMAT-NYA KITA DITAKDIRKAN MENJADI BANGSA INDONESIA DENGAN BERAGAM KEMAJEMUKAN DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA. DENGAN HARAPAN SEMOGA KITA MENJADI BANGSA YANG MAJU, KHUSUSNYA UNTUK KABUPATEN YANG KITA CINTAI INI. *ALHAMDULILLAH* KITA BERSYUKUR KARENA PADA KESEMPATAN KALI INI KITA DAPAT HADIR DALAM SIDANG PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT II PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

SHOLAWAT SERTA SALAM SENANTIASA KITA HATURKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI AGUNG NABI MUHAMMAD S.A.W YANG TELAH MEMBAWA CAHAYA ILMU PENGETAHUAN DAN PERADABAN KEPADA KITA SEMUA. SEMOGA KITA MENDAPATKAN *SYAFAATUL Udzma* DI *YAMULIL AKHIR* KELAK. *AAMIIN YA ALLAH YA RABB'AL 'ALAMIIN*.

HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI

KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN RAPAT SERTA ATAS KESEMPATAN YANG DIBERIKAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI GERINDRA MENGENAI PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024. SELAIN ITU JUGA KAMI HATURKAN UCAPAN TERIMA KASIH DAN APRESIASI KEPADA BADAN ANGGARAN YANG TELAH MALAKSANAKAN TUGASNYA DALAM PEMBAHASAN RAPERDA PPA APBD TAHUN ANGGARAN 2024.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA YANG BERBAHAGIA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) MEMPUNYAI PERAN STRATEGIS UNTUK MENDUKUNG AKTIFITAS PEMERINTAH DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA, APBD JUGA MERUPAKAN INSTRUMEN TEKNIS DARI IDEALISME PEMBANGUNAN YANG INGIN DI WUJUDKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA YANG MUARANYA ADALAH MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. ADANYA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PADA SUBSTANSINYA ADALAH UNTUK MELAKUKAN KOREKSI PENYESUAIAN KONDISI-KONDISI TERKINI YANG ADA DI TENGAH MASYARAKAT SECARA MAKRO MAUPUN MIKRO SEHINGGA DAPAT SECARA TEPAT MAMPU MEMBERIKAN MANFAAT DAN MEMBERIKAN SOLUSI ATAS KEBUTUHAN MASYARAKAT KABUPATEN PURWAKARTA KEDEPANNYA.

SECARA NORMATIF, MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD MERUPAKAN SUATU RANGKAIAN PROSEDUR PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH INSTANSI-INSTANSI YANG MEMILIKI FUNGSI PENGAWASAN ANGGARAN, ANTARA LAIN BPK, KEMENDAGRI, DAN DPRD. DALAM KONTEKS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD MERUPAKAN BENTUK PENGAWASAN DEMI TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BAIK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG SAYA HORMATI

BAHWA RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2024 MERUPAKAN RANGKUMAN DATA DARI SELURUH KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD). PENGELOLAAN DI TINGKAT SKPD SANGAT MENENTUKAN KUALITAS DAN AKURASI DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN YANG DIAJUKAN MAKA UNTUK ITU KAMI FRAKSI GERINDRA MENYAMPAIKAN CATATAN, SARAN DAN REKOMENDASI SEBAGAI BERIKUT :

1. PENGUATAN KAPASITAS FISKAL DAERAH, EFEKTIVITAS BELANJA DAERAH, PEMANFAATAN SILPA, OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET, PERBAIKAN MANAJEMEN KEUANGAN, KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN, AKSELERASI REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK, DAN SINERGI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF;
2. PENTINGNYA PENINGKATAN STRUKTUR EKONOMI, PENGUATAN KEDAULATAN PANGAN, DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN RAKYAT;
3. APBD HARUS DIRANCANG DAN DIJALANKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEPENTINGAN RAKYAT, KHUSUSNYA DALAM HAL PENINGKATAN KESEJAHTERAAN, PEMERATAAN PEMBANGUNAN, DAN PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS;
4. PENTINGNYA PENINGKATAN KUALITAS SDM MELALUI PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENINGKATAN KETERAMPILAN, SEHINGGA DAPAT MENJADI TENAGA KERJA YANG KOMPETEN DAN MAMPU BERSAING DI ERA GLOBAL;
5. PADA SEKTOR PENDAPATAN MELULUI PAJAK KAMI FRAKSI GERINDRA KONSISTEN MENYOROTI AGAR LEBIH RASIONAL DALAM MENENTUKAN TARGET.

DITAMBAH LAGI DENGAN PENYIAPAN SISTEM BAIK SARANA MAUPUN SDM DALAM RANGKA MENGENJOT PENDAPATAN AGAR SESUAI DENGAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN;

6. TERHADAP REKOMENDASI DARI BADAN ANGGARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN, MAKA FRAKSI GERINDRA MENEKANKAN ADANYA *ACTION PLAN* AGAR ADANYA PROGRES PENYELESAIAN PERBAIKAN PENGELOAAN ANGGARAN DIMASA YANG AKAN DATANG;
7. AGAR PEMERINTAH DAERAH MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN, MEMPERBAIKI RASIO GINI, MENINGKATKAN KUALITAS, DAN DAYA SAING SDM YANG DITUNJUKKAN DENGAN PENINGKATAN NILAI IPM;
8. KAMI MENDORONG AGAR PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BERKOMITMEN UNTUK TERUS MEMPERKUAT TATA KELOLA KEUANGAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*), SEKALIGUS MENJAWAB AMANAT KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL.

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI,

KAMI FRAKSI GERINDRA BERPENDAPAT BAHWA PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA PERLU MERESPON SECARA BIJAK DAN SERIUS SETIAP CATATAN DAN MASUKAN YANG DISAMPAIKAN OLEH DPRD UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH. BERBAGAI CATATAN, KRITIK, SARAN DAN PENDAPAT YANG TELAH KAMI SAMPAIKAN BAIK DALAM RAPAT-RAPAT YANG TELAH DILAKSANAKAN ATAU PADA KESEMPATAN KALI INI KIRANYA MENJADI PERHATIAN LEBIH PEMERINTAH DAERAH, TETAPI DIJADIKAN BAHAN ACUAN DALAM RANGKA PERBAIKAN SISTEM, MANAJEMEN DAN PENGELOLAAN PEMERINTAH DAERAH DIKEMUDIAN HARI.

KEMUDIAN KAMI BERHARAP HASIL RAPAT PARIPURNA INI AKAN MENJADI BAHAN EVALUASI DAN PERTIMBANGAN BAGI PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DALAM MENYUSUN RAPBD TAHUN BERIKUTNYA DAN MENINGKATKAN KINERJA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. TRANSPARANSI DAN KETERBUKAAN INFORMASI MENJADI KUNCI UNTUK MEMASTIKAN AKUNTABILITAS DAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH.

BAPAK IBU HADIRIN YANG SAYA HORMATI

ATAS SEGALA PERHATIANNYA DALAM MENGIKUTI SIDANG PARIPURNA INI KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH. SEMOGA ALLAH SWT MELINDUNGI KITA SEMUA AGAR DAPAT MELAKSANAKAN AMANAH RAKYAT DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB. *AAMIIN YRA.*

***BILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.***

*SATU DUA ADA RASA, ADA CINTA
JANGAN BERHIANAT NANTI KENA KARMA
DALAM RANGKA HARI JADI PURWAKARTA
SEMANGAT BERJUANG BERSAMA GERINDRA*

*JANGAN LUPA PAGI-PAGI MINUM KOPI
SAMBIL MINUM KOPI MAKANNYA OPAK
SEMANGAT HARI JADI TAHUN INI
SEMOGA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF SEMAKIN KOMPAK*

PURWAKARTA, 09 JULI 2025

**FRAKSI GERINDRA
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA**

SEKRETARIS



SAID ALI AZMI

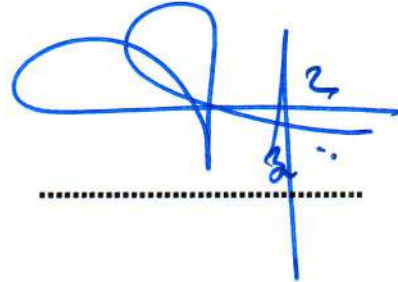
KETUA



TEDDY NANDUNG HERYAWAN

ANGGOTA :

1. SRI PUJI UTAMI



2. HJ. NINA HELTINA

.....

3. RICKY SYAMSUL FAUZI



4. REGINA MULYA DWIYANTI



5. SULAEMAN

.....

6. ZUSYEF GUSNAWAN

.....

7. WAWAN SETIAWAN

.....

8. DIANA LISU ARRANG BATO LIMBONG



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GOLKAR PADA RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA PEMBICARAAN TINGKAT II TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024
RABU, 9 JULI 2025**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

SAMPURASUN,

YTH. PIMPINAN DPRD DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA.

YTH. BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA.

YTH. BAPAK KAPOLRES KABUPATEN PURWAKARTA

YTH. KOMANDAN KODIM 0619, KOMANDAN RESIMEN ARMED STHIRA YUDHA,
KOMANDAN BATALYON ARMED - 9 PASOPATI PURWAKARTA

YTH. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DAN KETUA PENGADILAN NEGERI

YTH. KEPALA KEMENTRIAN AGAMA DAN KETUA PENGADILAN AGAMA

PURWAKARTA YTH. UNSUR PEJABAT PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA

YTH. PARA PIMPINAN ORGANISASI SOSIAL, KETUA KPUD, KETUA BAWASLU, PARA KEPALA
DESA, ORMAS, LSM, OKP, BEM SE-PURWAKARTA, INSAN PERS SERTA HADIRIN YANG
KAMI MULYAKAN.

HADIRIN YANG KAMI HORMATI

PERTAMA-TAMA, MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KE HADIRAT TUHAN
YANG MAHA ESA, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, KITA MASIH
DIBERIKAN KEKUATAN, KESEHATAN, DAN KEIKHLASAN UNTUK HADIR DALAM SIDANG
PARIPURNA YANG TERHORMAT INI.

HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN

MELALUI PENCERMATAN DAN EVALUASI YANG MENDALAM, FRAKSI PARTAI GOLKAR
MENYAMPAIKAN SEJUMLAH CATATAN KRITIS YANG BERANGKAT DARI SEMANGAT
UNTUK MEMBANGUN, BUKAN MENJATUHKAN. KAMI MENCATAT ADANYA
KETIMPANGAN ANTARA RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN, RENDAHNYA DAYA
SERAP BELANJA YANG BERDAMPAK LANGSUNG PADA TERTUNDANYA PROGRAM-
PROGRAM STRATEGIS, SERTA SILPA YANG MENANDAKAN LEMAHNYA EKSEKUSI
ANGGARAN, TERUTAMA PADA SEKTOR-SEKTOR YANG MENYENTUH KEBUTUHAN DASAR
MASYARAKAT.

HADIRIN YANG KAMI HORMATI

ATAS DASAR ITU, KAMI FRAKSI PARTAI GOLKAR MEMANDANG BAHWA PENERIMAAN TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 INI HARUS DIBARENGI DENGAN HARAPAN DAN KOMITMEN KUAT UNTUK MEMPERBAIKI KE DEPAN. KAMI INGIN MELIHAT TATA KELOLA ANGGARAN YANG LEBIH PROGRESIF, YANG BUKAN HANYA TEPAT SASARAN, TETAPI JUGA BERPIHAK SECARA MORAL DAN POLITIK KEPADA MEREKA YANG PALING MEMBUTUHKAN.

KAMI BERHARAP AGAR:

1. BAHWA SETIAP TEMUAN BPK BAIK BERSIFAT ADMINISTRATIF MAUPUN SUBSTANSIAL HARUS DITINDAK LANJUTI DAN DIJADIKAN SEBAGAI RUJUKAN UTAMA DALAM UPAYA PERBAIKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH.
2. PROSES PENGANGGARAN KE DEPAN BENAR-BENAR BERPIJAK PADA PRINSIP KEADILAN SOSIAL, DENGAN ALOKASI BELANJA YANG MENEMPATKAN RAKYAT KECIL SEBAGAI PRIORITAS UTAMA.
3. KINERJA OPD DIEVALUASI SECARA TRANSPARAN DAN OBJEKTIF, TERUTAMA DARI SEGI PENYERAPAN ANGGARAN, AGAR DAMPAKNYA TERASA BAGI MASYARAKAT LUAS.
4. PEMERINTAH MEMBUKA RUANG YANG LEBIH LUAS BAGI PARTISIPASI PUBLIK, BUKAN HANYA DALAM PERENCANAAN, TETAPI JUGA DALAM EVALUASI DAN PENGAWASAN ANGGARAN.
5. PEMERATAAN PEMBANGUNAN TIDAK LAGI BERHENTI PADA KONSEP ADMINISTRATIF, TETAPI DIWUJUDKAN DALAM BENTUK KEBERPIHAKAN NYATA TERHADAP DESA-DESA TERTINGGAL DAN WILAYAH PINGGIRAN.

HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KESELURUHAN LAPORAN, ARGUMENTASI DAN DINAMIKA YANG BERKEMBANG SELAMA PEMBAHASAN, MAKA: **FRAKSI PARTAI GOLKAR MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.**

DEMIKIAN HARAPAN DAN CATATAN INI KAMI SAMPAIKAN UNTUK KEMAJUAN KABUPATEN PURWAKARTA YANG LEBIH ADIL, LEBIH SEJAHTERA, DAN LEBIH BERPIHAK KEPADA RAKYAT.

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

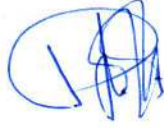
FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

SEKRETARIS



DY. KARWITA, SH., M.H.

WAKIL KETUA



Hj. PUTRIARTI PUTIK H, S.E.

KETUA

Hj. ENAH ROHANAH

ANGGOTA:

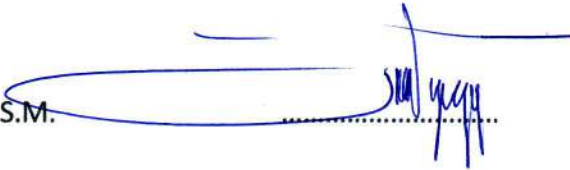
1. DIAS RUKMANA PRAJA, S.E.

.....

2. H. OJA SUTISNA

.....

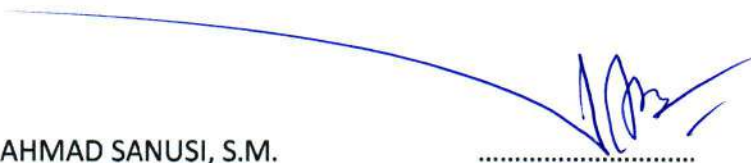
3. H. ELAN SOPYAN, S.M.



4. H. MESAKH SUPRIADI, SE. M.SI.



5. H. AHMAD SANUSI, S.M.



6. KAMAL, S.S



.....

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT II
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024
RAPAT PARIPURNA RABU TANGGAL 09 JULI 2025**

BISMILLAHIRROHMANIROHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

MERDEKA !!!....

SAMPURASUN !!..

YTH. BUPATI PURWAKARTA;

YTH. WAKIL BUPATI PURWAKARTA;

YTH. PIMPINAN BESERTA SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. UNSUR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
YANG DIANTARANYA :

YTH. KEPALA KEPOLISIAN RESORT PURWAKARTA;

YTH. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA;

YTH. KOMANDAN BATALYON ARMED-9 PASOPATI;

YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA;

YTH. KOMANDAN SUBDENPOM PURWAKARTA;

YTH. SEKRETARIS DAERAH DAN PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA;

YTH. PARA KEPALA PEJABAT PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. PARA CAMAT DAN PARA KEPALA DESA

- PARA TOKOH MASYARAKAT, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, KETUA ORGANISASI DAN PARA INSAN PERS YANG BERBAHAGIA;

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KITA KE HADIRAT ALLAH SWT , KARENA ATAS RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, SEHINGGA PADA HARI INI KITA MASIH DIBERI KESEHATAN DAN MASIH DIBERI KESEMPATAN UNTUK BERKUMPUL BERSAMA PADA ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT II PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024.

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA SELALU TERCURAH KEPADA NABI BESAR KITA MUHAMMAD SAW, JUGA KEPADA KELUARGANYA, PARA SAHABAT DAN KEPADA KITA SEKALIAN SEBAGAI UMATNYA SAMPAI AKHIR ZAMAN. AMIIINNN YARABBAL ALAMIN.

HADIRIN YANG KAMI HORMATI

PADA KESEMPATAN INI, KAMI DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN MENGUCAPKAN SELAMAT KEPADA BPK. RUDI HARTONO, S.A.P., MM. YANG TELAH MENJABAT SEBAGAI SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, SEMOGA TERJALIN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI YANG BAIK DAN SUKSES SELALU. KAMI JUGA MENGUCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA BADAN ANGGARAN DPRD DAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH, SERTA SELURUH OPD YANG TELAH MENUNTASKAN PEMBAHASAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024.

PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI, KAMI FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA INGIN MENYAMPAIKAN PENDAPATNYA BERKAITAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2024, YAITU SEBAGAI BERIKUT:

PERTAMA, MENGENAI REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024.

1. PENDAPATAN DARI SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) TAHUN 2024 BELUMLAH OPTIMAL SESUAI POTENSI YANG ADA, HAL INI DIKARENAKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) KABUPATEN PURWAKARTA MASIH RENDAH DARI HARGA RIIL DI LAPANGAN. OLEH SEBAB ITU, KEGIATAN PEMUTAKHITRAN DATA PBB-P2 AGAR DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN PBB-P2 PADA TAHUN BERJALAN 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN KEDEPANNYA.
2. REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) TAHUN 2024 MENGALAMI KENAIKAN SIGNIFIKAN BILA DIBANDING REALISASI TAHUN 2023, WALAUPUN BELUM MENCAPAI TARGET YANG DIANGGARKAN. KAMI FRAKSI PDI PERJUANGAN MENYAMPAIKAN APRESIASI ATAS CAPAIAN INI. NAMUN KITA KETAHUI BERSAMA, BAHWA PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), YAITU MASYARAKAT PURWAKARTA DAN PARA PELAKU USAHA MASIH MENGALAMI KESULITAN MEMENUHI STANDAR TEKNIS YANG DITENTUKAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2021. OLEH KARENA ITU, KAMI FRAKSI PDI PERJUANGAN BERPENDAPAT AGAR PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN PENDAMPINGAN DAN MEMFASILITASI KEPADA MASYARAKAT YANG AKAN MENGURUS PERIZINAN PERSETUJUAN BANGUNAN (PBG) TERSEBUT SECARA OPTIMAL.
3. REALISASI PENDAPATAN YANG BERSUMBER DARI BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2024 MENGALAMI PENURUNAN APABILA DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI TAHUN 2023.

HADIRIN YANG KAMI HORMATI

PADA KESEMPATAN INI, KAMI DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA BADAN ANGGARAN DPRD DAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH, SERTA SELURUH OPD YANG TELAH MENUNTASKAN PEMBAHASAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024.

PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI, KAMI FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA INGIN MENYAMPAIKAN PENDAPATNYA BERKAITAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2024, YAITU SEBAGAI BERIKUT:

PERTAMA, MENGENAI REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024.

1. PENDAPATAN DARI SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) TAHUN 2024 BELUMLAH OPTIMAL SESUAI POTENSI YANG ADA, HAL INI DIKARENAKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) KABUPATEN PURWAKARTA MASIH RENDAH DARI HARGA RIIL DI LAPANGAN. OLEH SEBAB ITU, KEGIATAN PEMUTAKHITRAN DATA PBB-P2 AGAR DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN PBB-P2 PADA TAHUN BERJALAN 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN KEDEPANNYA.
2. REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) TAHUN 2024 MENGALAMI KENAIKAN SIGNIFIKAN BILA DIBANDING REALISASI TAHUN 2023, WALAUPUN BELUM MENCAPAI TARGET YANG DIANGGARKAN. KAMI FRAKSI PDI PERJUANGAN MENYAMPAIKAN APRESIASI ATAS CAPAIAN INI. NAMUN KITA KETAHUI BERSAMA, BAHWA PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), YAITU MASYARAKAT PURWAKARTA DAN PARA PELAKU USAHA MASIH MENGALAMI KESULITAN MEMENUHI STANDAR TEKNIS YANG DITENTUKAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2021. OLEH KARENA ITU, KAMI FRAKSI PDI PERJUANGAN BERPENDAPAT AGAR PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN PENDAMPINGAN DAN MEMFASILITASI KEPADA MASYARAKAT YANG AKAN MENGURUS PERIZINAN PERSETUJUAN BANGUNAN (PBG) TERSEBUT SECARA OPTIMAL.
3. REALISASI PENDAPATAN YANG BERSUMBER DARI BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2024 MENGALAMI PENURUNAN APABILA DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI TAHUN 2023.

FRAKSI KAMI MENDORONG DAN MENDUKUNG AGAR PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN KOORDINASI DAN KOMUNIKASI YANG LEBIH INTENSIF KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, AGAR PENDAPATAN BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI BISA MENINGKAT SIGNIFIKAN, BAIK ITU BANTUAN PROVINSI YANG BERSIFAT UMUM MAUPUN BANTUAN PROVINSI YANG BERSIFAT KHUSUS.

RAPAT PARIPURNA DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

KEDUA, MENGENAI REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

KAMI FRAKSI PDI PERJUANGAN INGIN MENGGARIS BAWAHI MENGENAI REALISASI ATAU PENYERAPAN ANGGARAN YANG TIDAK OPTIMAL, YAITU DIANTARANYA :

1. REALISASI BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) TAHUN 2024 SANGAT KECIL SEKALI YAITU DARI ANGGARAN YANG DITETAPKAN SEBESAR 17,4 MILYAR RUPIAH, HANYA DIREALISASIKAN SEBESAR 23 JUTA RUPIAH, ATAU SERAPANNYA HANYA 0,13 PERSEN. KAMI BERPENDAPAT AGAR PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) INI BISA LEBIH OPTIMAL PADA TAHUN BERJALAN 2025 DAN PADA TAHUN-TAHUN KEDEPANNYA, KARENA BANYAK MASYARAKAT YANG SANGAT MEMBUTUHKAN.
2. SELANJUTNYA TENTANG BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024 JUGA TIDAKLAH OPTIMAL. FRAKSI KAMI BERPENDAPAT AGAR BELANJA TRANSFER KEPADA DESA MENJADI PRIORITAS DAN PERHATIAN BERSAMA, AGAR PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI DESA BISA BERJALAN LANCAR.

SIDANG PARIPURNA YANG KAMI HORMATI.

SETELAH KAMI DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN MENGIKUTI PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024, MAKA DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM, KAMI **SETUJU** AGAR RAPERDA INI SEGERA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH DAN DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH.

DEMIKIANLAH PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN.

TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA.

*WALLAHUL MUWAAFIQ ILA AQWAAMIT THORIQ
WASSALAMUALAIKUM WR.WB*

SAMPURASUN !!!...
MERDEKA !!!...

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA**

SEKRETARIS

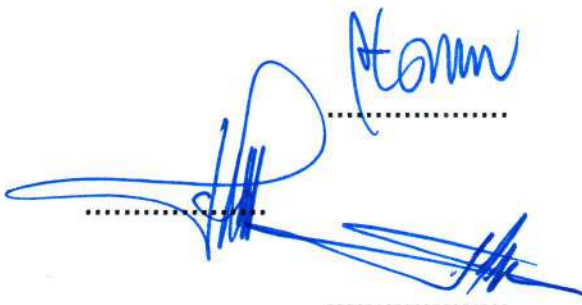
NOVITA PURWANTI

KETUA

LINA YULIANI

ANGGOTA :

- 1. ENTIS SUTISNA, SH., MH., MM.
- 2. WARSENO, SE
- 3. HJ. INA HERLINA
- 3. UJANG ROSADI



.....

.....

.....



**Partai
NasDem**

GERAKAN PERUBAHAN

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
TERHADAP :
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA**

TENTANG :

**PENETAPAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DALAM

**RAPAT PARIPURNA TINGKAT II DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA
PADA TANGGAL 09 JULI 2025**



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TK II
PERSETUJUAN BERSAMA RAPERDA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

***BISMILLAHIRROHMANIROHIM
ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULOHI WABAROKATUH
SAMPURASUN...***

YTH. SDR. PIMPINAN RAPAT;
YTH. SDR. BUPATI PURWAKARTA;
YTH. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN PARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA;
YTH. PARA UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA;
YTH. PARA PEJABAT PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;
YTH. PARA ULAMA, PIMPINAN ORGANISASI SOSIAL MASYARAKAT, LSM,
INSAN PERS, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA SERTA HADIRIN TAMU
UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

SALAM RESTORASI....

ALHAMDULILLAH PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN
KEHADIRAT ALLAH SWT TUHAN SEMESTA ALAM, ATAS SEGALA
NIKMAT YANG TELAH DIANUGERAHKAN KEPADA KITA, SEHINGGA
PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA
DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT.

SHALAWAT DAN SALAM SEMOGA TERLIMPAH CURAHKAN KEPADA JUNJUNAN KITA BAGINDA MUHAMMAD ROSULULLOH SAW BESERTA KELUARGA, SAHABAT DAN PENGIKUTNYA YANG ISTIQOMAH HINGGA AKHIR ZAMAN.

MENGAWALI PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM, KAMI SAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN RAPAT YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA FRAKSI NASDEM UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI TERHADAP PENETAPAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

SELANJUTNYA FRAKSI NASDEM MENGUCAPKAN TERIMAKASIH DAN MENGAPRESIASI ATAS KERJA KERAS DAN DEDIKASI KEPADA PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN PURWAKARTA SERTA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA YANG TELAH SELESAI MEMBAHAS RAPERDA TERSEBUT DENGAN PROSES YANG CUKUP PANJANG.

PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI, DAN HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

MENGENAI RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 FRAKSI NASDEM MEMANDANG BAHWA RAPERDA TERSEBUT MERUPAKAN CERMINAN DARI KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

NAMUN DEMIKIAN, FRAKSI NASDEM TETAP MEMBERIKAN BEBERAPA CATATAN YANG PERLU MENJADI PERHATIAN SERIUS PEMERINTAH DAERAH. SALAH SATUNYA ADALAH TERKAIT REALISASI PENDAPATAN DAERAH YANG MENCAPAI 93,46 PERSEN DARI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN, DIMANA MASIH

TERDAPAT POTENSI SEBESAR 6,54 PERSEN YANG BELUM TERGARAP SECARA OPTIMAL. DARI BEBERAPA RINCIAN PENDAPATAN DAERAH, PENCAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENCAPAIAN REALISASINYA DIBAWAH 90 PERSEN, ANTARA LAIN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH SERTA LAIN LAIN PAD YANG SAH, DAN YANG PALING RENDAH ADALAH RETRIBUSI DAERAH SEBESAR 80,41 PERSEN.

FRAKSI NASDEM MENDORONG AGAR POTENSI INI DAPAT DIMAKSIMALKAN MELALUI UPAYA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN, TERUTAMA PADA SEKTOR PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, TERMASUK PULA DENGAN MEMPERKUAT SISTEM PENGELOLAAN DAN MENINGKATKAN KAPASITAS PELAKSANA DI LAPANGAN.

PADA SISI BELANJA DAN TRANSFER DAERAH, REALISASI YANG TERCAPI SEBESAR 92,57 PERSEN MENUNJUKKAN BAHWA MASIH ADA RUANG UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN. OLEH KARENA ITU, DIPERLUKAN SISTEM EVALUASI DAN PENGENDALIAN YANG MAMPU MENDETEKSI SECARA DINI KETERLAMBATAN ATAU KETIDAKTEPATAN REALISASI BELANJA, AGAR SETIAP RUPIAH ANGGARAN BENAR-BENAR MEMBERI MANFAAT NYATA BAGI MASYARAKAT.

TAK KALAH PENTING ADALAH PERHATIAN TERHADAP PENGELOLAAN SILPA YANG TERCATAT SEBESAR LEBIH DARI RP 26,5 MILIAR. FRAKSI NASDEM MEMANDANG PERLU ADANYA EVALUASI MENYELURUH UNTUK MENELAAH PENYEBAB BELUM MAKSIMALNYA PEMANFAATAN ANGGARAN TERSEBUT. APAKAH KARENA KENDALA ADMINISTRATIF, PERENCANAAN YANG BELUM MATANG, ATAU HAMBATAN TEKNIS LAINNYA. HAL INI PENTING AGAR SIKLUS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN-TAHUN BERIKUTNYA BERJALAN LEBIH BAIK DAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN PUBLIK.

**PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI, DAN
HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.**

**DARI URAIAN TERSEBUT DENGAN MEMPERTIMBANGKAN
CAPAIAN, CATATAN, DAN HARAPAN TERSEBUT, SERTA SEMANGAT
UNTUK TERUS MENDORONG KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH
YANG BERSIH DAN BERPIHAK PADA KEPENTINGAN RAKYAT,
DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRROHMANIRROHIM MAKA
FRAKSI NASDEM MENYATAKAN MENDUKUNG DAN MENYETUJUI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DAERAH**

**DEMIKIAN PENDAPAT FRAKSI NASDEM. ATAS SEGALA PERHATIAN
KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.**

**WALLAHUL MUWAFFIK ILA AQWAMITH THARIQ
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.**

PURWAKARTA, 09 JULI 2025

**FRAKSI NASDEM
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA



H. ELTHON BRAMEISTA GUNAWAN, S.H

SEKRETARIS



ASTRI NOVITASARI, S.E

ANGGOTA :

1. LUTHFI BAMALA, A.MD


.....

2. DEVI MUTIARA SARI, S.H


.....

3. DRA. HJ DENI YANTHI

.....

4. IIN SALAMIRAH

.....

5. DENISA WULANDARI, S.M

.....



PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Tentang

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

dalam

RAPAT PARIPURNA TINGKAT II DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

pada tanggal 09 Juli 2025



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PKS
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT II
PEMBAHASAN RAPERDA USULAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

SALAM ADIL DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.

YANG TERHORMAT, PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA.

YANG KAMI HORMATI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA.

YANG KAMI HORMATI, PARA KETUA FRAKSI, PARA KETUA KOMISI DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA.

YANG KAMI HORMATI, UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

YANG KAMI HORMATI, PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

YANG KAMI HORMATI, PARA ALIM ULAMA, PIMPINAN ORMAS, KETUA PEMUDA DAN KARANG TARUNA, TEMAN-TEMAN WARTAWAN SERTA SEGENAP UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

ALHAMDULILLAH WA SYUKRULILLAH BI NI'MATILLAH, PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT TUHAN SEMESTA ALAM, ATAS SEGALA NIKMAT YANG TELAH DIANUGERAHKAN KEPADA KITA, SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT.

SHALAWAT DAN SALAM SEMOGA TERLIMPAH CURAHKAN KEPADA SURI TAULADAN KITA BAGINDA NABI MUHAMMAD SAW, BESERTA KELUARGA, SAHABAT DAN PENGIKUTNYA YANG ISTIQOMAH HINGGA AKHIR ZAMAN.

MENGAWALI KAMI SAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN RAPAT YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA FRAKSI PKS UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024.

PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI, DAN HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN MENGENAI RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024, FRAKSI PKS MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR SEBAGAI BERIKUT:

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) MEMANDANG BAHWA PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2024 MERUPAKAN BAGIAN DARI KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL KEPALA DAERAH, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA SERTA PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

KEDUA DASAR HUKUM TERSEBUT MENEGASKAN PENTINGNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH. OLEH KARENA ITU, BUPATI PURWAKARTA SELAKU KEPALA DAERAH BERKEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KEPADA DPRD SEBAGAI WUJUD KETERBUKAAN DAN TANGGUNG JAWAB PUBLIK.

FRAKSI PKS BERPENDAPAT BAHWA PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 BUKAN SEMATA-MATA SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, TETAPI JUGA

MERUPAKAN MOMENTUM PENTING UNTUK MELAKUKAN EVALUASI ATAS CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH, KHUSUSNYA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN MENDORONG KEMAJUAN PEMBANGUNAN DAERAH.

PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI, DAN HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

FRAKSI PKS MENILAI BAHWA LAPORAN INI MENGGAMBARAKAN KESERIUSAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DALAM MENJALANKAN PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS SEBAGAIMANA AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KHUSUSNYA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BERDASARKAN DATA YANG TELAH DISAJIKAN DALAM BUKU RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024, FRAKSI PKS MENCERMATI BAHWA:

REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 MENCAPI SEKITAR RP2,548 TRILIUN ATAU SEBESAR 93,46% DARI TARGET RP2,727 TRILIUN. CAPAIAN INI TENTU MENCERMINKAN ADANYA UPAYA MAKSIMAL DARI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHIMPUN PENDAPATAN.

NAMUN, JIKA DILIHAT DARI SISI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), REALISASI SEBESAR 622 MILIAR RUPIAH ATAU 83,90% DARI TARGET 742 MILIAR RUPIAH MENUNJUKKAN BAHWA MASIH TERDAPAT RUANG PERBAIKAN YANG CUKUP SIGNIFIKAN. TERUTAMA PADA SEKTOR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, YANG KEDUANYA HANYA MAMPU TEREALISASI SEKITAR 80 PERSEN DARI TARGET. HAL INI MENGINDIKASIKAN ADANYA POTENSI PENERIMAAN YANG BELUM TERGARAP OPTIMAL.

UNTUK ITU, FRAKSI PKS MENDORONG AGAR PEMERINTAH DAERAH DAPAT MELAKUKAN PENGUATAN SISTEM PEMUNGUTAN, MEMPERLUAS BASIS PAJAK DAN RETRIBUSI, SERTA MENINGKATKAN EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS INI PENTING GUNA MENINGKATKAN KAPASITAS FISKAL DAERAH SECARA BERKELANJUTAN.

SELANJUTNYA, BERKENAAN DENGAN SISI BELANJA DAERAH, KAMI MENCATAT BAHWA REALISASI BELANJA SEBESAR 2,554 TRILIUN RUPIAH ATAU 92,57% DARI TOTAL ANGGARAN 2,759 TRILIUN RUPIAH. MESKIPUN SECARA KUANTITATIF TERGOLONG TINGGI, NAMUN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN JUGA PERLU MENJADI PERHATIAN UTAMA.

FRAKSI PKS MENILAI BAHWA MASIH TERDAPAT SEJUMLAH PERANGKAT DAERAH DENGAN TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN YANG RENDAH. HAL INI PATUT MENJADI BAHAN EVALUASI SERIUS, KHUSUSNYA DALAM PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN. KETEPATAN DALAM MERUMUSKAN PROGRAM, KESESUAIAN ANTARA PERENCANAAN DAN KEBUTUHAN RIIL DI LAPANGAN, SERTA KESIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERLU DITINGKATKAN AGAR SETIAP RUPIAH YANG DIBELANJAKAN DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT MAKSIMAL BAGI MASYARAKAT.

KAMI BERHARAP AGAR KE DEPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAPAT DILAKUKAN SECARA LEBIH PRESISI, PARTISIPATIF, DAN BERBASIS PADA KEBUTUHAN DAERAH YANG NYATA, SEHINGGA PELAKSANAAN APBD TIDAK HANYA TERFOKUS PADA PENYERAPAN ANGGARAN, TETAPI JUGA MAMPU MENGHASILKAN *OUTPUT* DAN *OUTCOME* YANG BERKUALITAS.

HAL LAIN YANG JUGA MENJADI PERHATIAN KHUSUS KAMI ADALAH TERKAIT BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT). BERDASARKAN DATA YANG DISAJIKAN, SERAPAN BTT SANGAT MINIM, YAKNI HANYA SEBESAR 23 JUTA RUPIAH ATAU SEKITAR 0,13% DARI TOTAL ANGGARAN SEBESAR 17,4 MILIAR RUPIAH. ANGKA INI MENUNJUKKAN BAHWA MEKANISME PEMANFAATAN BTT BELUM BERJALAN SECARA OPTIMAL.

FRAKSI PKS BERPENDAPAT BAHWA RENDAHNYA PENYERAPAN BTT PERLU MENJADI PERHATIAN SERIUS. KE DEPAN, KAMI MENDORONG AGAR PEMERINTAH DAERAH MENYUSUN PROSEDUR PENCAIRAN BTT YANG LEBIH SEDERHANA, CEPAT, NAMUN TETAP AKUNTABEL DAN AMAN SECARA ADMINISTRATIF MAUPUN HUKUM. HAL INI PENTING AGAR DANA BTT BENAR-BENAR DAPAT DIGUNAKAN SESUAI PERUNTUKANNYA DALAM KONDISI DARURAT ATAU MENDESAK, TANPA TERHAMBAT OLEH BIROKRASI YANG TERLALU KAKU.

**PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI, DAN HADIRIN
UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.**

KAMI BERHARAP AGAR MASUKAN YANG TELAH KAMI SAMPAIKAN TIDAK HANYA MENJADI BAHAN EVALUASI, TETAPI JUGA DITINDAKLANJUTI SECARA KONKRET OLEH PEMERINTAH DAERAH DEMI PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DI MASA YANG AKAN DATANG.

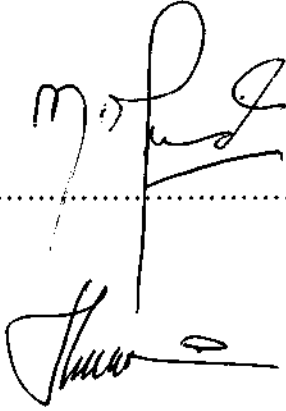
SEBAGAI BENTUK KOMITMEN KAMI TERHADAP KEBERLANJUTAN RODA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA DALAM RANGKA MEMENUHI AMANAT KONSTITUSI DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT PURWAKARTA SECARA LUAS, DENGAN MENGUCAPKAN *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*, FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera MENERIMA DAN MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

SEMOGA SEGALA IKHTIAR INI MEMBAWA KEBERKAHAN DAN MANFAAT SEBESAR-BESARNYA BAGI KEMAJUAN KABUPATEN PURWAKARTA DAN KESEJAHTERAAN SELURUH WARGANYA.

DEMIKIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI PKS. ATAS SEGALA PERHATIAN KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH. WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

PURWAKARTA, 09 JULI 2025
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

Ir. H. MOH. ARIEF KURNIAWAN, M.M.
(KETUA FRAKSI)

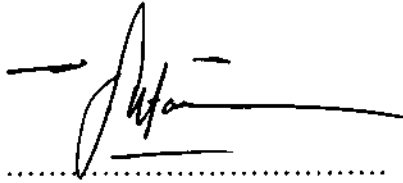


.....

DIDIN HENDRAWAN, S.E.
(SEKRETARIS FRAKSI)

.....

DEDI JUHARI
(WAKIL KETUA FRAKSI)



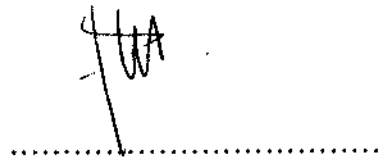
.....

H. ASEP NURYANI, S.Pd.I.
(ANGGOTA FRAKSI)



.....

H. DEDI SUTARDI
(ANGGOTA FRAKSI)



.....

PANDANGAN AKHIR

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT II

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**



Peduli Ummat Melayani Rakyat

DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

HARI RABU, 09 JULI 2025

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2025**



Peduli Ummat Melayani Rakyat

**PANDANGAN AKHIR
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

- ✓ YTH, SAUDARA BUPATI PURWAKARTA
- ✓ YTH, SAUDARI KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN PARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
- ✓ YTH, SEKRETARIS DAERAH DAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA *Kepala Dinas* *Yth Bk*
- YTH, BAPAK DANDIM 0619 PURWAKARTA ATAU YANG MEWAKILI, BAPAK KAPOLRES ATAU YANG MEWAKILI, KEPALA PENGADILAN NEGERI, KEPALA PENGADILAN AGAMA, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA, DANMEN ARMED 2 STHIRA YUDHA, DANYON ARMED 9 PASOPATI, SERTA DANSUB DENPOM PURWAKARTA.
- YTH, KETUA MUI, KEPALA KEMENTERIAN AGAMA, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN ORGANISASI MASYARAKAT, INSAN PERS, MEDIA, PIMPINAN LSM, BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA, AKTIFIS SOSIAL, AKTIFIS LINGKUNGAN, DAN LAIN-LAIN
- YTH, CAMAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN KEPALA DESA SE-KABUPATEN PURWAKARTA YANG SENANTIASA KAMI BANGGAKAN
- ✓ YTH, PARA TAMU UNDANGAN DAN HADIRIN YANG KAMI CINTAI

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SEGALA PUJI BAGI ALLAH SWT, TUHAN SEMESTA ALAM, ATAS NIKMAT KESEHATAN, KESEMPATAN, DAN KEKUATAN YANG TELAH DILIMPAHKAN, *Ditutupi Yang Cukup Indah & Pujian ini, Alhamdulillah.*
SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT BERSAMA-SAMA MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA TINGKAT II DPRD KABUPATEN PURWAKARTA DENGAN AGENDA

Pandangan akhir Fraksi Bk & P.

PANDANGAN AKHIR FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024.

SHALAWAT DAN SALAM SENANTIASA KITA SAMPAIKAN KEPADA JUNJUNGAN
NABI BESAR MUHAMMAD SAW, SURI TELADAN BAGI UMAT MANUSIA, YANG
TELAH MEWARISKAN NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN YANG JUJUR, ADIL, DAN
PENUH KASIH.

PADA KESEMPATAN INI PULA, FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
MENYAMPAIKAN SELAMAT MEMPERINGATI TAHUN BARU ISLAM 1
MUHARRAM 1447 HIJRIAH. SEMOGA TAHUN BARU INI MENJADI MOMENTUM
HIJRAH KOLEKTIF MENUJU PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN,
PENGUATAN MORAL ANGGARAN, DAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH ADIL
DAN BERPIHAK PADA RAKYAT KECIL.

**RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN YANG
BERBAHAGIA**

SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KHUSUSNYA UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH, PELAKSANAAN APBD WAJIB DIPERTANGGUNGJAWABKAN
SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MELALUI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH. NAMUN BAGI FRAKSI PKB, PERTANGGUNGJAWABAN INI TIDAK
SEKADAR MENJADI PEMENUHAN KEWAJIBAN ADMINISTRATIF, MELAINKAN JUGA
**TANGGUNG JAWAB MORAL DAN SPIRITUAL ATAS PENGELOLAAN AMANAH
PUBLIK.**

SETIAP RUPIAH DALAM APBD BUKANLAH MILIK KEKUASAAN, MELAINKAN
TITIPAN RAKYAT YANG HARUS DIKELOLA DENGAN NIAT YANG BENAR, PRINSIP
YANG ADIL, DAN ORIENTASI YANG MASLAHAT. OLEH KARENA ITU, FRAKSI PKB
MEMANDANG APBD SEBAGAI ALAT PERJUANGAN—BUKAN HANYA INSTRUMEN
TEKNOKRATIS, MELAINKAN JUGA MEDIUM **IBADAH SOSIAL** YANG HARUS

MEMBAWA KEBERPIHAKAN NYATA KEPADA MUSTADH'AFIN: MEREKA YANG MISKIN, TERTINDAS, DAN TERMARJINALKAN.

FRAKSI PKB TELAH MELAKUKAN PEMBAHASAN SECARA CERMAT TERHADAP SUBSTANSI RAPERDA DAN MENYAMPAIKAN BEBERAPA CATATAN BERIKUT INI:

- **PERTAMA**, PERENCANAAN PENDAPATAN, TERUTAMA DARI SEKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), MASIH BELUM REALISTIS DAN BERBASIS POTENSI RIIL. REALISASI PAD TAHUN 2024 HANYA MENCAPAI SEKITAR **RP622 MILIAR**, DARI TARGET PERUBAHAN SEBESAR **RP742 MILIAR**. INI MENCERMINKAN ADANYA KEKURANGCAKAPAN DALAM MEMBACA POTENSI FISKAL DAERAH. DALAM FIQH, KEHATI-HATIAN DAN KEJUJURAN DALAM TAKSIRAN MERUPAKAN BAGIAN DARI **TANGGUNG JAWAB HARTA UMAT (AL-AMANAH FI AL-MAL)**. OLEH KARENA ITU, PKB MENDORONG PEMBENAHAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI, SERTA PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL SEPERTI **TAPPING BOX** DAN INTEGRASI SISTEM DATA FISKAL.
- **KEDUA**, PELAKSANAAN BELANJA DAERAH MASIH BELUM SEPENUHNYA MENCERMINKAN PRIORITAS KEBUTUHAN RAKYAT. BELANJA PEGAWAI TETAP MENDOMINASI, SEMENTARA ANGGARAN UNTUK BANTUAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN JSTRU MINIM. BANYAK BELANJA YANG BERSIFAT SEREMONIAL DAN TIDAK BERDAMPAK LANGSUNG. DALAM FIQH ANGGARAN, **"TASARRUF AL-IMAM 'ALA AL-RA'IYYAH MANUTUN BIL-MASHLAHAH"**—SETIAP KEPUTUSAN PENGUASA ATAS RAKYAT HARUS BERDASARKAN KEMASLAHATAN MEREKA. FRAKSI PKB MENEGASKAN BAHWA BELANJA HARUS DITATA ULANG AGAR LEBIH BERPIHAK PADA KESEJAHTERAAN WARGA YANG PALING MEMBUTUHKAN.
- **KETIGA**, BESARNYA SILPA (SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN) YANG MENCAPAI **RP37 MILIAR** MENJADI CERMIN DARI LEMAHNYA EKSEKUSI

PROGRAM PEMBANGUNAN. SILPA TIDAK BOLEH DIMAKNAI SEBAGAI “UANG SISA” YANG NETRAL, MELAINKAN SEBAGAI **INDIKASI DARI ANGGARAN YANG TIDAK SAMPAI PADA PENERIMANYA**. DALAM PRINSIP ISLAM, MEMBIARKAN MANFAAT PUBLIK TIDAK TERSALURKAN ADALAH BENTUK **TAFRITH** (KELALAIAN) YANG HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN. MAKA DARI ITU, PEMERINTAH DAERAH HARUS MENYUSUN STRATEGI PEMBIAYAAN YANG LEBIH PROGRESIF NAMUN BERTANGGUNG JAWAB.

- **KEEMPAT**, PENGGUNAAN DANA TRANSFER SEPERTI **DAU SPESIFIK DAN DANA BAGI HASIL (DBH)** MASIH BELUM SEPENUHNYA SESUAI PERUNTUKAN. INI BUKAN HANYA PERSOALAN ADMINISTRATIF, TETAPI **PENGKHIANATAN TERHADAP KEPERCAYAAN FISKAL** YANG DIBERIKAN OLEH PUSAT KEPADA DAERAH. FRAKSI PKB MENYERUKAN PENINGKATAN KAPASITAS BIROKRASI DAN PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL AGAR DANA TRANSFER BENAR-BENAR DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN YANG TELAH DITENTUKAN.
- **KELIMA**, KETIMPANGAN SOSIAL MASIH MENJADI MASALAH NYATA YANG BELUM TERTANGANI SECARA STRUKTURAL. MESKI ANGKA KEMISKINAN MENURUN MENJADI 8,41%, NAMUN **INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (1,37)** DAN **INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (0,35)** MENUNJUKKAN BAHWA KEHIDUPAN MASYARAKAT MISKIN MASIH JAUH DARI SEJAHTERA. GINI RATIO SEBESAR 0,398 MEMPERLIHATKAN KESENJANGAN YANG BELUM TERTANGANI. MAKA DARI ITU, FRAKSI PKB MENDORONG AGAR PENGURANGAN KEMISKINAN TIDAK HANYA DILIHAT DARI STATISTIK, TETAPI JUGA DARI **TRANSFORMASI STRUKTURAL** YANG MENYENTUH AKAR MASALAH: DISTRIBUSI ASET, AKSES PENDIDIKAN, DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT.

RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT,

~~BERDASARKAN CATATAN TERSEBUT, FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA~~
Setelah melakukan pembahasan secara cermat terhadap Substansi Rapoda,
MENYATAKAN FRAKSI PKB menyatakan:

1. MENERIMA DAN MENSETUJUI RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DAERAH.

2. MEMBERIKAN CATATAN STRATEGIS AGAR KE DEPAN:

- o PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD LEBIH MASLAHAT DAN
BERPIHAK PADA RAKYAT. *berorientasi pada fkg* *إتجاه الفئات*
- o SETIAP RUPIAH ANGGARAN ^{harus} DIGUNAKAN UNTUK MENGANGKAT
MARTABAT MUSTADH'AFIN. *dan bisa rubar warganya, masyarakat yg ada mpr*
- o SISTEM EVALUASI DAN PENGAWASAN DIPERKUAT DENGAN
PARTISIPASI PUBLIK DAN SEMANGAT Keadilan.

3. MENDORONG TERWUJUDNYA TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG
TRANSPARAN, AMANAH, DAN BERJIWA MADINAH AL-FADHILAH—
DAERAH YANG PENUH KEBAIKAN, Keadilan, DAN KESEJAHTERAAN
BERSAMA. *إتجاه الفئات*

DEMIKIAN PANDANGAN AKHIR INI KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BENTUK
TANGGUNG JAWAB POLITIK DAN MORAL FRAKSI PKB DALAM MENJAGA
INTEGRITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. SEMOGA APBD TIDAK HANYA
MENJADI ANGKA DALAM LAPORAN, TETAPI BENAR-BENAR MENJELMA MENJADI
WUJUD NYATA KEBERPIHAKAN DAN PELAYANAN KEPADA RAKYAT
PURWAKARTA. *peruli umat, melayani Rakyat.*

WALLAHUL MUWAFFIQ ILA AQWAMITH THARIQ.

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

PURWAKARTA, 09 JULI 2025
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA

SEKRETARIS

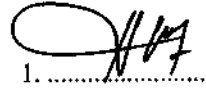


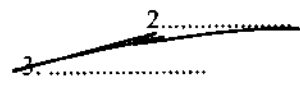
CECENG ABDUL QODIR, S.Pd.I

HILMI SIROJUL FUADI

FRAKSI PKB:

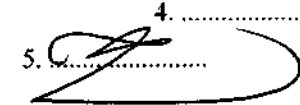
1. CECENG ABDUL QODIR, S.Pd.
2. HILMI SIROJUL FUADI
3. I H. ALAIKASSALAM, SH.I
4. ZAENAL ARIFIN
5. AGUS MAHARDIKA

1. 

2. 

3.

4.

5. 

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI DEPAN (DEMOKRAT PAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA
JAWA BARAT**



Tentang :

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024**

**Dalam Rapat Paripurna
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
Purwakarta, 09 Juli 2025**

BISMILLAHIRROHMANIROHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

SAMPURASUN

1. Yth. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA;
2. Yth. BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA;
3. Yth. UNSUR PIMPINAN DAERAH, KEPALA KEPOLISIAN RESOR PURWAKARTA ATAU YANG MEWAKILI, KOMANDAN KODIM 0619 PURWAKARTA ATAU YANG MEWAKILI
4. Yth. DAN MEN ARMED STHIRA YUDHA; ATAU YANG MEWAKILI
5. Yth. DAN YON ARMED 09 PASOPATI; ATAU YANG MEWAKILI
6. Yth. DAN SUBDENPOM III/3-4 PURWAKARTA, ATAU YANG MEWAKILI
7. Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA; ATAU YANG MEWAKILI
8. Yth. SEKRETARIS DAERAH DAN PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;
9. Yth. ALIM ULAMA, PARA KEPALA DESA, PARA PENGURUS PARPOL/ORMAS/LSM, PERS DAN TOKOH MASYARAKAT SE-KABUPATEN PURWAKARTA

PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-**NYA**, SEHINGGA PADA HARI INI KITA MASIH DIBERI KESEHATAN UNTUK DAPAT BERKUMPUL DAN BERSILATURRAHIM DALAM ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT II PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP PENETAPAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA DILIMPAHKAN KEPADA NABI BESAR MUHAMMAD SAW, KEPADA KELUARGANYA, PARA SAHABAT DAN KEPADA KITA SEKALIAN SEBAGAI UMMATNYA SAMPAI AKHIR JAMAN. AAMIIN.

PARA HADIRIN YANG TERHORMAT DAN BERBAHAGIA

SETELAH MENCERMATI DOKUMEN RAPERDA, LAPORAN REALISASI ANGGARAN, FRAKSI DEPAN MENYAMPAIKAN BEBERAPA POKOK PENDAPAT SEBAGAI BERIKUT:

1. APRESIASI ATAS RAIHAN WTP

FRAKSI DEPAN MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA ATAS KEBERHASILANNYA KEMBALI MEMPEROLEH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP). HAL INI MENANDAKAN KOMITMEN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

2. REALISASI PENDAPATAN

REALISASI TOTAL PENDAPATAN DAERAH SEBESAR **RP.2.548.811.674.513,00** (DUA TRILIUN LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN MILIAR DELAPAN RATUS SEBELAS JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS TIGA BELAS RUPIAH) DARI TARGET **RP.2.727.171.220.537,00**, ATAU MENCAPAI **93,46%** (SEMBILAN PULUH TIGA KOMA EMPAT ENAM PERSEN).

- **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** TEREALISASI SEBESAR **RP.622.928.999.490,00** (ENAM RATUS DUA PULUH DUA MILIAR SEMBILAN RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH), DARI TARGET **RP742.445.591.416,00** (TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA MILIAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS ENAM BELAS RUPIAH), ATAU **83,90%** (DELAPAN PULUH TIGA KOMA SEMBILAN NOL PERSEN).

KAMI MENILAI BAHWA MASIH ADA RUANG OPTIMALISASI PAD, TERUTAMA DARI SEKTOR PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

3. REALISASI BELANJA

- **REALISASI BELANJA DAERAH** SEBESAR **RP2.554.467.819.500,00** (DUA TRILIUN LIMA RATUS LIMA PULUH EMPAT MILIAR EMPAT RATUS ENAM PULUH TUJUH

*JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS RIBU LIMA RATUS RUPIAH), DARI ANGGARAN **RP2.759.423.158.198,00**, ATAU **92,57%** (SEMBILAN PULUH DUA KOMA LIMA TUJUH PERSEN).*

- **REALISASI BELANJA MODAL** SEBESAR **RP242.087.092.392,00** (*DUA RATUS EMPAT PULUH DUA MILIAR DELAPAN PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN PULUH DUA RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH*), DARI ANGGARAN **RP248.163.074.869,00** (*DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN MILIAR SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA TUJUH PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RUPIAH*), ATAU **97,55%** (*SEMBILAN PULUH TUJUH KOMA LIMA LIMA PERSEN*).

KAMI MENDORONG AGAR KE DEPAN BELANJA LEBIH DIARAHKAN UNTUK PROGRAM YANG MENYENTUH LANGSUNG KEBUTUHAN MASYARAKAT, SEPERTI INFRASTRUKTUR DASAR, PENDIDIKAN, DAN KESEHATAN.

4. SURPLUS/DEFISIT DAN SILPA

- **DEFISIT ANGGARAN** SEBESAR **RP5.656.144.987,00** (*LIMA MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA SERATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RUPIAH*), YANG BERHASIL DITUTUP MELALUI PEMBIAYAAN NETTO.
- **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)** SEBESAR **RP26.595.792.674,00** (*DUA PULUH ENAM MILIAR LIMA*

RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH).

KAMI MENDORONG AGAR SILPA DIMANFAATKAN SECARA EFEKTIF DAN PRIORITAS, DENGAN FOKUS PADA KEBUTUHAN RIIL MASYARAKAT.

5. REKOMENDASI

FRAKSI DEPAN MEMBERIKAN BEBERAPA CATATAN DAN SARAN STRATEGIS SEBAGAI BERIKUT:

- PENINGKATAN KINERJA PAD, MELALUI DIGITALISASI LAYANAN DAN OPTIMALISASI PENGAWASAN LAPANGAN.
- EFISIENSI BELANJA OPERASIONAL, AGAR PROGRAM-PROGRAM TIDAK SEKADAR ADMINISTRATIF, MELAINKAN BERDAMPAK NYATA.
- PENGUATAN PENGAWASAN INTERNAL, TERMASUK MENDORONG PERAN INSPEKTORAT SECARA AKTIF DAN INDEPENDEN.
- PENGUATAN KAPASITAS SDM DI SKPD, AGAR PENGELOLAAN ANGGARAN LEBIH PROFESIONAL DAN TEPAT WAKTU.

PARA HADIRIN YANG TERHORMAT DAN BERBAHAGIA

FRAKSI DEPAN MENYATAKAN MENERIMA DAN MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 TERSEBUT MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PURWAKARTA. KAMI PERCAYA, KEBIJAKAN YANG DIRUMUSKAN INI AKAN MENJADI FONDASI YANG KUAT DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN.

PARA HADIRIN YANG TERHORMAT DAN BERBAHAGIA

DEMIKIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEPAN. SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KEBERKAHAN DALAM SETIAP LANGKAH KITA BERSAMA DEMI KEMAJUAN KABUPATEN PURWAKARTA.

BILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH
WASSALAMUALAIKUM WR. WB.

PURWAKARTA, 09 JULI 2025
FRAKSI DEMOKRAT PAN (DEPAN)
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA



ASEP CHANDRA TK

WAKIL KETUA



H. AMING

SEKRETARIS



DULNASIR,SH.MH

ANGGOTA :

1. **H. AGUS WIJAYA,SH.**



PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PERHATIAN (PERSATUAN HATI NURANI)
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TK II
RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

1. Yth. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA;
2. Yth. BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA;
3. Yth. UNSUR PIMPINAN DAERAH, KEPALA KEPOLISIAN RESOR PURWAKARTA ATAU YANG MEWAKILI, KOMANDAN KODIM 0619 PURWAKARTA ATAU YANG MEWAKILI
4. Yth. DAN MEN ARMED STHIRA YUDHA; ATAU YANG MEWAKILI
5. Yth. DAN YON ARMED 09 PASOPATI; ATAU YANG MEWAKILI
6. Yth. DAN SUBDENPOM III/3-4 PURWAKARTA, ATAU YANG MEWAKILI
7. Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA; ATAU YANG MEWAKILI
8. Yth. KETUA KPUD ATAU YANG MEWAKILI;
9. Yth. SEKRETARIS DAERAH DAN PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;
10. Yth. ALIM ULAMA, PARA KEPALA DESA, PARA PENGURUS PARPOL/ORMAS/LSM, PERS DAN TOKOH MASYARAKAT SE-KABUPATEN PURWAKARTA

HADIRIN DAN TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

SALAM SEJAHTERA KAMI SAMPAIKAN, TERIRING DO'A SEMOGA BAPAK/IBU SENANTIASA DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT, SELALU DALAM LINDUNGAN MAGHFIROH ALLAH SWT.

KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, BAHWA ATAS RAHMAT DAN KARUNIANYA, *ALHAMDULILLAH* PADA HARI INI KITA DAPAT HADIR BERSAMA-SAMA *SHALAWAT* DAN SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAH LIMPAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW, KEPADA KELUARGANYA, KEPADA PARA SAHABATNYA DAN KITA SEMUA SELAKU UMATNYA HINGGA AKHIR ZAMAN. *AMIIIN*.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

FRAKSI PERHATIAN SANGAT MENGAPRESIASI POSITIF TERHADAP KINERJA SELURUH ANGGOTA DPRD, SEMOGA INI MENJADIKAN HASIL YANG SANGAT BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT PURWAKARTA.

DEMIKIAN JUGA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA FRAKSI PERHATIAN UNTUK MEMBERIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI PADA PARIPURNA TINGKAT II ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

FRAKSI PERHATIAN BERPENDAPAT:

RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2024 INI SENANTIASA DAPAT DIJADIKAN BAHAN KAJIAN DAN SUMBANGSIH KONSEP BERPIKIR DAN MEMPERHATIKAN REKOMENDASI ATAS CATATAN-CATATAN YANG DI BERIKAN OLEH BADAN ANGGARAN, KOMISI-KOMISI MAUPUN FRAKSI-FRAKSI. DALAM RANGKA PERBAIKAN KINERJA DAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAH DAERAH. DAN UNTUK TETAP MEMPRIORITASKAN BIDANG EKONOMI, PENDIDIKAN, KESEHATAN. SERTA PERBAIKAN-PERBAIKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, SARANA DAN PRASARANA DAN INDUSTRI. HARUS MENJADI KOMITMEN BERSAMA SUPAYA TEREALISASI SECARA EFEKTIF, EFISIEN DAN TEPAT SASARAN. GUNA MENDORONG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

BESAR HARAPAN FRAKSI PERHATIAN KABUPATEN PURWAKARTA MAMPU MEMBANGUN DAERAHNYA DIATAS RATA-RATA KABUPATEN LAINNYA. HAL INI AKAN JAUH LEBIH BAIK JUGA KALAU CAPAIAN PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH) DAPAT DIOPTIMALKAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KEISTIMEWAAN KEDIGJAYAAN PURWAKARTA, DALAM BENTUK PROFESIONALISME KERJA DAN KEMANDIRIAN AKURASI CAPAIAN PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH) YANG SESUAI TARGET, LEBIH RASIONAL DAN REALISTIS SEHINGGA AKURASI DAN AKUNTABILITAS APBD DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA PROFESIONAL.

HADIRIN DAN TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

DENGAN MENGUCAPKAN " BISMILLAH ", KAMI DARI FRAKSI PERHATIAN MENYETUJUI DAN MENDUKUNG RAPERDA DIATAS UNTUK DIJADIKAN PERDA.

KAMI BERHARAP RAPERDA TERSEBUT AKAN MENJADI PERDA YANG MANFAATNYA BISA LANGSUNG DI RASAKAN MASYARAKAT DAN DAPAT BERLAKU SEBAGAIMANA MESTINYA.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

DEMIKIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI PERHATIAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, SEMOGA ALLAH SWT MERIDHO'I DAN MEMBERKATI KITA SEKALIAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

AKHIRULKALAM, WABILAHITTAUFIQWALHIDAYAH.

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

**PURWAKARTA, 09 JULI 2025
FRAKSI PERHATIAN
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA



H. ASEP ABDULLOH

SEKRETARIS



YANTHI NURHAYATI,S.Pd

ANGGOTA

1. ATO RUKMANA

1.

2. MUHSIN JUNAEDI

2.



**PENDAPAT AKHIR BUPATI PURWAKARTA
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB

SAMPURASUN

YANG TERHORMAT BAPAK/IBU PIMPINAN BESERTA
SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA;
YANG TERHORMAT, UNSUR PIMPINAN DAERAH, KAPOLRES
PURWAKARTA, DANDIM 0619 PURWAKARTA, KEPALA
KEJAKSAAN NEGERI, KETUA PENGADILAN NEGERI
PURWAKARTA, KETUA PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA,
DANYON ARMED-9 PASOPATI, DANMEN ARMED 2
STYRAYUDHA, SERTA DANSUB DENPOM PURWAKARTA;
PARA PIMPINAN ORGANISASI SOSIAL POLITIK, KETUA KPU
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, SESEPUH DAN

PINISEPUH PURWAKARTA, ORMAS, LSM, INSAN PERS
SERTA MASYARAKAT PURWAKARTA YANG SAYA CINTAI;

HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

SEGALA PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN
KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS RAHMAT, NIKMAT, HIDAYAH
DAN KARUNIA-NYA YANG TAK PERNAH PUTUS KEPADA
KITA SEKALIAN, HINGGA PADA SAAT INI KITA DAPAT
BERSILATURAHIM DAN BERKUMPUL UNTUK MENGHADIRI
RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR
BUPATI DALAM PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2024.

**RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT DAN
HADIRIN YANG BERBAHAGIA.**

SEBAGAIMANA TELAH KITA DENGARKAN BERSAMA,
LAPORAN PANITIA KHUSUS DPRD SERTA PANDANGAN DARI
SELURUH FRAKSI, SECARA KESELURUHAN DAPAT
DISIMPULKAN BAHWA, BAIK DARI SEGI KONTEKS MAUPUN
KONTEN, TERDAPAT PEMAHAMAN YANG SAMA BAHWA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH HARUS DILAKSANAKAN
SECARA TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN ASAS Keadilan dan Keadilan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Secara substansi, pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2024 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang ke-10 kalinya. Semoga capaian ini dapat terus kita tingkatkan di masa mendatang melalui kerja keras dan rasa tanggung jawab bersama.

Kami menyadari bahwa dalam dinamika pembangunan, diperlukan kerja keras dan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dari berbagai aspek. Keterlibatan tersebut mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, termasuk di dalamnya pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran.

**RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT DAN
HADIRIN YANG BERBAHAGIA.**

BERBAGAI PANDANGAN YANG DISAMPAIKAN, BAIK BERUPA OTOKRITIK TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN MAUPUN SARAN DAN TINDAK LANJUT, MERUPAKAN MASUKAN BERTARTAMBAH GUNA PENYELESAIAN PERMASALAHAN YANG ADA SERTA PERCEPATAN PELAKSANAAN ANGGARAN.

PADA PRINSIPNYA, KAMI SANGAT MENDUKUNG DILAKUKANNYA EVALUASI DAN PENAJAMAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH. OLEH KARENA ITU, SELURUH SARAN DAN MASUKAN YANG TELAH DISAMPAIKAN AKAN MENJADI PERHATIAN SERIUS DAN BAHAN PERBAIKAN KAMI KE DEPAN, DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG PADA AKHIRNYA AKAN BERMUARA PADA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PURWAKARTA.

MAKA PADA KESEMPATAN INI, KAMI INGIN MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL :

1. RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 MERUPAKAN PRODUK HUKUM BERSAMA ANTARA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, SEHINGGA SEBELUM DILAKUKAN EVALUASI DI TINGKAT PROVINSI, PERLU KIRANYA DILAKUKAN PENYEMPURNAAN-PENYEMPURNAAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
2. PERLU ADANYA KESEPAHAMAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DPRD DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DALAM MENYIKAPI MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024, SEHINGGA TERCERMIN ADANYA SINERGITAS YANG DIHARAPKAN OLEH SELURUH MASYARAKAT PURWAKARTA YANG KITA CINTAI.
3. BEBERAPA PERMASALAHAN YANG BELUM TERSELESAIKAN DAN MENJADI SOROTAN PIHAK PEMERIKSA, SEPERTI LEMAHNYA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SERTA KETIDAKPATUHAN

TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PERLU SEGERA DITINDAKLANJUTI MELALUI SOLUSI YANG TEPAT DAN EFEKTIF.

MESKI DEMIKIAN, PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA SENANTIASA BERKOMITMEN UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA BERKELANJUTAN, BAIK DARI SISI TEKNIS MAUPUN ADMINISTRATIF, GUNA MEWUJUDKAN PERUBAHAN YANG SIGNIFIKAN DAN BERDAMPAK NYATA SESUAI DENGAN HARAPAN DAN TUJUAN BERSAMA.

RAPAT PARIPURNA DPRD SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI.

DEMIKIAN KIRANYA KAMI SAMPAIKAN, SEMOGA ALLAH SWT MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN MEMBIMBING KITA DALAM MENGEMBAN TUGAS DAN AMANAH DARI SEGENAP MASYARAKAT PURWAKARTA YANG KITA CINTAI. BILLAHI TAUFIK WAL HIDAYAH.
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.


BUPATI PURWAKARTA

SAEPUL BAHRI BINZEIN

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. PURWAKARTA

HARI : RABU
TANGGAL : 09 JULI 2025
PUKUL : 13.00 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD
ACARA : RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA
PEMBICARAAN TK. II PERSETUJUAN BERSAMA
TERHADAP RAPERDA P2APBD KABUPATEN
PURWAKARTA TA. 2024

NO	NAMA	JABATAN	PARTAI	TANDATANGAN
1	SRI PUJI UTAMI	KETUA	GERINDRA	1
2	DIAS RUKMANA PRAJA, S.E.	WK. KETUA	GOLKAR	2
3	LUTHFI BAMALA	WK. KETUA	NASDEM	3
4	Drs. H. ENTIS SUTISNA, S.H., M.M.	WK. KETUA	PDI-P	4
5	RICKY SYAMSUL FAUZI	ANGGOTA	GERINDRA	5
6	H. TEDDY NANDUNG HERYAWAN, S.E.	ANGGOTA	GERINDRA	6
7	REGINA MULYA DWIYANTI	ANGGOTA	GERINDRA	7
8	SAID ALI AZMI	ANGGOTA	GERINDRA	8
9	SULAEMAN	ANGGOTA	GERINDRA	9
10	ZUSYEF GUSNAWAN, S.E.	ANGGOTA	GERINDRA	10
11	WAWAN SETIAWAN, S.E.	ANGGOTA	GERINDRA	11
12	Hj. NINA HELTINA	ANGGOTA	GERINDRA	12
13	DIANA LISU ARRANG BATO LIMBONG, S.Pd.	ANGGOTA	GERINDRA	13
14	MESAKH SUPRIYADI, S.E.,M.Si.	ANGGOTA	GOLKAR	14
15	AHMAD SANUSI, S.M.	ANGGOTA	GOLKAR	15
16	KARWITA, S.H.,M.H.	ANGGOTA	GOLKAR	16
17	KAMAL, S.S.	ANGGOTA	GOLKAR	17
18	H. OJA SUTISNA	ANGGOTA	GOLKAR	18
19	Hj. ENAH ROHANAH	ANGGOTA	GOLKAR	19
20	H. ELAN SOFYAN, S.M.	ANGGOTA	GOLKAR	20
21	Hj. PUTRIARTI PUTIK HARUMAWANGI, S	ANGGOTA	GOLKAR	21
22	Dra. Hj. DENI YANTHI	ANGGOTA	NASDEM	22
23	H. ELTHON BRAMEISTA GUNAWAN, S.H	ANGGOTA	NASDEM	23
24	IIN SALAMIRAH	ANGGOTA	NASDEM	24
25	DENISA WULANDARI, S.M.	ANGGOTA	NASDEM	25
26	DEVI MUTIARA SARI	ANGGOTA	NASDEM	26
27	ASTRI NOVITASARI	ANGGOTA	NASDEM	27
28	WARSENO, S.E.	ANGGOTA	PDI-P	28
29	INA HERLINA	ANGGOTA	PDI-P	29
30	LINA YULIANI	ANGGOTA	PDI-P	30
31	UJANG ROSADI	ANGGOTA	PDI-P	31
32	NOVITA PURWANTI	ANGGOTA	PDI-P	32

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI	TANDATANGAN
33	ALAIKASSALAM, S.H.I	ANGGOTA	PKB	33
34	HILMI SIROJUL FUADI	ANGGOTA	PKB	34
35	ZAENAL ARIFIN	ANGGOTA	PKB	35
36	CECENG ABDUL QODIR, S.Pd.I.	ANGGOTA	PKB	36
37	AGUS MAHARDIKA	ANGGOTA	PKB	37
38	DEDI JUHARI	ANGGOTA	PKS	38
39	H. MOH. ARIEF KURNIAWAN, M.M.	ANGGOTA	PKS	39
40	DIDIN HENDRAWAN, S.E.	ANGGOTA	PKS	40
41	H. ASEP NURYANI, S.Pd.I.	ANGGOTA	PKS	41
42	H. DEDI SUTARDI	ANGGOTA	PKS	42
43	DULNASIR, S.H., M.H.	ANGGOTA	DEMOKRAT	43
44	H. AGUS WIJAYA, S.H.	ANGGOTA	DEMOKRAT	44
45	ASEP CHANDRA TK	ANGGOTA	DEMOKRAT	45
46	MUHSIN JUNAEDI	ANGGOTA	HANURA	46
47	H. ASEP ABDULLOH	ANGGOTA	HANURA	47
48	YANTHI NURHAYATI, S.Pd.	ANGGOTA	PPP	48
49	ATO RUKMANA	ANGGOTA	PPP	49
50	H. AMING, S.M.	ANGGOTA	PAN	50

Purwakarta, 09 Juli 2025

PIMPINAN RAPAT





DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN

HARI/ TANGGAL : Rabu, 09 Juli 2025
PUKUL : 13.00 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA
ACARA : PENETAPAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KAB. PURWAKARTA TA. 2024

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
1		BUPATI	1
2		WAKIL BUPATI	2
3		SEKDA	3
4	Kaliswara	Kabid. Dampak	4
5	Agus P	Damkar	5
6	Agus Dwi Ceman	Baperda / Dis Paralel	6
7	IRVAN FAHRUDIN	Lapas Purwakarta	7
8	Schranh	Dispora perbud	8
9	DICKY D	Sesda / Staf Ahs	9
10	HERI HUNANT	Opus B	10
11	Pevi	Dppus	11
12	Lina	Dppus	12
13	Tuti Gantini	Disnakertrans	13
14	Sadiyah	W3 dit	14
15	Eduh	"	15
16	Ahmad	Sutro	16
17	Rasumat	Sutro Pol PP	17
18	Mimih. M	Sutro. PP	18
19	Mad Aukman	KBPP POLRI	19
20	NENDI. N	KODIM 0619/PWK	20
21	H. Aze Berr	PC. KB. FKPP	21
22	JENARIDAR	KODIM 0619/PWK	22
23	Desi A	DISPANGTAN	23
24	Soma W	"	24
25	Pidi R	DISPANGTAN	25
26	Zah. Zul	DPNUN	26
27	Tatang Sunary	kec Cagurke	27

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
28	Mulyadi		28 Juh
29	Wira		29 Wif
30	Upang		30 WPA
31	Taufik		31 JH
32	Eri		32 J
33	Widhiani H		33 J
34	ADITYO PRABOWO	BANK RJB	34 J
35	Bagi Sura	ben. tajumaru	35 J
36	Ara	Dokumen	36 J
37	Ivan	Diskominfo	37 J
38	Ilham	Protompin	38 J
39	Nabila	"	39 J
40	E GA	"	40 J
41	Nabila Aulia L	"	41 J
42	Yani K	Bapperida	42 J
43	Gibor K2 Rerif	K. Dede Satri	43 J
44	Skandani Gibas		44 J
45	AL IDAUS N.	Kee. Dord.	45 J
46	Alur aia jup	Sete	46 J
47	Alis' Srikusti	Sete	47 J
48	Wawon W.	Dispanjtan	48 J
49	Ano Myrah	Dinika	49 J
50	Andi. Chacudin	Dinika	50 J
51	Doddy	Sekpi Wabup	51 J
52	Suci	7F	52 J
53	Sheila	Sekpi	53 J
54	Muhammady		54 J
55	Kapten Wahyu	Kodim 0809 Puk	55 J
56	Dre	Despora Puk	56 J
57	Diky S	Drpki	57 J
58	DR. HENRI H	Drasos P3A	58 J
59	DWAR		59 J
60	Iman I	Kec. Basawati	60 J

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
61	DEDE RN	ADKANG	61
62	Pidwan	Kec. Kinarpedes	62
63	Uang Suryadi	Dinas PJK	63
64	n. shilvan		64
65	Dindin.		65
66	Dadang R	BPBD	66
67	Arise	KESBANGPOL	67
68	dr. Eva Lysan D	Dinkes	68
69	Sabana	Sekam	69
70	Arian	DPPKB	70
71	ARIB	Dinkes	71
72	Erlum	Disdik	72
73	Aam.	Kec. Pak	73
74	Murudin	Disarpus.	74
75	Gan	Dinas	75
76	ABDUL	PERS	76
77	A. Muiz	Kemendag	77
78	Asep Sanjaya	Kabup Umum Ponda	78
79	Ine Herminda	Dinkes	79
80	GANDI F.P.	YONARMED 9	80
81	Dede Supendi	Dinkes	81
82	Melita	Sekam	82
83	Heryadi Erlan	Kolon BPBD	83
84	Risa	Kec. Cebek	84
85	M. ARIF.	KASI BPBD	85
86	GUSENDI	Disduk	86
87	Mikha. R.S	Disarpus	87
88	Sky Karimah	Diskominfo	88
89	BRI B.		89
90	Harun		90
91	Jaka		91
92	Aulia. P.	Kasatpol PP	92
93	Si Sikanan	Bappon	93
94	Rachmanah	Disarpus	94
95	Hrv AR	Kec. Wanayasa	95

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
96	Jakarin	LMP/alim-	96
97	Marwah m	Kee- BRC.	97
98	Al Nuryati		98
99	Ali NUR DIN	ALI NUR DIN	99
100	Meoni 1-3	DALUHAN	100
101	Feri	Arir/pupor.	101
102	Cipang.		102
103	Nurdhanira R.	Kar. keu Disdik	103
104	Enauah	Sekur Disdik	104
105	Didi Garmach	DPUR	105
106	H. Dudy	Laskar Komando	106
107	M. Syarif H	Kajari Pwk	107
108	Jepes J.	Disarpas	108
109	SY MI OAH	BKPSDM	109
110	Hilda Ziradine S	Umum	110
111	Meilita	Umum	111
112	Nina Houlink	BICAD	112
113	Agus SURNAMAN	BICAD	113
114	Rora		114
115	Rio		115
116	Hendar		116
117	Endang		117
118	WAN SORESO	DISTUB	118
119	Iman	BAPENDA	119
120	HERU	Camat	120
121	Yuli	Camat	121
122	Kusnandar	Disarpas	122
123	ABIB	DISARPUS	123
124	M. Kusin.	Camat Porom	124
125	Dodi W	DBdk	125
126	Rudi S	-1-	126
127	Sulaeman	Sulan	127

NO	NAMA	INSTANSI / ORMAS	TANDATANGAN
128	Rrac.		128 Rrac
129	Redi		129 Redi
130	Kleming. M	Dineng p3 A	130 Kleming
131	Devi Sarai	- 4 -	131 Devi Sarai
132	Nina		132 Nina
133	Wicky	Staf Khl.	133 Wicky
134	WYAS	Humas	134 WYAS
135	Yunda	u	135 Yunda
136	Kita	u	136 Kita
137	Sula	Distomings	137 Sula
138	Fahur-5	Dusturuk	138 Fahur-5
139	Novia Heryani	Sekpri	139 Novia Heryani
140	Rj. Md. Rax' R.	Rusdi	140 Rj. Md. Rax' R.
141	Duan Kordin	Kpa kal pul	141 Duan Kordin
142	Putri Targia	Sekpri	142 Putri Targia
143	Rani		143 Rani
144	Halum		144 Halum
145	Nwa.0	Bapow da	145 Nwa.0
146	Rque 2	Bappena	146 Rque 2
147	Ka	RSS	147 Ka
148	Finy Heryana	pandek Salam	148 Finy Heryana
149	S. Norkman.	DKUPP	149 S. Norkman.
150	Alex	Proclamping	150 Alex
151	Ardi Wadid	Dendro to	151 Ardi Wadid
152	Angus Handoko	Dusnakerbans	152 Angus Handoko
153	Uee Af	Disarper	153 Uee Af
154	Desi Hendriyani	Disarper	154 Desi Hendriyani
155	Carac.	Lsm	155 Carac.
156	IRMAN	Lsm Kompak	156 IRMAN
157			157
158			158
159			159
160			160



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 100.3.2/ Kep. 13 - DPRD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TA. 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Juncto Pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pada tanggal 09 Juli 2025 telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tingkat II pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024;
- b. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka untuk tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024;
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah tersebut pada diktum PERTAMA di atas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 09 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA,



SRI PUJI UTAMI

LAMPIRAN I : KEPUTUSN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.
NOMOR : 100.3.2/Kep. 13- DPRD/2025
TANGGAL : 09 JULI 2025
TENTANG : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TA. 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6253);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

33. Peraturan Presiden No Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450),
39. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213),
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799),
45. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 7);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1),
48. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6),
49. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	: Rp 2.548.811.674.513,00
b. Belanja dan Transfer	: <u>Rp 2.554.467.819.500,00</u>
Defisit	: (Rp 5.656.144.987,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	: Rp 37.251.937.661,00
2. Pengeluaran	: <u>Rp 5.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	: Rp 32.251.937.661,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp178.359.546.024,00) dengan rincian sebagai berikut :
- 1. Anggaran pendapatan : Rp 2.272.171.220.537,00
setelah perubahan
 - 2. Realisasi : Rp 2.548.811.674.513,00
Selisih kurang : (Rp178.359.546.024,00)

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp 204.955.338.698,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Anggaran belanja dan transfer: | Rp 2.759.423.158.198,00 |
| setelah perubahan | |
| 2. Realisasi | : <u>Rp 2.554.467.819.500,00</u> |
| Selisih kurang | : (Rp 204.955.338.698,00) |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp26.595.792.674,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Surplus/(Defisit) setelah | : (Rp 32.251.937.661,00) |
| perubahan | |
| 2. Realisasi | : <u>(Rp 5.656.144.987,00)</u> |
| Selisih lebih | : Rp 26.595.792.674,00 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan | : Rp 37.251.937.661,00 |
| pembiayaan setelah | |
| perubahan | : <u>Rp 37.251.937.661,00</u> |
| 2. Realisasi | : Rp 0 |
| Selisih | |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran | : Rp 5.000.000.000,00 |
| pembiayaan setelah | |
| perubahan | : <u>Rp 5.000.000.000,00</u> |
| 2. Realisasi | : Rp 0 |
| Selisih | |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto | : Rp 32.251.937.661,00 |
| setelah perubahan | |
| 2. Realisasi | : <u>Rp 32.251.937.661,00</u> |
| Selisih lebih | : Rp 0 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | : Rp 37.251.937.661,00 |
| b. Penggunaan SAL sebagai | : Rp 37.251.937.661,00 |
| Penerimaan Pembiayaan | |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan: | Rp 26.595.792.674,00 |
| Anggaran | |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan | : Rp 0,00 |
| Tahun Sebelumnya | |
| e. Saldo Anggaran Lebih Akhir | : Rp 26.595.792.674,00 |

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan	: Rp 2.373.476.671.441,00
b. Jumlah Beban	: Rp 2.306.347.294.320,00
c. Surplus/Defisit dari Operasi	: Rp 67.129.377.121,00
d. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	: Rp 0,00
e. Beban Luar Biasa	: Rp 23.160.000,00
f. Surplus/Defisit LO	: Rp 67.106.217.121,00

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	: Rp 2.860.366.370.078,00
b. Surplus/Defisit LO	: Rp 67.106.217.121,00
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp 37.059.546.158,00
1. Koreksi Piutang	: Rp 35.681.437.446,00
2. Koreksi Penyisihan Piutang	: (Rp 20.546.450,00)
3. Koreksi Persediaan	: Rp 1.757.355.000,00
4. Koreksi Aset Tetap	: (Rp 16.336.654.982,00)
5. Koreksi Penyusutan	: Rp 12.804.546.325,00
6. Koreksi Utang	: Rp 3.162.547.819,00
7. Koreksi Pendapatan	: Rp 10.861.000,00
d. Ekuitas Akhir	: Rp 2.694.532.133.357,00

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	: Rp 3.095.743.952.952,00
b. Jumlah Kewajiban	: Rp 131.211.819.595,00
c. Jumlah Ekuitas dana	: Rp 2.964.532.133.357,00

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2024	: Rp 37.254.090.658,00
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	: Rp 235.942.887.405,00
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	: (Rp 246.599.032.392,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	: Rp 0
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	: (Rp 12.059.551,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2023	: Rp 26.610.005.222,00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1) Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 2) Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Lampiran III Laporan Operasional;
- 4) Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
- 5) Lampiran V Neraca;
- 6) Lampiran VI Laporan Arus Kas;
- 7) Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan;
- 8) Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- 9) Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- 10) Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

- | | |
|--------------------|--|
| 11) Lampiran XI | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; |
| 12) Lampiran XII | Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| 13) Lampiran XIII | Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; |
| 14) Lampiran XIV | Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; |
| 15) Lampiran XV | Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; |
| 16) Lampiran XVI | Daftar Dana Cadangan Daerah; |
| 17) Lampiran XVII | Daftar Kewajiban Jangka Pendek; |
| 18) Lampiran XVIII | Daftar Kewajiban Jangka Panjang; |
| 19) Lampiran XIX | Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |
| 20) Lampiran XX | Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; |
| 21) Lampiran XX.1 | Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; |
| 22) Lampiran XX.2 | Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; |

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.


BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal, 09 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,



SRI PUJI UTAMI

PERSETUJUAN BERSAMA
BUPATI PURWAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR: 100.3.2/Kep. 03 -DPRD/2025
100.3.2/Kep. 03 - HUK/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertandatangan di bawah ini:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. SAEPUL BAHRI BINZEIN | : | Bupati Purwakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purwakarta, yang beralamat di Purwakarta, Jalan Gandanegara Nomor 25, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. |
| 2. SRI PUJI UTAMI | : | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta |
| 3. DIAS RUKMANA PRAJA | : | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta. |
| 4. LUTHFI BAMALA | : | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta. |
| 5. ENTIS SUTISNA | : | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta yang beralamat di Purwakarta, Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Ciganea-Jatiluhur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melakukan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025 berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 6 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 100.3.2/Kep.13-DPRD/2025 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut:

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu tentang :

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Ketua,

SRI PUJI UTAMI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
Wakil Ketua,



DIAS RUKMANA PRAJA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
Wakil Ketua,



LUTHFI BAMALA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
Wakil Ketua,



ENTIS SUTISNA